BERAGAMA YANG MENCERAHKAN

Beragama yang Mencerahkan merupakan tema Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan di Kota Bengkulu pada tanggal 10-12 Jumadil Akhir 1440 H/ 15-17 Februari 2019 M. Tema yang sangat aktual dengan situasi kehidupan, keummatan dan kebangsaan di tanah air. Dalam sidang Tanwir tersebut dihasilkan "Risalah Pencerahan". Sebuah pernyataan penegasan bahwa Islam adalah agama yang membawa risalah pencerahan (*din at-tanwir*) mengeluarkan umat manusia dari kegelapan (*al-dhulumat*) kepada kehidupan yang tercerahkan (*al-nur*).

Dalam konteks penguatan pesan dan makna Tanwir tersebut, buku ini menjadi bacaan penting bagi warga persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka menyebarluaskan pesan-pesan dan gagasan Islam yang mencerahkan kehidupan. Bukan Islam yang berwajah muram, akan tetapi Islam yang mencerahkan hati dan akal pikiran serta perbuatan. Penulis dalam buku ini adalah para kader, pimpinan, aktivis Muhammadiyah baik struktural maupun kultural.

ISBN: 978-602-60970-5-7

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN

Abdul Mu'ti & Azaki Khoirudin
(Penyunting)

Prolog
Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah

Epilog
M. Amin Abdullah
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN

RISALAH PEMIKIRAN TANWIR MUHAMMADIYAH

Penyunting
Abdul Mu'ti & Azaki Khoirudin

Prolog:
Haedar Nashir

Epilog:
M. Amin Abdullah

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN

RISALAH PEMIKIRAN TANWIR MUHAMMADIYAH

Penyunting:
Abdul Mu'ti & Azaki Khoirudin

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN
Risalah Pemikiran Tanwir Muhammadiyah

Penyunting:
Abdul Mu'ti & Azaki Khoirudin

Kontributor:
Abdul Mu'ti | Ahmad Rizky Mardhatillah Umar | Andar Nubowo
Ari Susanto | Azaki Khoirudin | Benni Setiawan
David Krisna Alka | Fajar Riza Ul Haq | Hasnan Bachtiar
Husni Amriyanto Putra | Ilham Ibrahim | Muhbib Abdul Wahab
Piet Hizbullah Khaidir | Pradana Boy ZTF | Sudarnoto Abdul Hakim

Penyelaras Akhir: Dinan Hasbudin
Pendesain Sampul & Isi: desain651@gmail.com

Diterbitkan oleh:
Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah
Jl, Menteng Raya No. 62 Jakarta
Didukung oleh:
Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur

14 x 21 cm; 196 Halaman
ISBN: 978-602-60970-5-7
Cetakan I: Mei 2019

SENARAI ISI

Prolog

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN

Haedar Nashir

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

BERAGAMA ialah praktik hidup pemeluk agama yang jiwa, pikiran, sikap, dan tindakannya berlandaskan agama yang dianutnya. Dengan beragama, manusia itu beriman sekaligus berilmu dan beramal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai dasar dari agama itu sendiri. Dengan demikian, beragama merupakan kata kerja dari setiap orang yang memeluk agama, yang dalam terminologi Islam sepadan dengan mengamalkan agama secara totalitas atau kafah. Adapun beragama yang mencerahkan tentu saja praktik hidup setiap orang beragama, khususnya di kalangan kaum Muslim yang melahirkan perubahan ke arah yang penuh cahaya keislaman sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW.

Bagi setiap Muslim melekat kewajiban untuk menjalankan agama Islam secara menyeluruh atau kafah sehingga dirinya merupakan pengejawantahan langsung dari Islam itu sendiri, sebagaimana Nabi Muhammad dilukiskan oleh Siti Aisyah sebagai berakhlak Al Quran. Artinya bahwa Muhammad sebagai "Al Quran yang berjalan" di muka bumi ini, yang harus diikuti para pengikutnya. Semua Muslim, apalagi yang mengklaim diri selaku pengikut Nabi Muhammad, yakni warga Muhammadiyah, niscaya menjalankan dan mewujudkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan dalam keseluruhan hidupnya sehingga terwujud "masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

Tradisi Ber-"iqra"

Beragama atau bagi umat Islam "berislam yang mencerahkan" dimulai dari mengembangkan dan menyebarluaskan tradisi "iqra" (bacalah), sebagaimana wahyu atau risalah pertama Islam yang dibawa Nabi Muhammad dari Goa Hira. Kehadiran Islam yang dibawa risalahnya oleh Muhammad sebagai nabi akhir zaman sangat *revolusioner* dan *transformasional*. Sebab, ia dimulai dari perintah Allah untuk "iqra", yakni "iqra dengan dan atas nama Tuhan", bukan sembarang iqra, melainkan iqra yang bersifat Langit dan *profetik*.

Dalam tradisi iqra bukan hanya keniscayaan setiap Muslim untuk membaca ayat-ayat Al Quran, melainkan juga ayat ayat *kauniyah* atau semesta. Iqra membaca ayat-ayat langit, bumi, dan alam raya dengan segala isinya, termasuk iqra tentang manusia dengan segala dimensinya. Iqra menurut para mufasir

bukan hanya membaca secara *verbal* dan *tekstual*, melainkan keseluruhan makna yang tercakup arti "iqra" dalam bahasa Arab. Sebutlah seperti *tafakur*, *tadabur*, *tanadhar*, *tasyakur*, serta berbagai aktivitas akal pikiran, kajian keilmuan, dan membaca secara *kontekstual* secara menyeluruh. Dalam terminologi *tarjih*, iqra memiliki makna pada pemahaman keislaman secara *bayani*, *burhani*, dan *irfani* secara interkoneksitas.

Tradisi iqra yang bercorak transformasional itu akan melahirkan pencerahan alam pikiran, keilmuan, dan peradaban. Dalam tradisi Barat modern, tradisi pencerahan (*aufklarung*, *enlightenment*) menurut Immanuel Kant dimulai dengan *sapere aude*, yakni keberanian menggunakan akal pikiran yang mendobrak segala doktrin yang membelenggu, termasuk doktrin agama Abad Pertengahan yang mengerangkeng akal pikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sementara menurut Horatius, *sapere aude* bermakna 'beranilah menjadi bijak'.

Kiai Dahlan menyerukan penggunaan "Akal yang sucimurni", sedangkan dalam "Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" dikenal "Akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam". Dalam ajaran dan sejarah Islam justru Islam itu sendiri sumber nilai pencerahan, dimulai dari risalah iqra sebagai wahyu pertama dalam misi kenabian Muhammad. Islam adalah ajaran yang pro akal pikiran, pro ilmu pengetahuan, serta segala kegiatan berpikir dan berzikir yang melahirkan generasi *ulul-albab* serta melahirkan kemajuan peradaban dunia di era kejayaan Islam.

Khusus bagi internal Muhammadiyah, jika ingin beragama yang mencerahkan berbasis iqra, kembangkan kebiasaan membaca, mengkaji, mengaji, diskusi, seminar, bedah buku, berwacana, serta berbagai kegiatan keilmuan dan tradisi iqra untuk mengembangkan tajdid sebagaimana karakter Muhammadiyah. Terbiasalah menghadapi keragaman pemikiran, tentu bagi warga Muhammadiyah dengan rujukan pemikiran Islam dan ideologi Muhammadiyah yang benar dan tidak ditafsirkan sendiri.

Dalam menggelorakan "Beragama yang Mencerahkan", segenap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah penting menyebarluaskan serta mengembangkan tradisi iqra dan pencerahan akal budi, seperti sikap hidup amanah, adil, ihsan, kasih sayang sebagai bagian penting dari gerakan pencerahan yang menebar pesan-pesan keislaman yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan. Kembangkan pandangan Islam yang menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani* secara melintasi. Tak mudah mengikuti arus, tetapi jangan alergi pada pemikiran yang berkembang sebelum dikaji dengan saksama. Dalam mengkaji pun tidak perlu penuh ketakutan, fanatik buta, dan apriori. Bukalah pikiran dan wawasan agar menjadi pelaku gerakan yang berkemajuan.

Jadilah anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah yang memiliki sifat *ulul-ulbab*, sebagaimana dipesankan Allah dalam Al Quran yang artinya: "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal" (QS Az-Zumar: 18). Kiai

Dahlan mengkaji ayat ini dan sering berpesan agar orang Islam termasuk ulamanya harus berkemajuan: "*dadiyo* kiai *sing* kemajuan, *lan aja kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo* Muhammadiyah", yang artinya 'jadilah ulama yang berpikiran maju, dan jangan berhenti bekerja keras untuk kepentingan Muhammadiyah'.

Pencerahan Perilaku

Beragama atau berislam yang mencerahkan juga melekat pada "pencerahan akal budi" yang berbasis kerisalahan Muhammad untuk "menyempurnakan akhlak mulia" dan menebar *rahmatan lil-'alamin*" dalam kehidupan semesta. Ajaran Islam yang mencerahkan harus terwujud dalam karakter insan berakhlak mulia, sebagaimana Nabi "diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia".

Di antara nilai Islam sekaligus perwujudan akhlak mulia yang mencerahkan dalam kehidupan menurut ajaran Islam ialah amanah, adil, ihsan, dan kasih sayang. Insan Muslim diberi tanggung jawab menunaikan amanah dalam kehidupannya. Amanah yakni tugas mulia yang mesti ditunaikan untuk mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Amanah setiap Muslim bahkan sangat berat, yakni membawa kerisalahan Allah yang harus diwujudkan dalam kehidupan (QS Al-Hasyr: 21).

Amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi ialah menyebarkan risalah Tuhan dan mengajarkan ilmu serta memakmurkan dunia (QS Al-Baqarah: 30; Hud: 60). Manusia bahkan di-

beri amanah menunaikan tugas hidupnya sesuai perintah Allah dan Sunnah Rasulullah (QS An-Nisa: 58).

Islam, selain mengajarkan amanah, juga mewajibkan pemeluknya untuk berbuat adil, yakni bersikap benar, obyektif, dan tidak berat sebelah. Adil itu menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat. Ajaran tentang keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam Islam (QS An-Nisa: 135). Sikap adil itu pantulan dari nilai benar dan nirhawa nafsu sehingga insan yang beriman jadi lurus hati sekaligus jujur dan bijaksana. Ketika harus menyuarakan kebenaran pun tetap dengan sikap adil dengan menjunjung tinggi obyektivitas, bukan subyektivitas. Sikap adil bahkan harus ditunjukkan meski terhadap pihak musuh. Allah mengajarkan agar Muslim bertindak adil dan jangan karena benci terhadap suatu kaum membuat diri bertindak tak adil (QS Al-Maidah: 8).

Selain nilai adil, setiap Muslim juga diajarkan untuk berbuat ihsan. Ihsan ialah kebajikan utama yang melintas batas rohani seseorang. Ihsan ialah "engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Dia, kalaupun engkau tak mampu melihat Dia, sesungguhnya Allah melihatmu" (HR Bukhari-Muslim). Hadis tersebut mengandung makna hakikat dan makrifat dalam *habluminallah* (hubungan dengan Allah), yang buahnya ialah *habluminannas* atau hubungan antarinsan yang serba luhur. Sikap ihsan yang memancarkan kemuliaan ditunjukkan Nabi. Nabi memaafkan bangsa Thaif karena mereka belum tercerahkan akal budinya.

Pencerahan akal budi juga diperkaya dengan ajaran kasih sayang, selain dengan adil dan ihsan. Islam mengajarkan kasih

sayang atau sikap welas asih terhadap sesama, bahkan terhadap seisi alam semesta.

Di tengah lalu lintas dan dinamika paham serta perilaku keagamaan yang beragam dan tidak jarang ekstrem, Muhammadiyah dituntut perannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang mencerahkan. Anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi beragam pemikiran dan keadaan, seperti menghadapi tahun politik, juga niscaya cerdas, bijak, dewasa, dan berkemajuan.

Sikap terbuka dengan daya seleksi yang cerdas merupakan ciri orang berkemajuan. Kalau berbeda pendapat atau tak bersetuju dengan pemikiran orang lain, lakukan diskusi dan wacana dialog, tidak perlu mengerahkan massa atau tindakan yang politis sebagaimana dilakukan sebagian kalangan. Salah satu sifat dalam kepribadian Muhammadiyah ialah "lapang dada, luas pandang, dan memegang teguh ajaran Islam". Sifat lainnya ialah "bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana". Jika ingin mencerahkan semesta, jadilah sang pencerah! (*Sumber: Opini Kompas, 21 Februari 2019).*
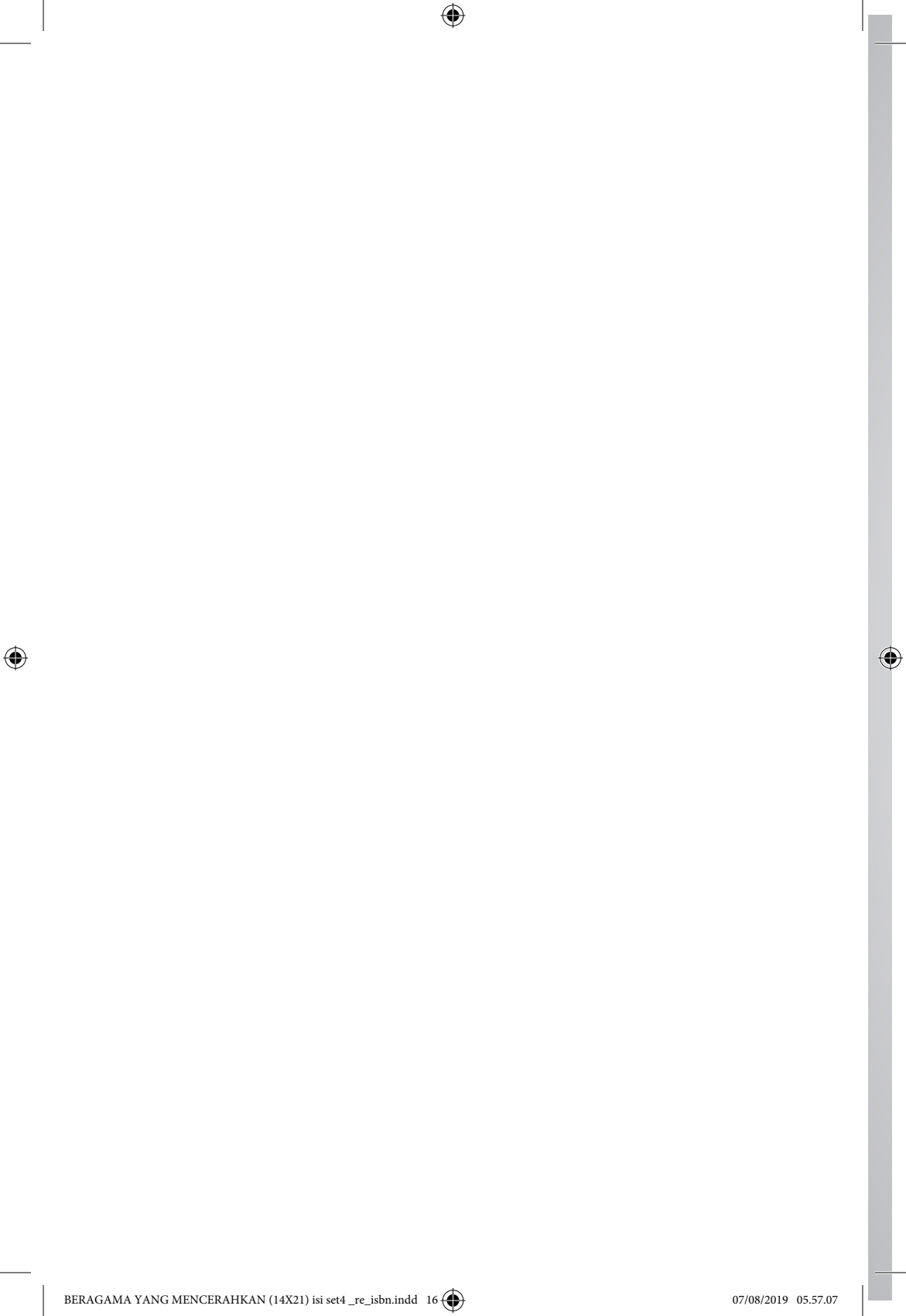
I

Memahami Pesan Tanwir

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN

Abdul Mu'ti

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan Sidang Tanwir 15-17 Februari di Komplek Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tanwir merupakan Permusyawaratan tertinggi di dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar. Sidang Tanwir yang akan dibuka oleh Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla itu mengambil tema Beragama yang Mencerahkan.

Politisasi Agama

Dalam beberapa waktu terakhir, Muhammadiyah melihat adanya fenomena keberagamaan yang tidak konstruktif. *Pertama*, meningkatnya gejala spiritualisasi agama. Umat Islam Indonesia memiliki ketaatan dan kesadaran ibadah yang sangat tinggi, khususnya ibadah *mahdlah* seperti salat berjamaah, puasa sunnah, ibadah umrah, dan ritual ibadah formal lainnya. Fenomena tersebut tumbuh pesat khususnya di kalangan masyarakat Muslim

kelas menengah perkotaan. Akan tetapi, meningkatnya spiritualitas tersebut belum sejalan dengan kesalehan sosial, khususnya moralitas publik. Spiritualisasi agama, pada level tertentu, menimbulkan gejala kebangkitan kembali fatalisme, mistisisme, ekstemisme, dan domestikasi agama. Meningkatnya gejala spiritualisasi agama disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kerasnya beban dan kompleksitas masalah. Gejala spiritualisasi bisa merupakan eskapisme dimana agama dijadikan sebagai *panacea* spiritual tetapi tidak mampu menyelesaikan berbagai problematika sosial.

Kedua, gejala komodifikasi agama. Kesadaran dan pengamalan agama memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan ladang bisnis yang *profitable*. Kesadaran berjilbab berdampak besar terhadap perkembangan bisnis fashion. Peluang bisnis semakin besar ketika berjilbab bukan sekadar untuk menutup aurat, tetapi juga trend gaya hidup masyarakat urban. Tingginya kesadaran dan kemampuan berkurban membuka peluang bisnis hewan. Demikian halnya dengan budaya ziarah spiritual yang memacu bisnis pariwisata. Kesadaran berderma merupakan faktor penting yang mendorong berdirinya lembaga-lembaga filantropi. Tidak hanya itu, pemakaman juga telah menjadi bidang bisnis baru yang tidak kalah dengan usaha properti. Berbisnis merupakan profesi yang mulia dan dianjurkan oleh Islam. Tetapi membisniskan agama bisa menimbulkan masalah Syariah dan tindak kriminal. Demi meraup keuntungan sebagian masyarakat sengaja menjual agama dengan harga murah misalnya membuat dalil-dalil palsu atau mengeksploitasi Hadits-hadits lemah. Penipuan

jamaah umrah atau nasabah keuangan Syariah sudah menjadi hal yang lumrah.

Ketiga, fenomena politisasi agama . Sebagian Muslim berpendapat bahwa Islam adalah satu kesatuan agama, dunia, dan pemerintahan (*din-dunia-daulah)*. Islam memiliki sistem politik, hukum, dan negara yang harus diterapkan secara utuh *(kaffah)*. Bagi kelompok ini bentuk negara dan hukum yang tidak berdasarkan Islam dianggap *taghut* yang harus ditolak dan diganti sesuai Syariah. Kelompok ini secara ideologis membawa agama ke ranah politik sebagai bentuk aspirasi cita-cita atau untuk meraih kekuasaan. Politisasi agama tidak dapat dihindari dalam alam demokrasi yang meniscayakan keterbukaan dan Reformasi yang membuka ruang kebebasan berserikat dan berpendapat. Sistem demokrasi liberal menimbulkan ekses politik primordial dan identitas berbasis agama.

Keempat, adanya gejala polarisasi politik. Polarisasi politik terjadi karena fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu pasangan calon presiden. Semua hal terkait lawan dipandang salah seluruhnya. Sebaliknya, calon yang didukung dianggap *"ma'shum":* sempurna tiada cela. Polarisasi politik terlihat dari menguatnya kampanye negatif dengan mengkritik kebijakan dan kelemahan lawan serta kampanye hitam dengan menjelekkan dan menjatuhkan "kawan". Ujaran dan pelintiran kebencian serta *hoaks* melalui media sosial sungguh sangat mengkhawatirkan. Media sosial menjadi arena pertempuran sengit pendukung masing-masing capres. Selain karena murah, penggunaan media sosial juga mudah, menarik, massif, dan relatif aman karena tidak

adanya regulasi politik sehingga tidak melanggar aturan kampanye. Salah satu yang menjadi konsen kreativitas komunitas virtual-digital adalah undang-undang ITE yang suatu saat bisa menjerat mereka.

Mencerahkan Umat

Empat gejala tersebut bisa menimbulkan segregasi dan perpecahan umat dan bangsa. Karena itu, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk menempatkan dan mengangkat agama pada posisinya yang tertinggi.

Pertama, Muhammadiyah memaknai agama sebagai kata kerja: beragama sebagai proses aktif dan dinamis *(becoming)*. Beragama, baik dari sisi pemahaman maupun pengamalan, berlangsung terus menerus dan terbuka. Agama dapat menjadi inspirasi kemajuan apabila manusia menyadari bahwa keberagamannya belumlah sempurna sehingga manusia senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik.

Kedua, agama menurut Muhammadiyah merupakan wahyu Allah yang berisi seperangkat ajaran, nilai-nilai, dan hukum yang menuntun manusia menuju kebahagiaan hidup material dan spiritual serta dunia dan akhirat. Beragama merupakan proses literasi yang membuka cakrawala pandang, nalar yang terbuka, dan nurani yang hidup sehingga manusia mencapai keluhuran akhlak sebagai puncak ritual ibadah. Beragama adalah proses *knowledge literacy* menuju *moral literacy. "Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang bodoh? Sesungguhnya orang--orang yang berilmu adalah orang yang bertaqwa"* (QS.39 Az-

Zumar: 9). Terbentuknya akhlak mulia merupakan tujuan disyariatkannya agama (Rahman, 1985). Beragama yang mencerahkan akan menghapuskan fanatisme buta, *apriori*, dan merasa paling benar sendiri. Orang yang tercerahkan *(ulul albab)* mampu melihat sesuatu secara jernih dengan ketajaman akal dan mata batin sehingga mampu bersikap obyektif dan berlaku arif menegakkan kebenaran.

Ketiga, agama merupakan sumber nilai dan motivasi yang menggerakan manusia meraih kemajuan. Agama adalah spirit yang membangun optimisme sebagai energi dalam yang membentuk karakter yang kuat. Dalam konteks ini, Alquran menyebut agama sebagai *"nur"* (cahaya) yang menerangi dan meneguhkan manusia di atas jalan kebenaran, memiliki visi jauh ke depan dan tegar menghadapi berbagai tantangan. *"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada (agama) Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) dengan kebohongan. Dan Allah akan menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang kafir membenci."* (QS. 61, As-Saff: 7-8).

Beragama yang mencerahkan merupakan pilihan yang menempatkan agama sebagai jalan terang, pedoman kehidupan, dan nilai kemuliaan yang menjadikan manusia terbuka, berpikir positif, berbuat yang terbaik untuk kemajuan bersama. Agama mengangkat manusia melampaui sekat-sekat primordial dan supremasi di atas kekuasaan. Beragama yang mencerahkan me-

rupakan peta jalan yang membawa bangsa Indonesia meraih kemajuan. (*Sumber*: Republika, 15 Februari).

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN

Benni Setiawan

AGAMA kini kian sulit didefinisikan. Agama sebagai peranti mulia seringkali berubah menjadi kekuatan menakutkan. Sebagian kelompok kecil umat menjadikan agama sebagai alat untuk menyerang dan melumpuhkan kelompok lain. Agama menjadi "anteman", pembenar atas tindakan yang jauh dari nalar keimanan dan kemanusiaan.

Fenomena itulah yang mengkhawatirkan, sehingga semua pihak perlu sadar bahwa banyak kelompok yang membajak nama agama untuk kepentingan jangka pendek. Membajak makna dan nilai agama ini sungguh mengerikan di tengah semakin tipisnya nalar keagamaan umat. Tipisnya nalar umat itu ditandai dengan mudahnya sekelompok umat terpapar hoaks yang mendorong terjadinya permusuhan. Hoaks tidak hanya mengerdilkan akal sehat, namun juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan di luar kemanusiaan.

Berbagai masalah di atas menjadi keprihatinan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai bagian bangsa merasa terpanggil untuk turut serta mengurai masalah itu. Melalui Sidang Tanwir di Bengkulu, 10-12 Jumadil Akhir 1440 H/15-17 Februari 2019 M, Persyarikatan Muhammadiyah mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan". Beragama perlu mencerahkan semua. Agama perlu menjadi laku suci berdimensi kemanusiaan agar tidak dibajak oleh segelintir orang. Agama perlu bangkit dari keterpurukan karena umat menjadikannya sebagai alat dan tameng politik (kepentingan jangka pendek).

Kebangkitan Rohani

M. Dawam Rahardjo (2012) mencatat bahwa kebangkitan rohani menjadi hal esensial di tengah keterpurukan agama. Kebangkitan rohani itu ditandai dengan peningkatan iman dan takwa yang termanifestasi dalam ibadah dan akhlak. Akan tetapi, kebangkitan itu bukan meningkatkan fanatisme melainkan toleransi, bukan kecenderungan tindakan kekerasan dalam membela agama, melainkan sikap dan perilaku yang santun dan dalam terhadap orang lain.

Dalam situasi itu tidak ada lagi terorisme atas nama agama, melainkan dialog yang terbuka dan perjuangan yang demokratis. Dalam kebangkitan itu, umat menegakkan kebebasan beragama dan tidak menghalangi umat yang beragama lain untuk menjalankan ritual dan keyakinan agamanya, terbuka dalam proses relasi beragama. Agama dengan demikian dimaknai sebagai relasi kemanusiaan yang sehat. Kemanusiaan itulah yang mengge-

rakkan semua umat untuk berdiri di jalur kebenaran. Kebenaran menuntun manusia menuju jalan pencerahan. Jalan pencerahan itulah yang akan menjadi penunjuk jalan menuju keautentikan.

Literasi Kebudayaan

Robert D. Lee (2000) menerangkan bahwa keautentikan pada tingkat individu berarti tidak meniru orang lain tetapi mengikuti kata hati. Sedangkan pada tingkat masyarakat keautentikan dimaknai sebagai kebutuhan suatu komunitas atas agenda-agenda yang tidak disetir oleh kelompok lain, tetapi dibangun atas kesadaran budaya sendiri.

Di sinilah pentingnya literasi kebudayaan dalam beragama. Literasi kebudayaan memungkinkan umat untuk terbuka dengan hal baru. Umat tidak lagi mudah kaget dan atau tercengang dengan sebuah fenomena (*ora gumunan, ora kagetan*). Hal itu ditandai dengan umat dapat berpikir kritis dalam menerima informasi. Informasi tidak langsung ditelan mentah-mentah dan disebarkan. Namun, mereka mampu menyaring dan menghentikan informasi yang ia terima jika hal itu tidak sesuai dengan akal sehat dan nurani yang waras.

Sikap itulah yang akan mendorong umat terbebas dari paparan hoaks. Umat sadar bahwa hoaks hanya akan menimbulkan kecurigaan, rasa tidak nyaman, dan permusuhan antarsesama. Hoaks pun hanya akan semakin menggerus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Pasalnya, penyebar hoaks baik yang aktif maupun pasif seringkali lupa bahwa setiap aktivitasnya diawasi

oleh Tuhan Yang Maha Melihat. Mereka lupa bahwa hoaks merupakan awal dari permusuhan yang dilarang oleh Tuhan.

Ironisnya, dalam narasi hoaks, seringkali Tuhan dijadikan pembenar. Tuhan terseret dalam keranjang sampah dan "pencuci" dosa para pendosa.

Mencerahkan dan Meneguhkan

Oleh karena itu, beragama perlu mencerahkan dan meneguhkan akal sehat dan nurani yang waras. Agama perlu menjadi *ageman* (sandangan) umat dalam menegakkan nalar keberagamaan inklusif dan kemanusiaan. Keberagamaan inklusif memungkin semua umat dari berbagai latar belakang dan pemahaman keagamaan untuk bersatu, bertindak, dan bergandengan tangan dan hati untuk memajukan bangsa dan negara.

Umat perlu mempunyai kesadaran bahwa saat bangsa dan negara ini rusak, maka seluruh penghuninya pun hancur. Umat perlu menjadi aktor yang mau ambil bagian dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Sudah bukan saatnya umat bergolak dan saling sikut dalam meraih kekuasaan dengan tameng agama. Sudah bukan zamannya umat saling klaim sebagai penghuni surga, namun tidak pernah berbuat kebajikan (*islah*). Sudah bukan masanya saat umat bertindak ceroboh dan menjadikan teks suci sebagai pembenar atas tindakan destruktif.

Pada akhirnya, tema Tanwir Muhammadiyah tahun ini seakan mengajak umat untuk menjadikan agama sebagai suluh kehidupan. Muhammadiyah mengajak seluruh bangsa Indone-

sia untuk bersikap dan bertindak atas nama kemanusiaan yang dirahmati. Muhammadiyah sebagai bagian bangsa Indonesia merasa terpanggil untuk menyelamatkan masa depan bangsa dan negara dari para pembegal agama. *Wallahu a'lam*. (*Sumber*: https://beritagar.id, Jumat, 15 Februari 2019)

BERAGAMA DENGAN BELAS KASIH

Azaki Khoirudin

"BERAGAMA yang mencerahkan" menjadi tema yang diangkat oleh Muhammadiyah dalam sidang Tanwir yang diadakan di Bengkulu, 15-17 Februari 2019. Selain forum Muktamar, Tanwir merupakan sebuah istilah khas permusyawaratan Muhammadiyah di tingkat nasional. Tanwir berasal dari *bahasa* Arab: *nawwara—yunawwiru—tanwiran* yang bermakna penyinaran, penerangan atau pencerahan. Istilah-istilah pencerahan memang menjadi istilah yang khas dan menunjukkan identitas bagi gerakan sosial keagamaan yang memiliki Mars "Sang Surya" dan logo "matahari" ini sangat kuat dengan karakter "pencerahan".

Jelang memasuki abad kedua, Muhammadiyah telah mengukuhkan dirinya sebagai "gerakan pencerahan" (*al-harakah at-tanwiriyah*). Komitmen bergerak di bidang pendidikan yang mencerahkan, menjadi sarana penting untuk mengemban misi pencerahan bangsa. Di tengah berbagai kontestasi ideologi ke-

islaman yang lahir Pasca Reformasi, Muktamar Seabad (2010), Muhammadiyah menawarkan wacana alternatif yaitu "Islam Berkemajuan". Pertanyaannya di sini adalah bagaimana beragama yang mencerahkan itu?

Ambivalensi Beragama

Kecenderungan terakhir, tentang fenomena beragama dinyatakan oleh Abdul Mu'ti dalam pengajian bulanan PP Muhammadiyah Jumat, 9 Februari 2019 ada tiga model orang beragama hari ini. *Pertama,*fenomena spiritualisasi agama**,** orientasi beragama masih berdasarkan spirit pahala, sehingga bersifat serba ritual. *Kedua,* gejala komodifikasi agama, yaitu menjadikan komoditas bisnis. *Ketiga,* gejala politisasi agama, untuk tujuan politik elektoral jangka pendek.

Padahal, dalam pandangan resmi Muhammadiyah, pengertian agama dinyatakan bahwa: *"Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan berupa petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat" [HPT, 276]*.

Dalam definisi di atas, dijelaskan bahwa tujuan orang beragama adalah "supaya mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat". Tetapi nyatanya mengapa orang beragama tetapi tidak atau kurang begitu bahagia? Kalau membaca ulang pesan dan pelajaran KH. Ahmad Dahlan, maka kita akan menemukan kata-kata yang sangat relevan dengan tema "beragama yang mencerahkan", yaitu: *"wa nahju sabili wadih liman ihtada wa lakin al-ahwa' 'amat fa a'mat"* (dan agamaku terang ben-

derang bagi orang yang mendapat petunjuk, tetapi hawa nafsu [menuruti kesenangan] merajalela di mana-mana, kemudian menyebabkan akal manusia menjadi buta)" (KRH Hadjid, 25).

Kiai Dahlan juga menyatakan bahwa yang tidak mencerahkan bukan agamanya, melainkan manusianya: *"Mula-mula agama Islam itu cemerlang, kemudian kelihatan makin suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu adalah manusianya, bukan agamanya" (KRH Hadjid, 25).*

Mengapa paradoks dan ambivalensi orang beragama yang seharusnya bahagia dan hati pikirannya tercerahkan, malah justru sebaliknya?

Di sinilah kita nampaknya perlu kembali mengulik ajaran dasar Islam, dikenal 3 kata kunci penting dalam fundasi keberagamaan Islam yaitu, Iman, Islam dan Ihsan. *Ihsan* didefinisikan "*an ta'buda al-allah ka annaka tarahu, wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka"* (Hendaklah kamu menyembah Tuhan seolah-olah kamu melihat-Nya, dan seandainya kamu tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihat kamu). Di sini nampak secara individu, manusia muslim yang beriman selalu dilihat dan diawasi oleh Tuhan. Seolah-olah secara individu, memang dekat sekali dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dalam kehidupan sosial? Apakah kehidupan sosial masih ada kaitannya dengan Tuhan?

Rupanya peran Tuhan yang secara teori melekat dengan individu, tetapi dalam kehidupan "kelompok" seolah-olah pengawasan Tuhan hilang. Nilai-nilai keadaban yang di sinari ajaran Islam yang seharusnya dijunjung tinggi, malah tak jarang berubah menjadi sifat-sifat yang kasar dan keras. Seakan Tuhan dijadikan

dalih oleh kelompok tertentu untuk meraih dan melanggengkan kepentingan kelompok dengan mengatasnamakan agama. Di sini letak ambivalensi yang tajam. Ternyata kesalehan individu belum berkorelasi positif dengan kesalehan sosial.

Mengapa keyakinan adanya pengawasan Tuhan secara individu begitu mudah dilupakan tatkala memasuki kepentingan organisasi, atau partai politik? Di sinilah barangkali Tuhan hanya imani secara subjektif oleh individu/kelompok, tetapi Tuhan kurang berdampak dalam kehidupan sosial yang objektif. Nyatanya ketika umat Islam berkelompok, malah terjebak pada ikatan primordialisme dan sektarianisme madzhab. Perbedaan kepentingan malah mudah menyulut sikap emosional dan kekerasan akibat saling benci satu-sama lain.

Tiga Corak Beragama: Manakah yang Mencerahkan?

Dalam studi Islam, setidaknya tiga model akal yang digunakan dalam memahami agama, sehingga melahirkan model keberagamaan yang berbeda. *Pertama,* keberagamaan *Imani* adalah model beragama yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri, tidak peduli terhadap orang atau kelompok lain. Beragama model ini umumnya bercorak *fiqhiyyah* dan kurang tenggang rasa dengan kelompok lain yang berbeda paham, bahkan agama. Terlalu kuat untuk lingkungan intern sendiri, tetapi lemah dalam memahami keberadaan orang atau kelompok lain. Corak beragama *ini* lahir dari akal atau corak berpikir keagamaan yang berlandaskan asumsi politik-ketuhanan *(al-'aql al-lahuty al-siyasy).*

Kedua, keberagamaan *Ilmiah*, yang mempunyai mentalitas dan cara berpikir yang bercorak keilmuan (*scientific mentality*) melalui proses pencarian kebenaran berdaasrkan metode keilmuan. Keberagamaan ini dibangun atas dasar penggunaan akal yang bercorak obyektif-ilmiah (*al-aql al-tarikhy al-ilmy*). Corak beragama ini melahirkan pemahaman yang luas (saling mengenal dan memahami), bahwa tidak ada agama yang sama. Semua agama adalah unik dan berbeda, sehingga beragama tidak mudah terjebak dan terbelenggu dalam egoisme sektarian dan primordialisme kelompok keagamaan yang akut.

Ketiga, keberagamaan welas asih. Perpaduan keberagamaan yang bercorak subjektif (*imaniyyah*) dan objektif (*ilmiyyah*) melahirkan corak keberagamaan ketiga, yaitu keberagamaan welas asih. Inilah spiritualitas yang *rahmatan lil alamin*, yang melahirkan etika universal dan multikultural. Tanpa mengurangi *arkanul Iman* maupun *arkanul Islam* sedikit pun, keberagamaan welas asih masih mempertahankan keimanan, eksistensi dan keberadaan masing-masing, tanpa mengganggu-gugat keberadaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang lain.

Yang dipentingkan dalam keberagamaan welas asih adalah spiritualitas tata nilai yang dapat mendukung kehidupan bersama yang amat plural dalam era globalisasi kosmopolitan. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam model beragama welas asih ini, antara: kasih sayang, kebaikan, ketulusan, pengabdian, tolong-menolong, kedamaian, kepedulian, orientasi hidup yang nirpamrih (altruistik), menghindari sikap serba ingin menang sendiri, serta menaklukkan kelompok lain yang berbeda. Inilah sepe-

rangkat tata nilai yang diperlukan oleh akal pikiran baru yang dilandasi etika cinta kasih *(al-aql al-jadid al-istitla'i) atau* akal yang tercerahkan (*al-aql at-tanwiry)*.

Beragama welas asih inilah model keberagamaan KH. Ahmad Dahlan. Beragama yang dilandasi "hati suci" (dan pikiran sehat). Akal dan hati suci sebagai inti kesalehan syariah. Hati suci dan akal sehat bagi Kiai Dahlan bukan hanya pangkal memahami Islam, melainkan juga akar ibadah atau dasar hidup sosial dan agama. (KRH Hajid, 25). Model keberagamaan yang dilandasi etika welas asih sebagai dasar akal sehat (kritis-terbuka) untuk memahami ajaran Islam, sehingga melahirkan pemahaman agama yang fungsional mencerahkan dan menjernihkan hati, nalar maupun kehidupan masyarakat.

Kiai Dahlan bersama Muhammadiyah mampu menyerap puncak-puncak peradaban tanpa memandang agama, sehingga melahirkan keberagamaan *rahmatan lil alamin* di bidang amal sosial kemanusiaan mulai dari pendidikan, kesehatan, filantropi, pemberdayaan masyarakat, kebencanaan dll.

Berdasarkan ini, kita dapat mengambil *ibrah* mengapa orang beragama tidak mencerahkan. Barangkali selama ini Agama terlalu dipahami sebagai institusi atau sebatas sebagai identitas. Keberagamaan belum menyentuh pada *intuisi* atau hati nurani. Maka dari itu hati suci atau hati nurani perlu kita hidupkan kembali supaya menjadi suluh keberagamaan, sehingga melahirkan keberagamaan Islam yang mencerahkan, yang *rahmatan lil alamin,*yang tidak egosentrik, tetapi beragama yang altruistik dan penuh welas asih. (*Sumber*: IBTimes.ID, 24 Februari, 2019)

BERAGAMA DENGAN AKAL SEHAT

Muhbib Abdul Wahab

"BERAGAMA yang mencerahkan" merupakan tema menarik Sidang Tanwir Muhammadiyah yang telah dihelat di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019. Di antara hasil sidang tersebut Risalah Bengkulu, pokok-pokok pikiran Muhammadiyah tentang kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dalam perspektif Muhammadiyah. Sesuai namanya, tanwir (mencerahkan) dan matahari sebagai lambangnya, Muhammadiyah berdiri dan berkembang pesat di bumi Nusantara sebagai gerakan dakwah Islam yang mencerahkan.

Dengan kata lain, "fitrah dan khittah" Muhammadiyah adalah gerakan pencerahan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan yang mencerahkan umat dan bangsa. Ialah bagaimana Muhammadiyah memahami dan mentransformasi ajaran agama untuk memandu kehidupan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, sehingga agama bukan sekadar wacana yang memenuhi ruang kognisi dan nalar keagamaan semata,

tetapi juga spirit agama juga harus menjiwai kepribadian dan menjadi praksis amalan yang bermuara kepada kemajuan peradaban Islam dan Indonesia di masa depan.

Biola Sang Pencerah

Alkisah, ada lima remaja (santri) Kampung Kauman, Yogyakarta, mendadak merasa bimbang ketika mendengar alunan musik biola yang bersumber dari kediaman KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mereka merasa aneh, alat musik biola itu biasanya dimainkan oleh orang Belanda, tetapi kali ini di mainkan seorang kiai, tokoh agama.

Dua remaja tadi memilih pulang dan tiga lainnya berusaha mendatangi kiai dengan menyimpan keraguan dan rasa ingin tahu. Ketika duduk di hadapan Kiai, seorang santri mempertanyakan materi pengajian. Akan tetapi, sang Kiai justru mempersilakan santri menentukan pilihan tema sendiri.

Para santri tadi semakin bingung karena posisi Kiai saat itu sangat dijunjung tinggi oleh penganut agama yang fanatik buta. Setelah hening sejenak, seorang santri mulai bertanya, "Agama itu apa, Kiai?" Alih-alih merespons, sang Kiai justru mengambil biola dan memainkannya.

Para santri remaja tampak sangat menikmati alunan musik dan irama biola yang menyentuh hati dan menenteramkan. Sang Kiai lalu bertanya, "Apa yang kalian rasakan setelah mendengar kan alunan suara biola tadi?" Santri pertama menjawab, "kein-

dahan." Santri kedua dan ketiga menyampaikan jawaban berbeda, namun serupa.

"Itulah agama. Orang beragama adalah orang yang merasakan keindahan, ketenteraman, kedamaian, dan ketercerahan," paparan sang Kiai. Karena, lanjut sang Kiai, hakikat agama itu seperti musik: mengayomi, menyelimuti, dan mencerahkan. Kiai lalu menyodorkan biola ke salah satu santri.

Oleh santri biola itu dicoba dimainkan. Namun, karena baru pertama kali dia memainkan biola itu sebisanya. Nada yang tidak serasi justru menghasilkan suara yang mengganggu. Sambil tersenyum, Kiai menjelaskan, "Itulah agama".

Kalau agama tidak dipelajari dengan benar, hal itu akan membuat resah lingkungan sosial dan jadi bahan tertawaan. (Film Sang Pencerah, 2010, dan Suara Muhammadiyah, Nomor 04/104, 16-28 Februari 2019).

Masyarakat Ilmu

Karena itu, menurut Abdul Munir Mulkhan, di abad keduanya, kini berusia 106 tahun, Muhammadiyah harus tampil sebagai gerakan pencerahan (*tanwir*). Muhammadiyah perlu membumikan praksis Islam berkemajuan untuk membebaskan (*tahrir*), memberdayakan, dan memajukan kehidupan umat dan bangsa.

Muhammadiyah harus mampu merespons konkret dan kontekstual terhadap berbagai masalah kemanusiaan seperti kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, ketertinggalan, dan per-

soalan keumatan dan kebangsaan lain, baik struktural maupun kultural, baik keduniaan maupun keakhiratan.

Dalam Muktamarnya Ke- 47 Makassar (2015), Muhammadiyah telah merekomendasikan pentingnya membangun masyarakat ilmu, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Untuk mewujudkan masyarakat ilmu, Muhammadiyah mengajak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, untuk menjadi *center of excellence* (pusat inovasi unggulan) berbasis *sustainability* dan *center of technopreneurship* dalam bentuk universitas riset.

Masyarakat ilmu sejatinya merupakan masyarakat pembaca dan pembelajar yang digerakkan oleh spirit iqra' sepanjang hayat dan berorientasi kepada pemajuan kualitas hidup dan kehidupan. Masyarakat ilmu yang dibangun melalui sistem pendidikan yang mencerahkan diharapkan dapat membuahkan kehidupan kebangsaan berkemajuan, berakhlak mulia, menghadirkan kedamaian, keadaban, kesantunan, kesejahteraan, keadilan sosial, apresiasi dan toleransi terhadap sesama, tanpa dikungkung oleh tradisi dan fanatisme buta yang justru tidak mencerahkan.

Melalui pendidikan yang mencerdaskan dan kehidupan beragama yang mencerahkan, masyarakat ilmu diharapkan dapat memiliki kesadaran intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi, sehingga selalu menjaga keutuhan dan integrasi bangsa dengan berkomitmen menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keindonesiaan yang luhur. Jadi, beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Muhammadiyah harus dengan menggunakan akal sehat, agar menghasilkan pembaruan (taj-

did), inovasi, kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan. Beragama dengan akal sehat menghendaki pemikiran rasional dengan berpikir cerdas dan waras, sehingga pesan-pesan moral ajaran agama efektif menyinari dan memandu jalan kehidupan yang baik, benar, dan bermaslahat.

Beragama dengan akal sehat penting dibarengi dengan pengem bangan budaya membaca, meneliti, menulis, berkarya, dan memutakhirkan ilmu berbasis riset. Etos intelektualisme dalam beragama merupakan sebuah keniscayaan agar praksis keagamaan itu membuahkan keadaban dan peradaban, bukan kejumudan, kemunduran, dan ketertinggalan. Beragama dengan akal sehat meniscayakan cinta kebenaran, kesalehan, dan kemaslahatan. Praksis keberagamaan dengan akal sehat adalah gerakan dan amalan nyata (dalam Muhammadiyah disebut amal usaha) yang memberi nilai kebajikan dan kemanfaatan bagi semua.

Dengan 174 PTM (perguruan tinggi Muhammadiyah), ratusan rumah sakit dan panti asuhan, puluhan ribu sekolah/madrasah, dan lebih dari 230 pesantren berkemajuan, Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai gerakan pencerahan dalam beragama dengan akal sehat: menggugah kesadaran, membebaskan, menggerakkan, dan memajukan kualitas hidup umat dan bangsa.

Masyarakat ilmu yang berkeadaban tidak mungkin terwujud tanpa keberagamaan dengan akal sehat. Keberagamaan dengan akal sehat menghendaki proses pendidikan holistis integratif yang bervisi pemajuan peradaban umat dan bangsa. Maraknya korupsi, kegaduhan sosial politik, narkoba, miras, pembalakan

liar, dan sebagainya merupakan cerminan keberagamaan tanpa akal sehat.

Orang yang beragama dengan akal sehat pasti tidak akan pernah mendustakan ajaran agamanya. Koruptor yang mengaku beragama sesungguhnya telah mengkhianati Tuhannya. Shalat atau ibadah ritual yang dilakukannya gagal membuahkan amal saleh dan kemaslahatan. Karena itu, teologi dan tafsir surat al-Ma'un yang pernah diajarkan dan diaktualisasikan KH Ahmad Dahlan tetap relevan sebagai spirit gerakan pencerahan melalui keberagamaan dengan akal sehat. Intinya, pendustaan agama itu bisa terjadi jika kognisi dan nalar keagamaannya tidak sehat: ibadah ritual dan personalnya tidak membuahkan kesalehan dan kemanfaatan bagi umat dan bangsa.

Jadi, beragama dengan akal sehat menuntut pembuktian nyata (*syahadah fi'liyyah waqi'iyyah*) dengan menjadi warga bangsa yang saleh (bermultikesalehan) dan muslih (berjiwa membangun dan mereformasi) kehidupan umat dan bangsa. Warga yang saleh pasti mencintai dan menginginkan bangsanya maju, berperadaban dan berkeadaban. Warga yang muslih pasti tidak akan mengkhianati dan merusak masa depan bangsa. Itulah beragama yang mencerdaskan dan mencerahkan. (*Sumber*: http://koran-sindo.com | 27 Februari 2019)

REINVENSI KEBERAGAMAAN KITA

Ari Susanto

TANWIR Muhammadiyah di Bengkulu (15/2) bertemakan 'beragama yang mencerahkan', tema ini merupakan usaha menemukan kembali konsep-konsep beragama (reinvensi) dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan global yang mencerahkan peradaban. Belakangan ini, perilaku keberagamaan bangsa Indonesia menunjukkan gejala yang tidak menggembirakan. Setidaknya beberapa hasil penelitian terkait keberagamaan mendukung hal tersebut. Pertama, tingginya tingkat intoleransi, radikalisme dan kekerasan. Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM, 2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan persentase 57% menunjukkan gejala persepsi intoleran, bahkan 37,7% bersedia untuk melakukan tindakan intoleran. Penelitian ini juga menunjukkan angka 46,09% responden memiliki persepsi radikal. Gejala pemahaman intoleran dan radikal yang cukup tinggi merupakan ancaman yang serius terhadap keberagaman bangsa Indonesia.

Kedua, menguatnya politik identitas keagamaan. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK, 2018) menemukan semakin menguatnya politik identitas di Indonesia berbasis agama. Penelitian kualitatif ini digelar pada sembilan provinsi di Indonesia. Penelitian ini mencatat begitu banyak isu--isu keagamaan dalam setiap kontestasi politik di daerah-daerah. Politik identitas dengan fanatisme buta tentu akan membahayakan, dapat menimbulkan pertikaian yang cukup serius diantara anak bangsa.

Ketiga, surplus narasi negatif, *fake news*, dan hoaks di media sosial. Hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menunjukkan bahwa 92,40% responden menerima informasi palsu (hoaks) melalui media sosial. Produksi hoaks terkait dengan prefensi sosial poitik menjadi isu utama, survei menunjukkan angka 91.8%. Agenda Pemilihan kepala daerah menjadi momentum terbesar dalam memproduksi isu hoaks. Menjelang pemilihan umum serentak tahun ini, di media sosial bertebaran beragam jenis isu hoaks, *fake news* dan konten-konten negatif. Alih-alih memproduksi guna melemahkan lawan politik, malah membuat politik kotor dan tidak sehat.

Bagi bangsa Indonesia, penghayatan agama adalah hal yang fundamental. Penghayatan itu termanifestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dengan hadirnya ketiga gejala diatas dapat menjadi pertanda melemahnya sikap keberagamaan kita. Agama yang hendaknya menjadi jalan penuntun bagi pemeluknya, kini umat tak berdaya menghadapi realitas kehidup-

an yang begitu keras. Beragama tidak lagi menumbuhkan daya dorong untuk maju, malah sebaliknya membuat manusia lepas kendali. Saat demikianlah beragama terasa tidak mencerahkan, memajukan dan menggembirakan.

Reinvensi

Muhammadiyah sejak didirikan (1912) memiliki karakter utama apa yang disebut oleh para peneliti sebagai gerakan pembaharuan (tajdid). Tajdid yang ditafsirkan dalam konteks keindonesiaan itu telah membuahkan ratusan ribu Amal Usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Kebekuan beragama mengalami transformasi, dari sekadar penghayatan individu menjelma dalam konsep penghayatan sosial. Melalui tafsir Al-Ma'un KHA Dahlan menembus batas-batas zaman, beliau mampu menghadirkan agama sebagai doktrin utama yang menggembirakan dan memajukan bagi pemeluknya. Beragama menjadi aktif, menumbuhkan kesadaran dan tindakan positif dalam kehidupan. Inilah yang kemudian disebut dengan beragama yang mencerahkan.

Memasuki abad ke dua, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadikan organisasi pembawa misi pencerahan peradaban. Model gerakan pencerahan itu tertuang dalam dokumen resmi dengan judul Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua. Menurut dokumen itu, Gerakan pencerahan (tanwir) adalah praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan dan ketidakadilan hidup

umat manusia. Gerakan ini fokus pada agenda penyelesaian masalah kemanusiaan global, menjawab masalah kebangsaan dan keumatan, membangun relasi sosial yang berkeadilan.

Dalam konteks keindonesiaan dan kemanusiaan global. Watak pencerahan Muhammadiyah harus menginspirasi agama-agama dunia, ia mampu mengaktifkan karakter beragama yang mencerahkan, mampu membebaskan, memberdayakan dan memajukan kualitas hidup manusia, baik dalam berbangsa, bernegara serta hidup dalam masyarakat global. Untuk itu, ide Reinvensi keberagamaan kita menjadi keniscayaan.

Beragama seharusnya tidak terjebak dalam batas-batas perbedaan. Sebagaimana misalnya keterbelahan akan perbedaan pandangan dan pilihan politik, semakin menguatnya intoleransi atar umat beragama yang dapat memicu kekerasan. Kehidupan seolah hanya dibenturkan dengan perbedaan hitam dan putih. Beragama harus mampu mengaktifkan nilai-nilai utama dalam agama, sehingga mampu mengaktifkan umat menjadi daya pendorong berbuat kebajikan dan usaha sungguh-sungguh untuk mencegah kerusakan peradaban, kejumudan, kemunduran, dan ketidakadilan.

Dalam sejarah Islam misalnya, sosok Nabi Muhammad SAW adalah sang pencerah peradaban kemanusiaan. Nabi aktif dalam menggugat sistem perekonomian yang cenderung mendiskreditkan dan menutup akses serta mengorbankan rakyat jelata. Nabi juga aktif saat hijrah ke Madinah memprakarsai hidup berdampingan dalam bernegara dikenal dengan Piagam Madinah. Tentu setiap masa ada sosok pembaharu yang mencerahkan

sebagaimana KHA Dahlan, KH Hasyim Asyari, Soekarno, Moh. Hatta, Agus Salim, dan lain sebagainya. Mereka ada para sang pencerah beradaban awal abad 20 bagi bangsa Indonesia.

Bukankah watak beragama yang mencerahkan adalah ciri keberagamaan bangsa Indonesia. Bukti otentik itu berupa hasil konsensus umat beragama dalam kesepakatannya terkait rumusan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Walaupun bersitegang, akhirnya pendiri bangsa mampu bersepakat. Meminjam istilah Abdurahman Wahid (Gus Dur), diatas kepentingan politik yang terpenting adalah kemanusiaan. Dan menjunjung kemanusian itu hanya dengan kejernihan moral (hati nurani). Itulah modal dasar beragama yang mencerahkan. (*Sumber*: Kompas)

HATI KACA, HATI SALJU, HATI KARET

Pradana Boy ZTF

MUNGKIN PENGAMATAN saya salah. Belakangan ini kita menyaksikan pembelahan sikap masyarakat yang sangat tajam. Dalam berbagai hal. Identifikasi seseorang atau kelompok dengan kategori *in-group* dan *out-group* belakangan ini juga begitu menggejala. Akhir-akhir ini pendekatan hitam-putih dalam menilai posisi seseorang atau kelompok dalam berbagai isu, dengan mudah menjelma menjadi justifikasi religius. Maka, tulisan ini hanya akan berbagi keresahan tentang pergeseran mentalitas anak bangsa kita yang semakin hari, rupa-rupanya semakin rawan.

Hati Kaca

Merujuk pada judul tulisan ini, maka tak ada niat untuk menyamakan hati dengan benda. Ini hanya ibarat. Jika hati ibarat kaca, dapat dikatakan bahwa tindakan *walk out* dan boikot sama-sama

merupakan cermin dari hati yang rawan, *fragile*. Entah dari mana mulanya, demikian seringnya kita menyaksikan fenomena hati kaca ini merebak dalam kehidupan masyarakat. Ibarat kaca yang mudah retak dan bahkan pecah, demikian pula gambaran suasana mental sebagian masyarakat kita hari ini. Hati yang *fragile* telah menjadikan perbedaan, bahkan nuansa, menjadi alasan untuk melakukan identifikasi.

Dari identifikasi itu lalu berubah menjadi kualifikasi dan diskualifikasi. Akibatnya, ruang sosial dalam kehidupan masyarakat hanya diisi oleh dua warna: hitam dan putih. Secara mutlak, hanya warna itu yang muncul dalam pandangan hati kaca yang rawan retak. Karena itu, cara pandang seperti ini seolah tidak membuka kemungkinan adanya gradasi warna. Bahwa hitam sepenuhnya hitam dan putih sepenuhnya putih. Faktanya, di antara warna hitam dan putih itu terdapat warna abu-abu. Warna abu-abu pun tidak tunggal. Ada warna abu-abu yang cenderung kepada hitam, ada abu-abu yang cenderung ke putih, ada pula abu-abu yang merepresentasikan warna hitam dan putih secara merata.

Maknanya, dua warna yang bertentangan sebenarnya bisa melahirkan tiga variasi warna lain dari warna utama itu. Sesungguhnya demikianlah realitas sosial itu terjadi. Namun, polarisasi-polarisasi sikap dalam masyarakat yang cenderung tajam, benar-benar membingkai segala sesuatu dalam warna paradoks hitam dan putih saja. Jika direnungkan lebih mendalam, pada dasarnya tak ada yang benar-benar bertentangan secara mutlak. Pada satu titik dan posisi, seseorang atau sekelompok orang memang bisa benar-benar berbeda. Tetapi rupanya, dalam perbedaan itu ada

sisi-sisi yang mempertemukan. Namun, soal mengidentifikasi sisi-sisi kesamaan di tengah perbedaan yang telah mengalami gradasi ini bukan perkara mudah.

Hati kaca sulit melakukan variasi sikap. Karena ibarat kaca, pergeseran dan perbenturan sedikit saja, sangat mungkin menciptakan retak pada bidang kaca itu. Lalu, adakah yang mampu mengembalikan kaca yang telah retak ke kondisinya semula? Rasanya sangat sulit.

Dengan konteks yang sedikit berbeda, para sufi sering membuat umpama hati dengan kaca. Konteksnya adalah kebersihan dan kebeningan. Kaca yang bening akan memantulkan bayangan yang bening pula, sementara kaca yang berdebu akan memproduksi bayangan yang berdebu juga. Maka, para sufi mengingatkan agar kaca hati dijaga dari debu. Setiap butir debu yang menempel pada kaca hati harus buru-buru dibersihkan. Karena jika terlambat, debu yang mulanya sebutir akan berhimpun, lalu menggumpal dan menjelma sebagai tabir samar yang menutupi kejernihan kaca hati. Membersihkan kaca yang demikian, tak hanya sulit, tetapi beresiko menjadikan kaca retak, pecah dan lalu tak bisa wujud kembali sebagai kondisinya semula.

Mohon maaf, jika saya agak curiga, rupanya model hati kaca seperti inilah yang tengah menjadi gejala umum di kalangan sebagian besar anak bangsa kita. Mulanya kaca itu dihinggapi setitik debu prasangka dan curiga. Sayangnya, tak segera dibersihkan karena baru sebutir. Tetapi dalam alam keliaran informasi seperti sekarang ini, butiran debu prasangka dan fitnah itu ribuan jumlahnya, dan masing-masing berlomba menempel pada bi-

dang kaca hati yang semula bersih. Akhirnya, kaca menjadi kotor dengan debu tebal yang hanya menghasilkan bayangkan yang kotor pula tadi itu. Ya. Begitulah hikayat tentang hati kaca.

Hati Salju

Tak mungkin kita tak mendengar cerita tentang putri baik hati dengan segala kelembutannya, yang lalu dijuluki berhati salju. Salju tak hanya putih, tapi juga lembut dan sejuk. Agaknya kesempurnaan dalam paduan warna putih, kelembutan dan rasa sejuk ini menjadi ibarat bagi hati yang sempurna. Berbeda dengan kaca yang tak bisa dibentuk, salju yang putih dan sejuk ini bisa dibentuk sebagai rupa-rupa benda, meskipun tak benar-benar lentur. Begitu pulalah hati yang berwatak salju. Ia tak akan dengan mutlak bersikukuh pada satu keyakinan yang salah, sehingga jika suatu saat keyakinan yang salah itu harus mengalami modifikasi, hati salju tak akan sulit menerimanya.

Hati salju pula bermakna hati yang mudah memaafkan. Para sufi menyebut hati yang mudah memaafkan itu sebagai *bahrul qalbi,* hati yang seluas samudra. Samudera yang luas mampu menghayutkan macam-macam sampah yang sengaja dibuang ke laut. Demikian pula salju, salju pasti punya kekuatan untuk menyerap debu. Sehingga jika ada debu yang menempel ke salju, pastilah debu itu akan lenyap. Sama halnya, apa yang dipancarkan dari hati salju adalah rasa sejuk. Maknanya, hati yang berwatak salju tak akan mudah terbawa dalam arus panas situasi.

Hati Karet

Lalu saya ingin mengajukan ibarat hati yang ketiga, yakni hati karet. Umumnya, karet identik dengan kelenturan. Maka inilah yang saya maksudkan dengan hati karet. Hati yang lentur manakala mengalami perbenturan dengan ragam kontradiksi dan perbedaan. Maka, amatilah setiap benda yang terbuat dari karet. Tak mudah pecah, meskipun jauh dari ketinggian. Tak rawan benturan, karena sifat dasarnya yang elastis.

Bahkan ketika benda yang terbuat dari karet terinjak sehingga bentuk awalnya berubah, dengan sedikit sentuhan, bentuk awal tadi bisa dikembalikan. Alangkahnya eloknya hati yang demikian. Namun karet tak melulu berwarna putih sebagaimana salju. Karet tak pula atau bening sebagaimana kaca. Maka tak mampu memantulkan bayangan. Tetapi dalam hal kelenturan, hati karet adalah yang terbaik. Bayangkanlah jika masyarakat kita mengadopsi filosofi hati karet ini, rasa-rasanya kerawanan konflik sosial yang belakangan ini menggejala bisa sedikit terkurangi.

Akhirul kalam, memang Idealnya nilai positif dari tiga kategori hati di atas digabungkan. Sebening kaca, seputih dan sesejuk salju, elastis dan fleksibel ibarat karet. Namun, rasa-rasanya, kita tak harus memiliki hati ideal itu untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman di dunia. Cukuplah berhati karet yang elastis, fleksibel, tidak *fragile* untuk menjadi bekal harmoni. Meskipun tak sesejuk dan seputih salju, atau sebening kaca, hati yang elastis akan menjadikan manusia mudah menerima perbedaan dan lapang dalam memahami kesalahan orang lain dan lentur dalam memberi maaf. Mungkinkah kita hadirkan?
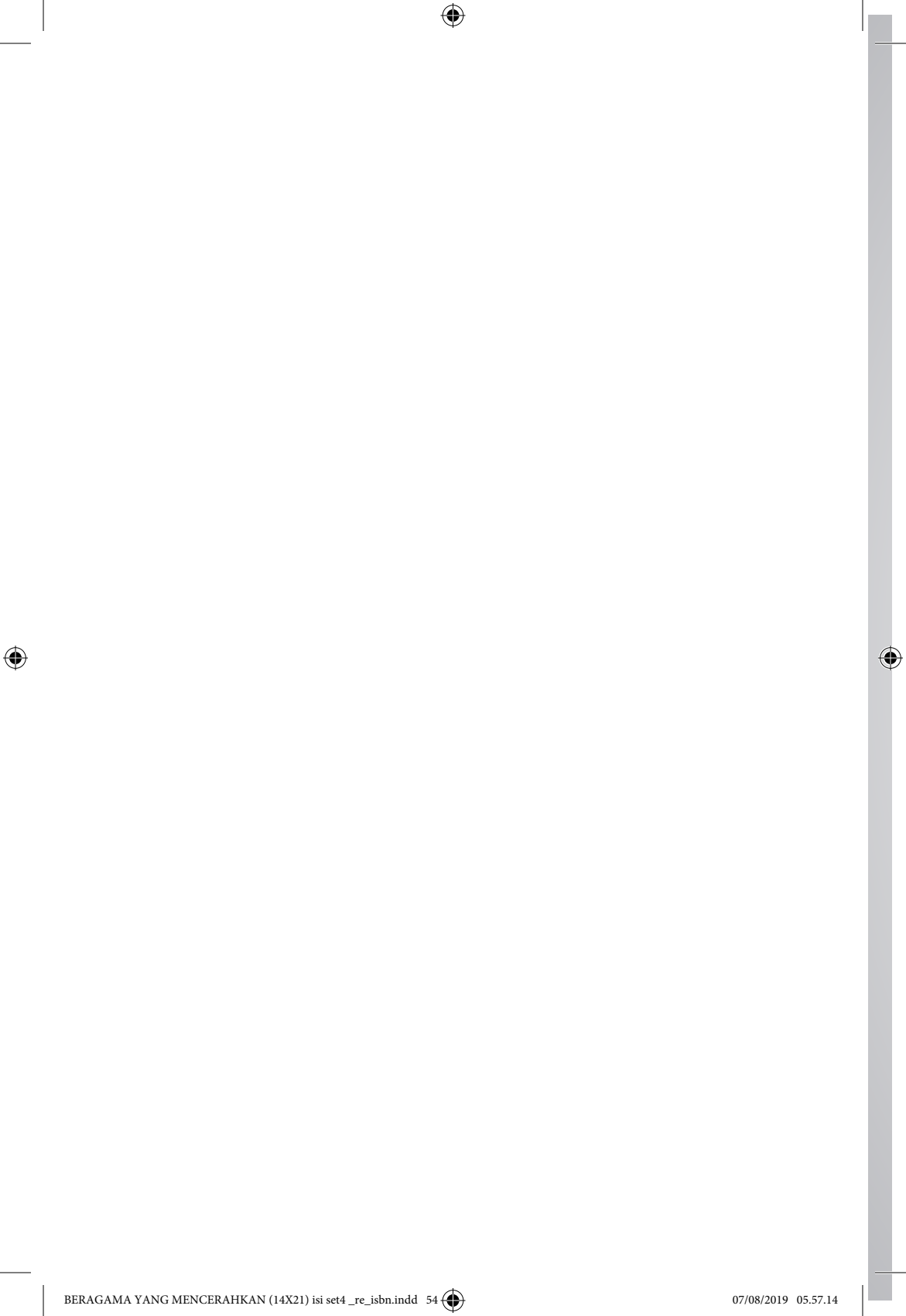
2

Risalah Pencerahan Nalar

AKAL BUDI KH. AHMAD DAHLAN

Azaki Khoirudin

MENJELANG Pilpres 2019 tema "akal sehat" sering menjadi diskusi hangat di berbagai media sosial. Istilah merawat nalar memang menjadi bagian penting dari tujuan syariat Islam, yakni menjaga dan mengembangkan kemampuan intelektual (*hifz aql*). Adalah Rocky Gerung, seorang ahli filsafat yang sedang naik daun karena dikenal dengan nalar kritisnya menyatakan "Merawat akal sehat (otak sehat) dan kesehatan jasmani adalah tugas mulia yang diwariskan KH. Ahmad Dahlan" (2019). Penyataannya bagaimana konsep merawat akal sehat menurut Kiai Dahlan?

Rasionalitas Kiai Dahlan

Bagi Kiai Dahlan, pendidikan tertinggi ialah pendidikan bagi akal dengan materi utama ialah filsafat, khususnya logika dengan

tujuan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia, yang untuk mencapainya semua manusia harus saling bekerja sama. Dalam naskah pidato "Tali Pengikat Hidup Manusia" Kiai Dahlan menyatakan:

> "Sehabis-habisnya pendidikan akal adalah dengan Ilmu Mantiq (pembicaraan yang cocok dengan kenyataan), semua ilmu pembicaraan harus dengan belajar, sebab tidak ada manusia yang mengetahui berbagai nama dan bahasa, tanpa ada yang mengajarnya. ...manusia tidak berdaya mengetahui asal pengetahuan, kecuali yang mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Bijaksana.

Hal ini tercermin dalam karakteristik yang menonjol dari metodologi pemahaman keagamaan Kiai Dahlan ialah "mempertautkan antara teks dan realitas." Dia tidak memahami Surat Al-Ma'un secara harfiah atau tekstual semata, tetapi sudut telaahnya lebih diarahkan pada persoalan "bagaimana sebenarnya historisitas pemahaman ayat tersebut oleh umat Islam yang hidup pada saat itu pada dataran realitas sejarah yang konkret dalam kehidupan sehari-hari."

Dalam tesis Hamsah F yang berjudul "Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923". Ada tiga ciri penting Islam berkemajuan Muhammadiyah, yaitu; rasionalisme, pragmatisme, dan *vernakularisasi*. Pilar rasionalisme ditandai oleh semangat yang terbuka, kritis, dan dialektis. Muhammadiyah menerima satu pandangan keagamaan jika telah tercukupi dua syarat. *Pertama*, mendengar dan menimbang berbagai pendapat. *Kedua*, sesuai akal dan hati suci.

Hamsah berkesimpulan Muhammadiyah kurun 1912-1923 menunjukkan corak gerakan sangat afirmatif terhadap rasionalisme sebagaimana Abduh yang dekat pada rasionalisme Muktazilah, dalam tesis ini ditemukan bahwa Muhammadiyah fase formatif sangat kuat pemihakannya pada pemulihan fungsi-fungsi akal. Agama nalar menunjukkan semangat rasionalisme Muhammadiyah.

Menurut Abdul Munir Mulkhan (2015), Kiai Dahlan telah berhasil mengganti jimat, dukun, dan hal-hal yang keramat (mistis-irrasional) dengan ilmu pengetahuan sebagai basis gerakan pencerahan umat yang memihak kaum lemah. Hal ini sendana dengan apa yang dikemukakan oleh Dawam Rahadjo:

"Sadar terhadap lingkungannya, yaitu masyarakat dan golongan menengah, KHA Dahlan ingin menyajikan Islam sebagai ajaran agama yang mudah dipahami dan mudah dijalankan. Atas dasar pandangannya itu, maka dia sebenarnya melakukan semacam "rasionalisasi", dengan menyingkirkan paham-paham yang dianggapnya bid'ah dan khurrafat". (Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia,* 226).

Di masa lalu, sebelum gerakan pembaruan dilakukan Kiai Dahlan, ajaran Islam itu misterius, penuh mistik, dan tahayul, hanya terkait persoalan sesudah mati, sebaliknya tidak terkait dengan kehidupan riil dalam masyarakat. Dunia sosial pemeluk Islam dipenuhi selimut tebal jimat, perdukunan, benda dan orang keramat, serta kisah-kisah membingungkan karena tidak rasional dan bertentangan dengan akal sehat.

Hati Suci, Merawat Akal Sehat

Dalam pandangan Kiai Dahlan, penggunaan akal pikiran diarahkan untuk mencapai pengetahuan tertinggi, yakni pengetahuan tentang kesatuan hidup (*unity of life*). Pengetahuan tersebut dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan menggunakan akal yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, selain dengan sikap konsisten terhadap kebenaran akal (rasional) yang didasari oleh hati yang suci.

Merawat kemurnian akal dilakukan dengan memurnikan hati suci. Kesucian nalar dan hati melahirkan etika "welas asih", berupa kelembutan hati terhadap kaum *dhuafa* dan *mustadh`afin* dalam masyarakat. Pemahaman ini terbangun dari pemahaman KHA Dahlan tentang hakikat agama. Sebagaimana dicatat Hadjid, KHA Dahlan memahami agama sebagai kecenderungan spiritual dari manusia yang berorientasi kepada kesempurnaan dan kesucian, bersih dari orientasi yang bersifat materialistik. Beragama, dalam perspektif ini, merupakan proses "mendaki menuju langit kesempurnaan dan bersih suci dari pengaruh-pengaruh materi kebendaan" (Hadjid, *Pelajaran KHA Dahlan*, 111).

Dalam Hadjid, Kiai Dahlan sering melantunkan sya'ir berikut: *"wa nahju sabili wadih liman ihtada wa lakin al-ahwa' 'amat fa a'mat"* (dan agamaku terang benderang bagi orang yang mendapat petunjuk, tetapi hawa nafsu [menuruti kesenangan] merajalela di mana-mana, kemudian menyebabkan akal manusia menjadi buta). Sehingga Kiai Dahlan menyatakan: "Mula-mula agama Islam itu cemerlang, kemudian kelihatan makin suram.

Tetapi sesungguhnya yang suram itu adalah manusianya, bukan agamanya." (Hadjid, *Pelajaran KHA Dahlan,* 25).

Dari pesan ini nampaknya Kiai Dahlan ingin berpesan bahwa supaya akal manusia tidak buta, harus dibersihkan dan dimurnikan dari hawa nafsu. Di sini dapat dilihat kecenderungan sufistik dalam pemikiran Dahlan. Kesucian batin dan hati menjadi prasyarat penting bagi individu manusia untuk dapat menerima ajaran yang suci dari Tuhan dan Rasul-Nya (Alqur'an dan Assunnah).

Bagi Kiai Dahlan, amal lahir (syariah) adalah akibat daya ruh agama yang didasari hati dan pikiran suci, sementara organisasi adalah instrumen pengembangan kesalehan hati-suci itu. Hati suci (dan pikiran sehat) bukan hanya pangkal memahami Islam, melainkan juga akar ibadah atau dasar hidup sosial dan agama, sehingga terbebas dari jerat kebodohan dan ikatan tradisi.

Bagi Kiai Dahlan, kesalehan adalah pencarian kebenaran tanpa final, terbuka berdialog dengan semua pihak yang berbeda. Suatu pengambilan kesimpulan (keputusan) adalah benar jika: a) paling kecil pertentangannya, b) dilakukan dengan mendengar, membanding, dan menimbang segala pendapat, c) sesuai akal dan hati suci.

Bagi Kiai Dahlan, akal dan hati suci sebagai inti kesalehan syariah. Menurutnya, hati suci bukan hanya pangkal memahami Islam, tapi hati suci ialah akar ibadah, dasar hidup sosial dan keagamaan. Hati suci ini pula yang bagi Kiai akan membebaskan seseorang dari kebodohan. Karena itu, juga bebas dari ikatan tradisi. Proyek besar Dahlan bukan memberantas TBC, tetapi pengembangan kemandirian dengan memberantas kebodohan.

Untuk menjaga nalar kritis, sikap terbuka, titik pangkalnya pada hati suci yang bebas dari kepentingan dunia dan kekuasaan politik. Sehingga manusia bisa berlaku adil sejak dalam pikiran, berada dalam posisi tengahan, dan menjaga netralitas politik sebagaimana Muhammadiyah merupakan cara merawat kesehatan nalar. (*Sumber*: IBTimes.ID, 9J ANUARI 2019).

DISKURSUS AKAL SEHAT DI MUHAMMADIYAH

Hasnan Bachtiar

TIDAK mengagetkan jika "filsuf selebritis" Rocky Gerung kerap manggung di pelbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Sang filsuf ini memang tenar dan ketenarannya mampu menyihir siapa saja, yang barangkali sedang gandrung dengan diskursus "akal sehat". Dengan mengundangnya, harapannya mungkin akan *ketularan* berakal-sehat, atau sekurang-kurangnya dianggap demikian oleh khalayak ramai. Tulisan ini akan membahas, sampai kapan diskursus mengenai akal sehat ini akan terus ramai diapresiasi terutama di kalangan Muhammadiyah?

Tentu terdapat beberapa alasan mengapa pertanyaan ini diajukan, yakni: pertama, fenomena Rocky Gerung muncul ke permukaan di saat hajatan politik Indonesia 2019 akan digelar; kedua, Muhammadiyah yang secara organisatoris mengafirmasi strategi *high-politics*, namun organisasi ini terfragmentasi secara sosial dan politik, termasuk condong ke calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin ataukah Prabowo-Sandiaga Uno; ketiga, para

filsuf di kalangan Muhammadiyah sendiri jarang turun gunung, sehingga perlu *ngangsuh kaweruh* kepada manusia hebat semacam Rocky gerung.

Jawaban mengenai pertanyaan tersebut bisa saja sederhana. Walaupun penjelasannya jelas tidak sederhana. Jawaban yang pertama adalah, karena memang sejak zaman KH Ahmad Dahlan akal sehat (rasionalitas, bukan rasionalisme) itu sangatlah ditekankan, maka bisa jadi hal ini akan terus menjadi ciri khas ber-Muhammadiyah. Yang kedua, temporalitas diskursus akal sehat ini akan kadaluarsa seiring dengan selesainya momen politik elektoral Indonesia, dan masih memiliki kemungkinan untuk dibangkitkan kembali jika diperlukan pada momen berikutnya.

Bisa jadi kedua jawaban di atas benar. Itu semua tergantung kepada bagaimana kita meletakkan diskursus akal sehat itu sendiri. Sebenarnya, diskursus akal sehat bisa diletakkan secara lebih spesifik, yakni, akal sehat (rasionalitas) secara umum sebagaimana yang dibicarakan oleh KH Ahmad Dahlan—sebagaimana telah didiskusikan dengan cara yang menarik oleh Azaki Khoirudin dengan tajuk "Akal Sehat Kiai Dahlan" di Islamberkemajuan.id pada 31/01/2019—dan akal sehat di dalam Muhammadiyah yang sekadar dicatut oleh Rocky Gerung. Untuk yang terakhir disinggung, sebut saja akal sehat versi Rocky Gerung.

Pembagian diskursus tersebut memiliki implikasi yang serius bagi Muhammadiyah itu sendiri, khususnya mengenai tradisi intelektualisme kritis yang terbangun di dalamnya. Diskursus yang pertama berkaitan dengan semangat *tajdid* atau reformisme keagamaan, mendinamisasi idealitas jargon "Islam Berkemajuan",

ijtihad interdisipliner-kolektif, dan bahkan suatu transformasi falsafah penting dari *al-muḥāfaẓah 'ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aṣlaḥ menuju al-muḥāfaẓah 'ala al-qadīm al-aṣlaḥ wa al-ijād bi al-ajdād al-ṣāliḥah.*

Singkatnya, jika akal sehat seperti halnya yang diserukan oleh KH Ahmad Dahlan—yang kemudian dikembangkan secara brilian oleh para intelektual Muhammadiyah sejak pendiriannya hingga saat ini—tidak dipelihara dengan baik, maka jelas stagnasi akan menyerang tiba-tiba seperti penyakit serangan jantung atau mungkin stroke berat. Bahkan, bisa menyebabkan kematian akal sehat (anti intelektualisme).

Jika jenis diskursus akal sehat (yang pertama) ini dianggap penting, maka hal-hal yang bertentangan dengannya harus diselesaikan. Secara faktual, akhir-akhir ini kita menghadapi pelbagai fenomena *takfir* (pengafiran) di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri. Diskusi ilmiah yang ditujukan agar mampu membuka jalan dialog oleh karena perbedaan pemikiran Islam, malah dituduh bertentangan dengan akidah, sesat dan tidak sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Inilah yang dimaksud sebagai "gejala" munculnya stagnasi. Hal itu jika terus dibiarkan, akan mematikan diskursus akal sehat.

Diskursus akal sehat ini tidak hanya berlaku pada masalah pemikiran keagamaan, tetapi seluruh dimensi kehidupan, terutama politik. Sebagai contoh, maka dianggap sesuai dengan akal sehat, tatkala Muhammadiyah "menjaga jarak" agar tidak terlalu dekat dengan urusan politik praktis (*realpolitik*). Karena memang, resiko terlalu dekat dengan politik praktis adalah nilai-

-nilai keagamaan yang universal akan mudah tergerus oleh kepentingan politik kekuasaan. Di saat yang sama, Muhammadiyah juga tidak anti politik dan kemudian mengambil posisi di mana Muhammadiyah mengafirmasi pentingnya *high-politics* (politik yang mengedepankan keanggunan moral dan bervisi membangun peradaban kemanusiaan). Oleh karena itu, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan yang ingin menguasai negara atas nama Islam. Jadi, Islam bagi Muhammadiyah bukanlah instrumen politik kekuasaan, juga tidak memperalat sistem politik demi memenuhi hasrat ideologis tertentu yang menegaskan bahwa Islam dan politik (kekuasaan negara) adalah kesatuan yang utuh (*manunggaling*). Dalam bahasa yang lebih sosiologis, Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat sipil dan bukanlah partai politik.

Selama masih marak trend pengafiran, instrumentalisasi agama, ideologisasi (atau agamisasi) politik, dan segala jenis konservatisme-dogmatisme dalam pelbagai bidang kehidupan yang sangat anti-intelektualisme, maka selama itu pula diskursus akal sehat ini menjadi penting bagi Muhammadiyah. Terutama karena bagi Muhammadiyah, akal sehat harus diperjuangkan dan menjadi rahmat bagi semesta alam, khususnya bagi warga Muhammadiyah sendiri.

Sementara itu berkaitan dengan diskursus yang kedua, yakni akal sehat yang melekat pada citra selebritas Rocky Gerung, sangat terkait erat dengan suasana psikologis momen politik elektoral. Rocky Gerung sendiri memiliki posisi yang jelas da-

lam kontestasi *realpolitik*, yakni oposisi terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka (di lingkungan PTM) yang memanggungkan Rocky Gerung, adalah yang terindikasi pro-Prabowo-Sandi.

Subyektivitas politik berlaku di dalam kompleksitas diskursus akal sehat yang dibawa oleh Rocky Gerung. Walaupun Muhammadiyah secara resmi menyatakan tidak berpolitik praktis, nyatanya (para pimpinan selaku agensi sosial politik) PTM tertentu memilih langkah lain. Tentu dengan pelbagai justifikasi yang diajukan. Implikasinya adalah, mereka di lingkungan Muhammadiyah yang memihak kepada Jokowi-Ma'ruf Amin "barangkali" akan dianggap tidak memiliki akal sehat. Jadi sebenarnya diskursus akal sehat Rocky Gerung mau tidak mau akan berhadapan dengan pandangan dikotomistik dua kubu politik yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan 2019.

Perlu diketahui bahwa, para kader Muhammadiyah dalam persoalan *realpolitik* bukan terdistribusi ke pelbagai partai politik yang ada, sehingga siapa saja yang menang, akan tetap mendapatkan faedah dari pendistribusian tersebut. Akan tetapi, terfragmentasi berdasarkan kepentingan partai-partai politik. Bukanlah lagi menjadi rahasia jika dengan demikian, para kader Muhammadiyah malah saling bersaing satu sama lain, bahkan dalam kasus tertentu, terpecah-belah.

Akan tetapi, kita semua menyadari bahwa, fragmentasi politik itu tidak pernah abadi. Yang abadi di dalam konteks *realpolitik* adalah kepentingan itu sendiri. Saat ini menjadi lawan, bisa jadi nanti akan menjadi kawan dalam momen dan kesempatan politik tertentu. Demikian pula dengan temporalitas diskursus akal se-

hat yang ditawarkan Rocky Gerung (yang kebanyakan dielu-elukan sebagian warga Muhammadiyah pendukung Prabowo-Sandi), akan sekadar menjadi diskursus musiman.

Kembali kepada masalah pembagian antara diskurus akal sehat KH Ahmad Dahlan dan Rocky Gerung. Sebenarnya di antara keduanya juga masih memiliki pelbagai irisan. Jika yang pertama dan kedua mengedepankan pentingnya pembangunan intelektualisme dan nalar kritis, berarti temporalitas berlakunya diskursus akal sehat akan dengan sendirinya terkikis. Dengan kata lain, akan menjadi diskursus yang terus-menerus dibangun dan dibangkitkan. Namun, jika keduanya terbebani oleh kepentingan politik musiman, maka sebenarnya temporalitasnya tergantung kepada hal tersebut pula.

Hikmah yang dapat diambil dari adanya fenomena Rocky Gerung dan diskursus akal sehatnya adalah, alangkah bijaknya apabila kita mengedepankan hal-hal yang bersifat abadi ketimbang yang temporal (dalam konteks politik). Agama itu sejatinya mengajak kepada perdamaian, kedamaian dan jalan keselamatan yang abadi, bukan kesenangan yang sementara.

Politik kekuasaan itu akan menjadi sangat baik apabila memiliki cita-cita ideal pembangunan peradaban kemanusiaan yang mulia, yang diperjuangkan secara jujur dan sungguh-sungguh. Akan tetapi, jika politik kekuasaan hanya sekadar semata-mata untuk meraih kekuasaan, berkuasa dan mempertahankan kekuasaan, tentu sebenarnya kita merayakan hal yang serba semu.

TUGAS SEORANG INTELEKTUAL: MENJADI SULUH ATAU CANDU?

Andar Nubowo

SEPANJANG 2006-2008, saya bergabung dengan Centre d'Etudes Sociologiques et Politiques Raymond Aron (CESPRA) di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris Perancis. Di sana, saya berguru dengan pemikir- filosof dan sosiolog politik seperti Pierre Manent, Marcel Gauchet, Emmanuel Saada, dan Dominique Schnapper. Meski awalnya tertatih-tatih, saya menyenangi pemikiran-pemikiram mereka yang rumit tapi menyegarkan. Saya akan mengulas terlebih dahulu sebuah nama yang ditahbiskan menjadi nama pusat studi sosiologi dan politik prestisius ini.

Pusat Kajian ini mengambil nama seorang filosof politik Raymond Aron. Pemikirannya memantapkan ideologi politik liberal dan demokrasi dan sebaliknya mengkritik marxisme. Ia mengkritik para intelektual pada masanya, tahun 50-60an, pasca Perang

Dunia II, yang mendewakan Karl Marx dan menggandrungi ajarannya. Pada 1955, ia menulis sebuah buku berjudul "L'Opium des intellectuels" (*The Opium of Intelectuals*). Judul buku ini tak lain adalah satir kritis atas diktum Marx bahwa "agama adalah candu bagi rakyat".

Mengapa Opium?

Aron, anak seorang pengacara Yahudi yang pernah bergabung dalam Tentara Udara Perancis pada PD II, melihat sebaliknya bahwa Marxisme adalah opium yang meninabobokan kaum intelektual. Para intelektual di jamannya seperti Jean Paul Satre, kawan sekaligus musuh debat ideologis dan filsafatnya, dianggap terlalu sinis dan kritis terhadap bentuk-bentuk pemerintahan dan struktur sosial politik yang liberal dan demokratis.

Mereka itu terjebak pada miyopisme ideologis yang berakibat pada hilangnya objektivitas ilmiah, yakni mengkritik demokrasi liberal, yang bertumpu pada kebebasan individu, tetapi berdiam diri atau cenderung membela kejahatan dan kekacauan di dalam masyarakat yang dianggapnya sebagai ideologi "yang benar".

Intelektual semisal ini adalah, sambung ayah sosiolog perempuan Dominique Schnapper, cerdik cendekia yang memanipulasi kejujuran dan memakai baju zirah kemunafikan. Atas nama sebuah dogmatisme dan fanatisme ideologis, mereka menyembunyikan fakta dan bukti-bukti ilmiah —yang kerapkali menelanjangi dalil dan hujah mereka. Mereka tak ubahnya seorang

fanatikus agama atau sistem kepercayaan sekular yang meyakini kebenaran secara parsial dan membabi buta.

Karena itu, ia bersetuju dengan pemikir feminis dan politisi perempuan Perancis, Simone Weil, bahwa "Marxisme tidak diragukan lagi adalah sebuah agama, dalam pengertian yang paling sederhana. Ia telah digunakan sejak lama untuk mengelabuhi atau mencandui rakyat". Ia sadar betul, kritiknya tersebut banyak membuat kolega dan teman-temannya tersinggung atau bahkan marah padanya, seperti Sang Eksistensialis Paul Sartre. Tetapi, ia perlu menyuarakan itu tiada lelah dan henti, untuk menyelamatkan iklim intelektual yang ideoligis menjadi objektif serta mengamankan demokrasi dan kebebasan umum. Dalam kaitan ini, ia yang lama bersahabat dengan Sartre, ia juga yang kritis dan kadang satiris terhadap pandangan eksistensialisme sahabatnya yang kiri.

Aron mengidolakan demokrasi liberal seperti pandangan Alexis de Toqueville tentang demokrasi di Amerika Serikat. Pandangannya tentang totalitarianisme dipengaruhi oleh pemikir perempuan Hannah Arendt. Immanuel Kant dan Marx Weber banyak memengaruhi pandangannya tentang kewajiban moral dan politik seorang intelektual di dalam menjaga kebenaran ilmiah dan kebajikan moral sosialnya pada masyarakat. Selanjutnya, ia memberi pengaruh pada banyak pemikir Perancis di kemudian hari seperti guru-pemikir tersebut di atas. Pierre Bourdieu, dalam beberapa hal, juga banyak dipengaruhi oleh Aron.

Dogma dan Fanatisme

Ideologi dan keyakinan apapun—baik bersifat religius atau sekuler, berpotensi menjadi sebuah dogma tertutup yang melahirkan fanatisme buta. Dalam bahasa arkeologi pengetahuan, sebuah dogma/ajaran yang tidak lagi menerima kritik dan bacaan terbuka, maka ia telah menjadi sebuah "closed corpus/korpus tertutup" yang kemudian disakralkan dan dibela secara mati-matian oleh pengikut dan penganutnya.

Pengikut yang fanatik, akan selalu dan selamanya, bertindak sebagai pembela dan sekaligus pengadil buta terhadap siapapun yang melakukan kritik atas dogma tertutup tersebut. Dalam sejarah sosial, agama, dan politik, sikap *fou de Dieu*, fanatisme buta membela "Tuhan" misalnya dipertontonkan oleh Inkuisisi Katolik di Abad Pertengahan, Leninisme dan Maoisme di masa Revolusi,

Brigade Merah di Italia, Khimer Merah di Kamboja, serta Al-Aqaedah dan ISIS di masa belakangan ini. Meski sistem kepercayaan berbeda, tetapi fanatisme buta mereka identik dan bermuara pada titik sama: hilangnya objektivitas saintifik dan pemujaan pada darah dan kematian.

Di Indonesia, dogma dan fanatisme juga tak kalah menumpahkan persekusi dan kematian. Tahun-tahun pra dan pasca kemerdekaan, ketika para *founding fathers* kita tengah menggandrungi ideologi-ideologi sekuler Barat dan Timur Tengah seperti Marxisme, Liberalisme, dan Islamisme, dogma dan fanatisme juga mengecambah dan subur. Suluh dan cita-cita kemerdekaan yang menyatukan mereka, redup oleh teriakan-teriakan fanatikus. Ketiga dogma tertutup itu lalu melahirkan perseteruan tiada henti

dari masa ke masa, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Pada Orde Lama, ideologi kiri Marxisme dan Komunisme pernah mendapat tempat istimewa, sedang Islamisme dan liberalisme terpinggirkan. Kedua yang terakhir bersekutu menumbangkan yang pertama. Di masa Orde Baru yang panjang, liberalisme ala Soeharto tampil dominan, menguasai setiap sendi kehidupan, sedang Islamisme dan Marxisme Komunisme dipojok-benamkan melalui serangkaian dogmatisme-fanatis pembangunan nasional.

Saat ini, selama Orde Reformasi, saat ketika demokrasi prosedural ditegakkan, ketiga "isme" itu berkompetisi dalam platform sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang setara. Di saat kepemimpinan politik dan demokrasi substansial belum menjadi pilar kuat Indonesia, ketiga "isme" itu bertarung dan menggandakan pengikutnya masing-masing yang fanatik.

Dewasa ini, kita menyaksikan riuh rendah dan tingginya kontestasi "isme-isme" itu di panggung lokal maupun nasional: saling jegal untuk menancapkan kekuasaan libidinal dominatifnya. Islamisme di tengarai memperoleh panggung dan dukungan luas, ditandai oleh bangkitnya kesadaran simbolik dan substansial pada Islam.

Panggung Reformasi menjadi energi baru bangkitnya kaum muda dan kelas menengah Islam untuk tampil dominan dalam setiap lini kehidupan. Partai politik, kuasa ekonomi, dan panggung sosial dan kebudayaan mesti direbut dari dominasi kaum liberal-sekuler dan atheistik. Tujuan kelompok Islamis ini satu:

menyingkirkan liberalisme dan paham sekuler atheistik lainnya dari bumi Nusantara.

Dalam kadar militansi yang sama, kedua kelompok terakhir juga menggandakan dalih dan ujarannya untuk menangkal kelompok yang, oleh mereka disebut tengah, meletakkan asumsi wahyu di atas materialisme dan akal sehat. Melalui argumen yang kadang dipaksakan, mereka menaruh curiga pada Islamisme dan juga Islam sebagai biang dari kemunduran dan ekstrimisme radikal, tanpa menelisik lebih jauh sebab musabab yang melatarinya. Bagi mereka, Islam adalah musibah. Sama halnya kritik seorang Islamis yang melihat kubu liberal, sekular dan atheistik adalah sampah dan pemicu bencana.

Kritik ini–tentu saja, sah-sah saja dalam dialektika debat ilmiah yang berkeadaban. Hal ini bagian dari tanda-tanda sebuah peradaban adiluhung yang menempatkan kebebasan sipil (*civil liberties*) pada kursi semestinya. Tetapi, jika dilakukan dalam energi dan spirit kebencian, dialektika tersebut hanya akan mengganda-lipatkan jumlah fanatikus buta yang membela ajarannya tanpa akal sehat dan membabi-buta. Ruang dialog menjadi tandas, digantikan oleh syak wasangka dan curiga tak berketepian.

Suluh Pemandu

Di dalam era "Post Kebenaran" ini, dunia kekinian semakin kehilangan pesonanya—orang menjadi gila pada utopia, sesuatu yang abstrak dan tak terjangkau nalar dan ironisnya atas nama sebuah keyakinan yang dianggapnya benar. Jangkar-jangkar kebenaran ideologis dibangun tanpa dialog. Akibatnya, klaim

kebenaran sepihak menjadi tak terelakkan. Klaim dari pihak lain yang tak sesuai dicampakkan dalam tong kabar palsu alias hoaks. Kemajuan teknologi seperti internet dan sosial media, dalam rivalitas tajam ideologis ini, menjadi medium untuk saling menghoaks-kan lawan.

Situasi ini tidaklah baru atau unik. Ia seusia manusia itu sendiri. Bertikai dalam kedunguan merupakan ciri abadi manusia. Jika dulu, dalam setiap sengkarut sosial politik dan ekonomi sebuah peradaban selalu hadir seorang penengah, pengadil sekaligus pewarta harapan dan kebenaran ilahiah yang disebut Nabi dan filosof, sekarang ini kita butuh suluh yang memandu terang dari para cerdik pandai atau intelektual. Begitu pentingnya peran mereka dalam menjernihkan keruh-keruh pertikaian dogmatis dan fanatis itu. Begitu berharganya mereka untuk kokoh dan kukuh menggenggam fatsoen objektivitas di dalam dunia yang gelap dan tunggang langgang ini.

Akhirnya, kepada mereka para cerdik pandai tercerahkan, dunia ini akan dapat kembali menjadi tempat terhangat untuk memadu kebersamaan, solidaritas dalam primordial maupun universalnya. Sebagaimana seorang Nabi yang menyuluh umatnya di jalan terang, kita berharap mereka ini tak terjebak dalam angkara dogmatisme dan fanatisme agama dan politik. Mereka tetap berpegang pada diktat objektivitas ilmiah di atas kursi kehormatan intelektualitasnya—meski diiming-imingi kejayaan politik dan kekuasaan. Kita membutuhkan para intelektual yang membungkam diktum Julien Benda yang menuduh seorang intelektual yang memihak pada kuasa politik dan produksi eko-

nomi itu sebagai penghianat, seorang godot yang menghianati pengetahuan dan kewibaaannya.

UMAT ISLAM DAN PERTANYAAN TENTANG PENGETAHUAN

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

TAHUN 2019, dunia dihebohkan oleh penemuan 'lubang hitam' (black hole) oleh jaringan peneliti beberapa negara. Temuan ini adalah hasil dari penelitian lebih dari satu dekade (data pertama didapat konon tahun 2006), dan membuktikan teori relativitas umum Albert Einstein yang ia lahirkan tahun 1915—satu abad sebelumnya.

Tahun 2016, temuan lain juga mengguncang dunia. Jaringan peneliti LIGO mendeteksi gelombang gravitasi yang, lagi-lagi, juga merupakan prediksi Einstein. Memang Einstein tidak bekerja sendiri; ada banyak peneliti lain yang juga, secara teoretis, memperdebatkan dan memperbarui teorinya (Subrahmanyan Chandrasekhar, fisikawan India, adalah salah satunya). Tapi dengan basis teori relativitas umum dan khusus Einstein, peneliti mengembangkan metode pengamatan untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Pengamatan yang mahal, tapi berhasil: gelom-

bang gravitasi dideteksi tahun 2016, dan mereka diganjar hadiah Nobel tahun berikutnya.

Ada banyak penemuan di dunia yang semakin berubah ini. Tapi satu pertanyaan mungkin akan muncul: mengapa dalam satu abad terakhir, tidak banyak peneliti Muslim yang mendorong penemuan-penemuan ilmiah? Mengapa yang banyak muncul justru peneliti dan ilmuwan di Barat?

Jawabannya kompleks, dan pertanyaannya, sebetulnya, juga problematis. Setidaknya, ada tiga argumen yang muncul ketika kita ingin menjawab pertanyaan di atas.

Argumen pertama adalah argumen apologetis. Banyak yang akan menjawab bahwa Islam sudah menghasilkan penemu-penemu di masa lalu, di masa ketika Islam berada di masa kejayaan dan Barat berada dalam masa kegelapan. Beberapa orang mungkin akan berargumen bahwa generasi "Baitul Hikmah" dibangun di atas tradisi *"Islamic Worldview"* lengkap dengan Kosmologi Islam yang, konon, kabarnya, anti-Barat dan "orisinil dari tradisi Islam". Mungkin akan keluar beberapa nama terkenal: Ibn Sina, Al-Khwarizm, Ibn Rusyd, Al-Kindi, dll. Lengkap dengan kontribusi mereka dalam pengembangan keilmuan.

Argumen ini betul, dan memang Islam punya kontribusi besar dalam membangun fondasi keilmuan modern. Lihat, misalnya, karya bagus dari John M Hobson tentang akar-akar 'Timur' dalam peradaban Barat modern, yang menjelaskan bahwa tanpa proses penerjemahan kreatif terhadap naskah-naskah Islam, susah membayangkan peradaban Barat yang modern akan berdiri tegak. Namun, perlu dicatat bahwa generasi ilmuwan Muslim itu

juga penuh kontroversi ketika masih hidup. Ibn Khaldun menulis Muqaddimah setelah lelah menjadi politikus dan akhirnya menulis sejarah secara brilian. Ibn Sina dianggap sesat oleh kalangan sunni. Ibn Rusyd terlibat perdebatan dengan Al-Ghazali, yang mendorong pemikiran filosofisnya agak ke pinggir. Dan ada satu hal lain: bagaimana menjelaskan keterputusan generasi mereka dengan tradisi keilmuan umat Islam saat ini?

Argumen kedua adalah argumen modernis. Mungkin, seperti kata Muhammad Abduh, al-Islam al-mahjuubun bil Muslimiin. Umat Islam jangan-jangan terasing dengan tradisi progresif dan berkemajuan yang inheren dalam sejarah peradaban Islam, yang justru 'diambil' oleh orang-orang Eropa. Abduh terkenal dengan penilaiannya ketika di Paris: ia melihat justru nilai-nilai Islam 'ditemukan' di Eropa tetapi asing di negeri-negeri Muslim sendiri. Argumen modernis akan mendorong kita untuk melakukan refleksi-diri tentang mengapa Islam justru gagal mereproduksi nafas kemajuan dalam diri Islam itu sendiri, sehingga justru terasing dalam proses penemuan ilmiah yang dulu hidup dalam diri mereka. Ini yang disebut oleh Nidhal Guessoum: ada pertanyaan quantum yang perlu dipikirkan oleh umat Islam untuk merekonsiliasi tradisi Islam dan sains modern.

Argumen ini juga betul: mungkin ada masalah dalam diri umat Islam itu sendiri. Tapi kalau kita kritisi, apa benar umat Islam itu tertinggal, terpinggirkan, dan tak bisa berpikir? Jangan-jangan, ketertinggalan itu justru lahir, selain karena kejumudan yang dialami oleh umat Islam, justru disebabkan oleh sebab-sebab struktural yang mengisolasi umat Islam dari tradisi berpikir progresif

yang sudah ada sejak zaman dulu? Pertanyaan ini mengantarkan kita untuk tidak hanya melihat pada diri umat Islam, tetapi juga pada pertanyaan soal kolonialisme, pembangunan yang gagal, atau ketergantungan struktural pada teknologi di negara-negara maju dimana negara-negara Muslim adalah pengguna atau penyedia bahan mentah, dan bukan pengolah. Sehingga, ada persoalan struktural yang lebih kompleks yang mesti dijawab.

Lagipula, sebetulnya, banyak orang-orang yang bekerja secara teoretis maupun praktis, yang merupakan Muslim dan Muslimah. Dalam bidang Quantum Field Theory, ada nama besar Abdus Salam yang diganjar nobel fisika tahun 1979. Abdus Salam, ilmuwan Pakistan yang disegani dan banyak mendorong perkembangan Nuklir, diganjar Nobel karena temuannya tentang electroweak. Lalu ada, misalnya, Maryam Mirzakhani, ahli Matematika Muslimah yang diganjar penghargaan Medali karena kontribusinya dalam bidang Matematika.

Dalam studi Hubungan Internasional, yang saya tekuni sekarang, banyak ilmuwan dari negara-negara Muslim yang dihargai karena kontribusinya dalam perkembangan teori dan praktik Hubungan Internasional kontemporer: Aisha Ahmad, Mustapha Kemal Pasha, Farul Yalvac, Pinar Bilgin, Faiz Sheikh dan banyak peneliti muda lain. Meskipun, perlu diakui bahwa orang yang percaya dengan bumi datar juga tak kalah banyaknya.

Tapi pertanyaan di atas tetap menggelisik: apa yang keliru?

Dalam manuskrip-manuskripnya tentang ekonomi dan filsafat (1844), Karl Marx pernah memperkenalkan istilah Buruh yang terasing. Dalam relasi sosial kapitalisme, menurut Marx, buruh

terasing dari apa yang ia buat karena sistem produksi yang terorganisir dan berskala besar membuat buruh memproduksi tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk perusahaan. Sebagai gantinya, ia mendapatkan upah berdasarkan apa yang ia buat.

Marx menyebut fenomena ini sebagai "alienasi": semakin buruh bekerja, semakin ia menjadi asing dari apa yang ia buat, karena kemampuan dirinya telah ia berikan untuk pabrik dan perusahaan yang mengeksploitasi dirinya. Buruh menjadi asing dengan dirinya dan kemampuannya dalam bekerja.

Dengan cara yang sedikit berbeda, kita mungkin juga bisa bertanya: jika ilmu pengetahuan adalah bagian dari tradisi pengetahuan umat Islam yang berkembang di masa kejayaan Islam, mengapa sekarang umat Islam, seperti kata Muhammad Abduh, terasing dari tradisinya tersebut? Sebagaimana buruh di alam kapitalisme, jawabannya tidak bisa kita dapatkan hanya dengan melihat kualitas kerja dari buruh tersebut (atau, dalam hal ini, kualitas umat Islam). Kita juga harus melihat relasi-relasi sosial yang mengasingkan umat Islam dari tradisinya.

Ada banyak cerita di sana. Bertahun-tahun, penerjemahan teks-teks Yunani memungkinkan banyak ulama mengembangkan pengetahuan Yunani secara kreatif; tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mensintesis dengan kedalaman ilmu yang khas. Namun, konon kabarnya, sebelum kolonialisme datang ke Timur, ketegangan antara otoritas 'agama' dan 'sains' sudah sering terjadi. Ada banyak cerita ketika orang-orang yang berpengetahuan juga dianggap 'subversif'; atau mungkin dianggap sesat karena cara berpikir rasional mereka melabrak batas-batas teologis. Re-

zim-rezim Khalifah yang berkuasa tidak semuanya mendukung pengembangan sains. Banyak yang justru terjebak oleh politik dinastik yang melemahkan dan mencerai-beraikan umat Islam.

Sehingga, ketika Baghdad hancur dan kesultanan Umayyah di Andalusia runtuh, sebetulnya tradisi yang berorientasi pada kemajuan itu telah memudar terlebih dulu. Yang justru, ironisnya, diterjemahkan ulang di masa pencerahan (seperti, misalnya, teks-teks Ibn Sina, Ibn Rushd, atau Al-Khwarizm) yang memungkinkan peradaban Barat tumbuh.

Lalu muncul episode tentang kolonialisme Eropa, yang memandang orang-orang di dunia baru sebagai subjek yang harus diperkenalkan dengan peradaban, memunculkan apa yang disebut sebagai 'hierarki global' melalui standar peradaban tertentu. Kolonialisme sejatinya tidak tumbuh hanya melalui penguasaan total Negara-negara Eropa atas jajahannya. Kolonialisme Inggris (di Malaya atau India), misalnya, justru berdampingan dengan Kesultanan dan kerajaan lokal yang eksis, dihormati sebagian kedaulatannya, tapi diatur oleh aturan kolonial di bidang tertentu (seperti perpajakan atau pertahanan). Kolonialisme Belanda, kendati lebih 'otoriter', juga memberdayakan banyak penguasa lokal (priyayi) sebagai pegawai yang memungkinkan administrasi kolonial berjalan. Ini, ironisnya, terjadi di wilayah yang mayoritas warganya adalah Muslim.

Episode historis semacam ini perlu dipahami untuk menjelaskan mengapa tradisi keilmuan Islam memudar. Bisa jadi, umat Islam teralienasi dari tradisi keilmuannya sendiri karena kegagalan kita dalam memahami sejarah dan relasi-relasi sosial yang

membentuknya. Ditambah dengan relasi sosial kapitalisme yang berdiri di atas warisan kolonial yang sangat kuat.

Respons yang muncul, sebagai konsekuensinya, adalah dua respons yang keliru. Respons pertama ingin kembali ke masa lalu, dengan mengglorifikasi tradisi umat Islam era Umayyah dan Abbasiyah, tanpa memahami konteks sejarah masa itu. Respons kedua menyalahkan diri sendiri, lalu mengikuti lintasan (trajectory) kemajuan Barat, tanpa memahami warisan dan tradisi masa lalu yang sebetulnya juga kaya. Keduanya bermasalah, dan kita perlu jalan alternatif di masa depan.

Islam sudah menggariskan tradisi pengetahuannya melalui Teologi Al-Alaq. Kita mungkin tak perlu bertanya lagi tentang hal ini. Tapi untuk mengembalikan tradisi pengetahuan umat Islam, perlu sesuatu yang lebih mendasar, yaitu memahami kembali sejarah dan tradisi pengetahuan umat Islam, dan menjadikannya untuk memotivasi perkembangan sains dan teknologi saat ini.

Kita tidak perlu ‘alergi’ dengan kemajuan dari berbagai belahan dunia yang lain. Bisa jadi, yang mereka lakukan justru sejalan dengan perintah Al-Qur’an untuk membaca, menulis, dan mengajarkan pengetahuan. Yang perlu dilakukan umat Islam adalah mengontekstualisasikan tiga perintah Allah dalam Surat Al-Alaq secara konsisten: (1) iqra’—“membaca” ciptaan Allah melalui penelitian; (2) ‘allama bil kalam”—menulis dan mempublikasikan hasil riset; serta (3) “‘allamal insaana maa lam ya’lam”—mengajarkan mahasiswa dan mengader ilmuwan-ilmuwan muda di kampus.

Tentu hal ini juga membutuhkan kritik yang terus-menerus terhadap hierarki global dan relasi sosial kapitalisme yang membentuk dunia saat ini. Di banyak tempat, saat ini tengah berlangsung kampanye tentang dekolonisasi pengetahuan, yang sebetulnya bukan hanya soal membuat keragaman dalam pengetahuan, tetapi juga membersihkan cara berpikir kita dari warisan kolonial masa lalu. Warisan berpikir yang rasis, menganggap orang lain tidak se-level hanya karena tidak menempuh pendidikan, atau menganggap orang-orang di negara "Dunia Ketiga" adalah orang-orang yang harus diberadabkan.

Tugas sains masa depan adalah meruntuhkan asumsi macam ini: bahwa dalam pengembangan pengetahuan, semua orang harus punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan tanpa harus ada kelas-kelas sosial dan tingkatan-tingkatan (hierarki) global.

'Ala kulli hal, Ada satu hal penting di sini: bahwa yang kita kenal sebagai 'zaman keemasan Islam' bisa jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Bisa jadi, ia hadir sebagai sesuatu yang diperjuangkan. Ada perjuangan untuk meyakinkan pemimpin bahwa pengetahuan penting; atau bahwa tradisi untuk berpikir rasional dan berbasis data adalah tradisi pengetahuan Islam; atau bahwa untuk mengembangkan pengetahuan, perlu kerja kolektif. Dan artinya, perjuangan untuk membangkitkan tradisi pengetahuan umat Islam, adalah juga perjuangan kolektif semua elemen umat.

Dan tidak semua ceritanya indah; ada yang dituding aliran sesat, ada yang direpresi karena tidak mau menganggap Al-Qur'an sebagai wahyu, ada yang saking cintanya pada ilmu

hingga hidup melajang—dan ini tentu biasa saja di masa itu. Di masa kini, mungkin juga banyak dinamika yang muncul; dari soal dianggap liberal, kiri, atau malah dicibir karena dianggap berbeda dari masyarakat. Yang kemudian, mestinya, membuat kita memahami bahwa Islam adalah bagian dari kenyataan yang dinamis, bukan hanya idealisasi tentang masa lalu yang dipaksakan untuk hadir di masa kini. *Nuun wal qalami wa maa yasthuruun.* (*Sumber*: Harian IndoPROGRESS, 12 April 2019).

AL-GHAZALI, *'ILLAT*, DAN AGAMA PENCERAHAN

Ilham Ibrahim

RASA-RASANYA amat jarang sarjana Islam maupun santri tak mengenal al-Ghazali. Sejumlah kitab buah tangan al-Ghazali menjadi obyek kajian di berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Alhasil tulisan-tulisan al-Ghazali serasa awet muda saat dipandang oleh manusia lintas peradaban.

Saat membaca kitab *Kimiya al-Sa'ādat* karya al-Ghazali, saya seperti berhadapan dengan sesuatu yang karismatis. Karisma itu bisa kita rasakan dari setiap kalimat yang ada di dalamnya. Kita seolah terpelajar dan mendapat pengalaman spiritual yang luar biasa. Teks semacam ini, bagi saya, bukanlah sembarangan teks. Yang mengesankannya lagi adalah kitab ini ditulis bukan dengan bahasa yang dingin, kaku, dan kering. Nilainya tak bisa kita samakan dengan membaca teks perundang-undangan.

Saya berhadapan dengan *Kimiya al-Sa'ādat* dengan perasaan gentar dan tertegun-tegun. Sebab di sana, saya membaca sebuah teks yang lahir dari intensitas iman yang berdarah-darah, iman yang memantik gejala demam "spiritual" yang akut. Kita tahu al-Ghazali pernah dalam masa *ultimate skeptic* yang meragukan segala sesuatu hingga dirinya terkena penyakit "*syak*". Postulat-postulat dan doktrin agama dipertanyakan kembali validitasnya oleh al-Ghazali. Karenanya, teks dalam kitab *Kimiya al-Sa'ādat* ini nyaris mustahil lahir dari orang dengan iman yang mentah.

Satu segmen yang menurut saya paling menarik dari kitab *Kimiya al-Sa'ādat* ini adalah tentang musik dan tarian. Dalam kitab itu al-Ghazali menerangkan musik jika dipakai sebagai medium pengiring kesedihan setelah ditinggal mati pasangan, kerabat, saudara atau teman, hukumnya haram. Nyanyian kematian hanya akan menambah kesedihan. Dalam hal ini, al-Ghazali bersandar kepada Quran: *Jangan bersedih atas apa yang hilang darimu* (Q.S. Ali Imran 3:153).

Akan tetapi di sisi lain, al-Ghazali berpendapat bahwa kalau kesedihan itu setelahnya dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik, lebih bahagia, hal itu secara implisit membuat musik dapat dihalalkan (mubah). Kalau sekiranya musik dapat menjadi instrumen pengingat dosa, muhasabah, koreksi atas diri, untuk kemudian menjadi pribadi yang saleh, maka hukumnya menjadi mubah. Al-Ghazali kemudian menegaskan bahwa musik dan tarian yang dari padanya dapat menenteramkan hati tidak lantas

membuatnya haram, sebagaimana mendengarkan nyanyian burung, atau melihat rumput hijau dan air yang mengalir.

Dari penjelasan di atas menarik sekali melihat metode istinbath hukum imam al-Ghazali tentang musik. Dalam kesempatan ini izinkan saya meminjam tipologi *'illat* dari tulisan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Syamsul Anwar yang pernah saya baca di buku *Fikih Kebhinekaan*. Dalam buku tersebut, Prof. Syamsul berpendapat bahwa *'illat* itu terbagi dua macam: *Pertama*, "*al-'illah al-fā'ilah*" atau kausa efisien. *Kedua*, "*al-'illah al-ghā'iyyah*" atau kausa final.

Dalam penjelasan Prof. Syamsul, *al-'illah al-fā'ilah* adalah penyebab ditetapkannya suatu ketentuan hukum dan *'illat* ini mendahului penetapan hukum. Contoh, ijab qabul adalah *'illat* sahnya suami istri berhubungan badan. Tindak pidana korupsi adalah *'illat* dari jatuhnya hukum potong tangan. Sedangkan *al-'illah al-ghā'iyyah* adalah tujuan yang hendak diwujudkan melalui suatu penetapan hukum. Menurut Prof. Syamsul, *'illat* ini terwujud setelah, dan didahului oleh, penetapan hukum. Contoh, pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, sah tidaknya sebuah perceraian harus ditentukan di pengadilan, tujuannya agar menekan tingkat perceraian dan menghindari kesewenangan talak yang mungkin dijatuhkan oleh suami tanpa alasan yang logis dan sah. Menurut prof. Syamsul, *al-'illah al-ghā'iyyah* atau kausa final inilah yang sesungguhnya merupakan *Maqāshid al-Syarī'ah*.

Kalau kita melihat argumen al-Ghazali tentang musik seperti yang sudah disampaikan di atas, yang menyatakan bahwa musik dihukumi haram manakala dipakai sebagai medium pengiring

kesedihan setelah ditinggal mati seseorang yang kita cintai dan hargai, dan musik itu dapat menjadi halal (mubah) kalau memiliki tujuan sebagai instrumen muhasabah dan pengingat dosa yang membuat seseorang lebih dekat dengan Allah, maka dapat kita kategorikan pandangan Imam al-Ghazali ini termasuk kategori "*al-'illah al-ghā'iyyah*".

Berdasarkan penjelasan di atas nampaknya al-Ghazali ingin memberikan satu pelajaran penting kepada kita bahwa penetapan hukum jangan dilihat secara monolitik (misalnya hanya dihukumi haram), tetapi harus menyeluruh berdasarkan *al-'illah al-ghā'iyyah* atau kausa final. Dengan pembacaan yang seperti ini, kita akan melihat segala objek hukum dengan adil dan proporsional, tidak melulu halal dan juga tidak selalu haram. Sehingga membawa persoalan ini pada kesimpulan bahwa kalau musik membawa seorang *mukallaf* pada kesesatan, maka hukumnya haram. Sedangkan jika musik tersebut membawa seorang muslim pada kemashlahatan, maka mubah.

Hal di atas sama dengan pandangan Majelis Tarjih tentang menggambar, melukis dan membuat patung. Saat sebagian kelompok Islam mengharamkan melukis dan membuat patung, Majelis Tarjih dengan metode pembacaan teks yang menyeluruh (*istiqrā*), aktivitas melukis dan membuat patung dihukumi tiga bentuk tergantung *al-'illah al-ghā'iyyah*, yaitu bisa haram, makruh, dan mubah. Melukis dan membuat patung dapat menjadi haram manakala disembah, dan dapat menjadi mubah manakala dijadikan media pembelajaran. Melalui pembacaan seperti ini,

kita menghukumi segala sesuatu secara kondisional-kontekstual, bukan dengan cara parsial-tekstual.

Oleh karenanya, penentuan hukum yang bersifat konkret dan praktis agar tidak monolitik harus memakai kerangka kausa final atau *maqāshid al-syarī'ah* atau *al-'illah al-ghā'iyyah*. Dengan menggunakan *al-'illah al-ghā'iyyah* sebagaimana yang dilakukan oleh al-Ghazali dan Majelis Tarjih, pembacaan terhadap teks al-Qur'an dan Hadis dari yang semula lebih menekankan pada sisi parsialitas (*juz'iyyah*) dan monolitik, diperluas radius jangkau-an liputan pemahamannya menjadi lebih umum (*'ammah*) dan universal ('ālamiyyah), sehingga dengan pemahaman seperti ini Islam tidak lagi kaku, rigid, keras, eksklusif, *non-compromise*, te-tapi menjadi *ummatan wasatha* dan bahkan bisa sampai menjadi wajah Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*.
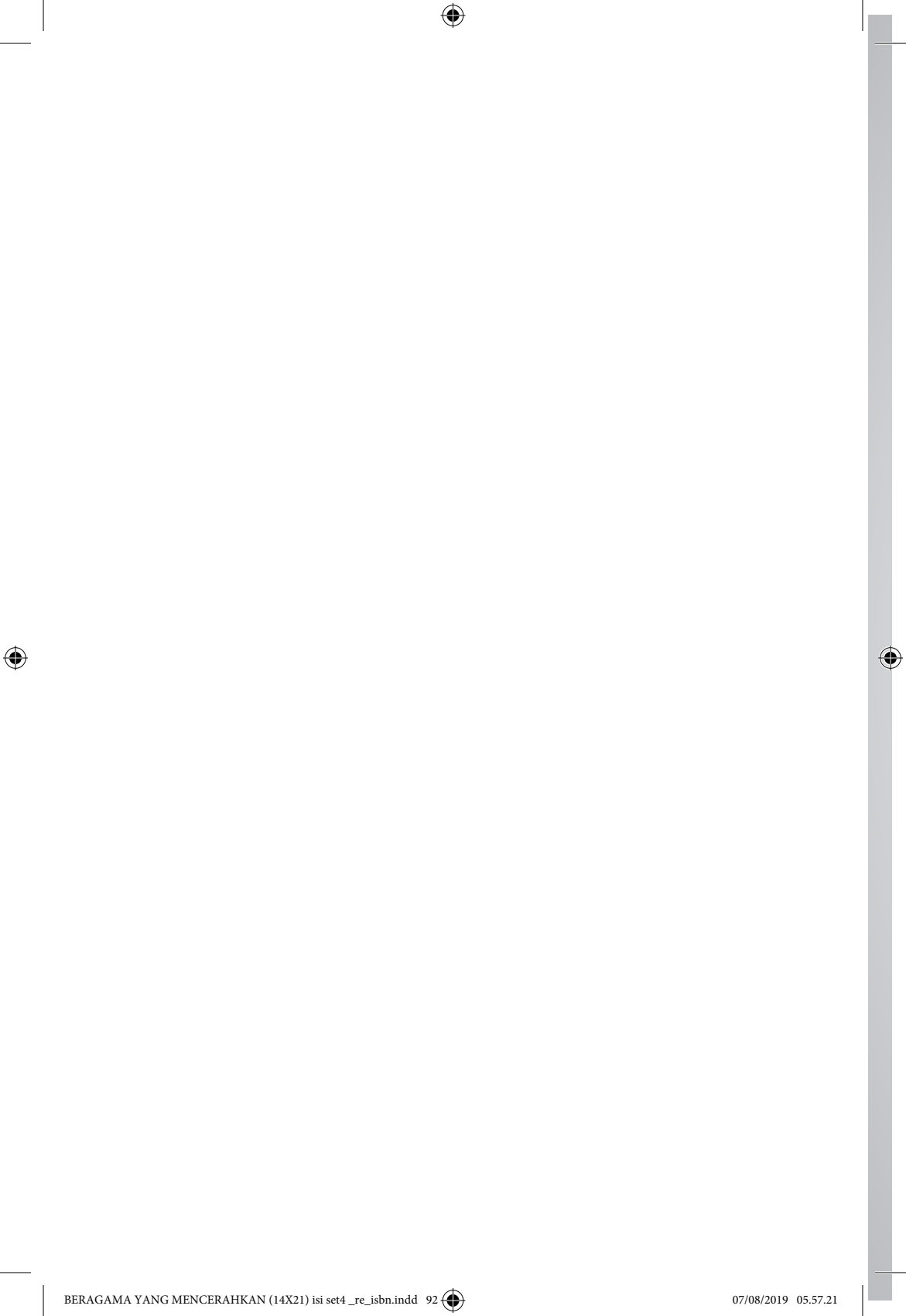
3

Risalah Politik Nilai

MEMPERKUAT POLITIK NILAI

Abdul Mu'ti

SIDANG Tanwir Muhammadiyah secara resmi ditutup Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla. Acara yang berlangsung 15-17 Februari di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu menghasilkan beberapa keputusan strategis organisasi, rekomendasi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Risalah Bengkulu.

Melalui Risalah Bengkulu, Muhammadiyah menegaskan pentingnya mewujudkan ajaran dan nilai-nilai Agama yang mencerahkan dalam bidang politik. Muhammadiyah menyerukan pentingnya membangun kehidupan politik berkeadaban luhur yang disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, dan lapang hati di tengah perbedaan pilihan. Selanjutnya, Muhammadiyah mengingatkan agar dalam berpolitik hendaknya tidak menghalalkan segala cara, menebar kebencian dan permusuhan, serta politik pembelahan karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan kebangsaan yang majemuk dan berbasis pada nilai-nilai Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.

Nilai Pancasila

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya sebagai Dasar Negara tetapi juga sumber nilai yang memandu dan memberikan makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai Agama dan budaya bangsa Indonesia. Penanaman nilai-nilai Pancasila membentuk karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa--bangsa lainnya.

Pertama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Politik bukanlah seuatu yang bebas nilai, terlepas dari Agama. Indonesia, meminjam istilah Abdul Karim Soroush, adalah negara *"secular religious"*. Indonesia bukanlah negara Teokrasi yang berdasarkan atas Agama tertentu. Tetapi, Indonesia bukan pula negara sekuler dimana Agama terpisah dari kehidupan publik. Di Indonesia tidak ada domestikasi, dimana Agama dimaknai sebatas ritual ibadah formal yang diselenggarakan di tempat-tempat ibadah atau ruang privat. Nilai-nilai Agama menjiwai dan memandu kehidupan politik sehingga tetap berdiri tegak di atas moralitas luhur. Agama berada dalam posisi yang lebih tinggi, bukan bagian dari politik. Karena itu tidak seharusnya Agama dijadikan sebagai kendaraan politik.

Kedua, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana dikemukakan Aristoteles (384-322 SM), manusia adalah mahluk politik. Karena itu, berpolitik merupakan *"fitrah"*, tabiat, atau sifat dan perilaku alamiah manusia. Sesuai dengan pengertiannya, politik (polis-Yunani) berarti kota atau negara kota. Dalam konteks budaya, kota bukanlah wilayah geografis dan adminis-

trasi pemerintahan, tetapi budaya yang menggambarkan keadaban dan kemajuan. Karena itu, politik dan berpolitik harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Jangan sampai demi kepentingan politik, manusia saling merendahkan, menista, dan melanggar hak-hak azasi manusia.

Ketiga, nilai Persatuan Indonesia. Perbedaan adalah realitas kehidupan umat manusia. Menurut Yusuf Qardhawi, perbedaan umat manusia merupakan *sunnatullah* yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, ilmiah dan *amaliah.* Manusia diciptakan berbeda-beda agar mereka saling mengenal, menghormati, tolong-menolong, dan menemukan makna dalam kehidupannya. Dengan perbedaan manusia bisa saling berbagi; sebuah perilaku utama yang mendatangkankan kebahagiaan. Politik akan mendatangkan kemajuan apabila manusia saling berbagi, termasuk di dalamnya berbagi kekuasaan *(sharing power).* Sesuai dengan nilai-nilai persatuan, politik diletakkan sebagai instrumen dan pranata sosial bukan sebagai tujuan.

Keempat, nilai musyawarah. Salah satu budaya luhur bangsa Indonesia adalah musyawarah. Alquran memerintahkan manusia untuk senantiasa menyelesaikan dan mengambil keputusan bersama melalui musyawarah (Qs. 3, Ali Imran: 159). Berpolitik pada hakikatnya adalah mengatur kehidupan bersama untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik modern, pada dasarnya merupakan praksis musyawarah. Pemilihan legislatif dan eksekutif melalui Pemilu adalah bentuk permusyawaratan

untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Dalam hasanah Islam disebutkan: *la tajtamiu ummati ala khataain* (Ummatku tidak akan bersekutu untuk sesuatu yang salah). Maknanya, keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah adalah yang terbaik. Karena itu, semua pihak hendaknya menerima hasil musyawarah, termasuk di dalamnya menerima hasil-hasil Pemilu.

Kelima, nilai keadilan sosial. Banyak pihak mulai mempersoalkan sistem demokrasi, terutama dalam hubungannya dengan kemakmuran. Bali *Democracy Forum* (2018) mengangkat tema *Democracy and Prosperity.* Tema tersebut diangkat di tengah realitas dunia baru dimana banyak negara-negara demokratis yang pecah, bangkrut, dan jatuh miskin. Contoh mutakhir adalah perpecahan dan perang sipil yang terjadi di Timur Tengah setelah *Arab Spring* yang terjadi 2011. Atau, fenomena populisme yang melahirkan pemimpin populis seperti Donald Trump di Amerika Serikat. Sementara pada sisi lain, dunia menyaksikan fenome Tiongkok. Negara yang pada kurun 1970an disebut "tirai bambu" dengan kepemimpinan otoriter, sekarang tampil sebagai raksasa ekomoni dan *the new gigantic power* yang pada 2050 diprediksi menumbangkan supremasi Amerika Serikat. Di tanah air kita, pertanyaan senada juga semakin kuat. Sistem demokrasi dinilai menjadi biang kesenjangan sosial.

Politik Nilai

Demokrasi tentu memiliki banyak kelemahan. Tetapi, di antara pilihan sistem politik modern, demokrasi tetaplah relevan untuk Indonesia yang majemuk. Selain itu, banyak pihak yang mulai

prihatin dengan praktik demokrasi dan politik yang jauh dari keadaban, teruma dengan merebaknya kampanye negatif dan kampanye hitam. Alih-alih mendatangkan kedamaian, teknologi digital telah menjelma menjadi monster dimana masyarakat melakukan menjelekkan *(fitnah),* menggunjing *(ghibah),* dan permusuhan *(adawah)* digital. Aktivisme politik berubah dari jalan ke genggaman tangan, dari jalan kaki ke tarian jari-jari. Meminjam istilah Fukuyama (2019), politik sudah berubah dari *"governing"* (pemerintahan) ke *"winning"* (kekuasaan).

Kekhawatiran semakin memuncak di tengah polarisasi politik yang tajam. Polarisasi politik begitu terasa di tengah mendekatnya pemilihan presiden. Di tingkat lokal (Pilkada), polarisasi juga terjadi. Tetapi, pada Pilpres 2019, polarisasi politik atas dasar kesenjangan kesejahteraan dan Agama begitu dominan. Nilai-nilai Pancasila dan budaya luhur bangsa seakan sirna. Agama ditarik dalam derajat yang begitu rendah sebagai alat politik kekuasaan.

Dalam situasi inilah Risalah Bengkulu yang dihasilkan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah menjadi begitu bermakna. Risalah Bengkulu diharapkan dalat menjadi suluh di tengah gulita nurani, oase di tengah kehausan kekuasaan. Politik nilai yang tidak berorientasi kekuasaan memang pilihan pahit dan sulit. Tidak mudah mewujudkannya. Tetapi di tengah arus deras pragmatisme, harus ada yang bertahan di atas nilai-nilai utama Agama, Pancasila, dan keadaban utama untuk kemajuan bangsa.

MUHAMMADIYAH, POLITIK IDENTITAS, DAN PILPRES

Fajar Riza Ul Haq

SOEKARNO dan Bengkulu memiliki hubungan kesejarahan dengan Muhammadiyah.

Masa pembuangan Sang Proklamator di kota ini (1938-1942) telah mempertemukan dirinya dengan tokoh Muhammadiyah Bengkulu, Hasan Din. Hubungan dekat keduanya terbaca dari kesediaan Soekarno menjadi guru di sekolah Muhammadiyah bahkan terlibat di Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Bengkulu. Pada 1 Juni tahun 1943, Soekarno menikahi putri Hasan yang bernama Fatmawati. Dari rahim putri tokoh Muhammadiyah inilah lahir Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh.

Pada acara mengenang Hari Lahir Ibu Negara Fatmawati Soekarno ke-96, Selasa lalu, di Jakarta (5/2), Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiah Siti Noordjannah Djohantini menyebut Fatmawati sebagai Ibu Negara dan Ibu Bangsa yang lahir dari keluarga Mu-

hammadiyah-'Aisyiyah yang lekat warna keislaman dan keindonesiaan nya yang berkemajuan. Ia telah banyak berjasa kepada umat Islam dan juga bagi semua golongan dengan latar belakang agama, etnis, dan budaya yang berbeda-beda. Pada kesempatan tersebut yang juga dihadiri Megawati, organisasi perempuan tertua di Indonesia ini mempersembahkan buku berjudul "Muslimah Berkemajuan: Sepenggal Riwayat Fatmawati dan Aisyiah - Muhammadiyah" (*Suara Muhammadiyah*, 6/2/19).

Ikatan kesejarahan itulah yang melatarbelakangi pemilihan Kota Bengkulu sebagai tuan rumah perhelatan Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51 pada 15-17 Februari 2019. "Kami merasa berada di rumah sendiri. Tentu kami bangga Bengkulu menjadi bagian, selain Bengkulu juga memiliki hubungan kesejarahan dengan Muhammadiyah. Selain aspek itu, melihat perkembangan Muhammadiyah di Bengkulu di bidang pendidikan yang saat ini sudah menjadi rujukan", ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir akhir November lalu dalam rapat koordinasi dengan jajaran pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Sidang Tanwir yang dihelat menjelang pemilu serentak April nanti ini mengusung tema "Beragama yang Mencerahkan". Nampaknya, pemilihan topik ini dilandasi kepedulian Muhammadiyah untuk menghadirkan sikap keberagamaan yang optimis, humanis, dan berorientasi pada kemajuan di tengah gelombang politik populisme dan keterbelahan umat menuju pilpres. Menurut Haedar, forum tanwir diharapkan menjadi titik temu seluruh energi positif semua pimpinan Muhammadiyah untuk mencerahkan kehidupan umat dan bangsa.

Meritokrasi

Diantara pikiran-pikiran strategis yang dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah 2015 di Makassar adalah komitmen Muhammadiyah mengkampanyekan keberagamaan *wasthatiyah* (tengahan), mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan, menjauhi sikap *takfiri* (menuduh kafir pihak yang berbeda), dan membangun budaya meritokrasi. Organisasi ini juga berdakwah dalam rangka menularkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas kemanusiaan serta menyerukan perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi. "Jika ingin membangun negara modern, ya jangan berdasarkan kriteria golongan, apalagi menjadi milik golongan tertentu", tegas Haedar Nashier baru-baru ini.

Prinsip meritokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu yang memungkinkan nya dapat mengembangkan semua potensinya sehingga berkontribusi kepada kemajuan masyarakat (Mahbubani, 2008). Semangat meritokrasi menjungjung tinggi kerja keras, prestasi, dan kesetaraan. Tidak berkompromi dengan politik dinasti dan dominasi golongan tertentu. Kegemilangan sepak bola Brazil cermin dari keberhasilan meritokrasi di bidang olah raga. Komitmen Muhammadiyah membangun budaya meritokasi di ranah publik tersebut merefleksikan persistensi sistem kepemimpinan meritokratik di internal Muhammadiyah sendiri.

Namun arus pasang populisme global yang berbaur dengan gelombang Islamisasi di ranah domestik dan seiring dengan pengerasan sentimen politik identitas telah mengancam nilai-nilai meritokratik yang disuarakan Muhammadiyah pada ranah ke-

negaraan. "Masalah dengan politik kita adalah bahwa kita telah bergeser dari berdebat tentang kebijakan ekonomi ke berdebat tentang identitas", kata Fukuyama (2018) dalam satu wawancara. Menjadi musykil menegakkan sistem meritokrasi jika arus politik identitas kian mengokohkan tembok parokhialisme dan mengukuhkan superioritas kelompok. Inilah fenomena kebangkitan tribalisme baru—dalam istilah Francis Fukuyama—yang menantang sistem meritokrasi. Pengerasan politik identitas akan mematikan prinsip-prinsip egalitarian dan menggugurkan sistem meritokrasi.

Pilpres

Momentum pemilihan presiden-wakil presiden, anggota legislatif, dan anggota perwakilan daerah memiliki basis legitimasi untuk menguji tingkat kesadaran politik kewargaan dalam membangun budaya egalitarian dan meritokrasi. Beberapa survei memperlihatkan adanya peningkatan sentimen agama dalam pemilihan pejabat-pejabat publik. Lembaga Survey Indonesia merekam tren kenaikan intoleransi politik sejak 2010 hingga 2017. Belakangan, isunya tidak lagi sebatas memperhadapkan pemimpin "Muslim vs Non Muslim" namun sudah menjurus ke politik eksklusi seperti "Islam vs lebih Islam" dan "agamis vs lebih agamis".

Ruang percakapan publik di tahun politik ini terus disesaki semburan narasi agitasi, provokasi bahkan kebohongan. Kita pun menyaksikan betapa media sosial begitu mudah mempabrikasi isu-isu kebencian dan permusuhan politik yang sebagian besarnya bersumbu pada pengerasan politik identitas dan isu ketidak-

adilan *vis a vis* pemerintah. Keberadaan kekuatan kritis dan penyeimbang, baik di parlemen maupun di luar parlemen (media, individu, dan kelompok sipil) merupakan suatu keharusan dalam sistem demokrasi.

Namun sikap politik *check and balances* itu akan menjadi destruktif jika menyeret-nyeret sentimen politik identitas dan menabalkannya sebagai bentuk perlawanan terhadap kedholiman yang menimpa "umat Islam". Meringkus kompleksitas dan perbedaan aspirasi politik umat Islam menjadi aspirasi politik yang tunggal jelas menyesatkan. Membenturkan opini bahwa calon presiden A lebih mewakili Islam dibanding calon presiden B sangat membahayakan.

Faktanya, masing-masing calon presiden menikmati dukungan dari pengikut ormas-ormas Islam. *Survey Populi Center* (periode 20-29 Januari 2019) mengungkap tingginya dukungan warga Muhammadiyah terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 72,1%. Yang mendukung Prabowo-Sandi sejumlah 20,9%. Adapun dukungan warga NU terhadap Jokowi sebesar 56,1%. Sisanya 27,8% memilih Prabowo. Adapun mayoritas Persatuan Islam (Persis) menambatkan pilihan politiknya ke Paslon 02 sebesar 64,3%. Paslon 01 mendapat dukungan 35,7%. Yang menarik namun ini tidak mengejutkan, 100% anggota FPI memilih Prabowo.

Netralitas Muhammadiyah menghadapi pemilu mendatang memang tidak bisa ditawar dan warga Persyarikatan ini mempunyai independensi politik mutlak. Besarnya dukungan warga Muhammadiyah pada Jokowi-Ma'ruf, mengacu pada survei sementara di atas, bukan berarti organisasi ini berpihak. Justru

yang menjadi menarik adalah keberadaan sosok cawapres Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh senior NU relatif tidak "mengganggu" kenyamanan pilihan politik warga Muhammadiyah. Ada banyak faktor yang berkontribusi. Salah satunya adalah kedewasaan politik warga Muhammadiyah dalam memilih pemimpin nasional dengan mengutamakan prinsip inklusivitas dan meritokrasi yang melekat pada sosok Jokowi.

Sikap politik organisasi sudah seharusnya memayungi keragaman aspirasi politik warganya tanpa mengorbankan *khittah*. Perbedaan pilihan politik antar anggota tidak sepatutnya merusak soliditas organisasi dan persaudaraan. Yang pasti, Muhammadiyah sangat berkepentingan agar hasil pemilu melahirkan kepemimpinan yang mampu membangun instrumen-intrumen kebijakan yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas sosial berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya egalitarian dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan (*Berita Resmi Muhammadiyah*, 2015: 120).

Semoga sidang tanwir kali ini melahirkan pikiran-pikiran bernas dan program strategis sehingga menjadi oase dan perekat bagi kehidupan kebangsaan kita. Muhammadiyah merupakan penjaga bangsa. Selamat bertanwir! *Wallahu'alam*.

TANWIR KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH

Sudarnoto Abdul Hakim

TAK dipungkiri kenyataan bahwa eskalasi politik akhir-akhir ini menjelang Pilpres nampak semakin meninggi, apalagi jika patokannya kepada media sosial. Nampak dengan jelas pembelahan publik (netizen) telah terjadi dan semakin menajam.

Yang sangat memprihatinkan adalah ditariknya agama dan ormas sosial keagamaan oleh para tokohnya dalam pusaran pertentangan kepentingan dan kontestasi politik praktis ini. Dengan pemanfaatan isu agama dan kekuatan besar ormas keagamaan diharapkan tidak saja akan memperoleh legitimasi keagamaan, akan tetapi juga dukungan elektoral yang signifikan. Puncak kepuasannya terletak kepada keberhasilannya mengalahkan rival politiknya dan pahala politik akan diterima.

Persoalannya adalah tidak ada jaminan sedikitpun bahwa kemenangan akan diperoleh meskipun survei diharapkan bisa membantu gambaran empirik. Yang terjadi kemudian ialah me-

ningkatnya intensitas serangan melalui berbagai cara termasuk cara-cara yang bahkan melampaui batas kewajaran moral dan sosial.

Dalam situasi seperti ini isu atau dalil serta sentimen keagamaan terus dimainkan terutama oleh para aktor utama yang secara langsung memang berkepentingan untuk memperoleh pahala atau berkah politik. Narasi yang dibangun adalah perjuangan atau jihad melawan kebatilan yang memang harus dilakukan oleh setiap muslim/muslimah. Kontestasi politik Pilpres dimaknai sebagai jihad pembela kebenaran (*al-Haq*) melawan kebatilan (*al-Bathil*) dan karena itu harus menang.

Jika pembela kebatilan yang menang, maka sudah dipastikan ini karena telah melakukan kecurangan politik dan Islam serta umat Islam akan jadi korban; negara dan bangsa Indonesia pada akhirnya akan hancur atau bubar. Yang memprihatinkan justru para aktornya adalah kaum terpelajar, ilmuan, akademisi. Inilah yang juga menjadi keprihatinan mendalam Ketua Umum PP Muhammadiyah. Para ilmuan dan akademisi ini seharusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan memprovokasi dan menyesatkan.

Pusat-pusat pendidikan pun seharusnya steril dari pemikiran agitatif dan tarik menarik kepentingan politik praktis meskipun nampaknya dibungkus dengan logika akademik dan argumen/ sentimen keagamaan. Agama, akhir- akhir ini, diperkuat oleh kekuatan Kanan dijadikan sebagai sumber doktrin untuk mendelejitimasi pihak lawan dan semua kekuatan pendukungnya karena memang dipercaya sebagai sumber masalah dan kebatilan. Cara

pandang perbenturan hitam putih seperti ini akan memberikan ruang yang jembar bagi berkembang dan menguatnya ekstrimisme berbungkus agama.

Jika kita berkaca kepada pengalaman sejarah, maka ekstrimisme berbungkus agama ini justru akan memperlemah dan memporak porandakan kohesivitas masyarakat dan bangsa. Contoh yang masih bisa disaksikan adalah Timur Tengah.

Nilai-nilai atau prinsip luhur yang sebetulnya tersedia begitu melimpah dalam al-Qur'an dan dalam kehidupan sehari-hari Muhammad Rasulullah tersisih karena praktik-praktik politik pragmatis dan jangka pendek ini. Kesantunan, penerimaan dan penghormatan secara tulus terhadap perbedaan, menjaga martabat dan muruah sesama, toleransi, menjaga persaudaraan dan persatuan, tidak hoaks dan tidak membuly, menghormati institusi pemerintah dan negara yang sah terpinggirkan.

Tak berlebihan untuk berpandangan bahwa ini turning points yang luar biasa bagaimana keluhuran ini tergantikan dengan ketidak warasan. Nilai-nilai luhur Pancasila dan juga demokrasi juga menjadi korban dari ketidakwarasan ini. Seperti yang penulis utarakan di atas, ini sangat berpengaruh terhadap pandangan, sikap dan pilihan politik publik.

Muhammadiyah Sebagai Aktor

Posisi dan peran Muhammadiyah sangatlah penting dan strategis. Sebagai organisasi *civil society* muslim yang tertua dan sangat berpengaruh, kontribusi terhadap bangsa dan negara tidak-

lah diragukan karena memang telah dirasakan oleh masyarakat secara luas. Inilah yang mendorong pemerintah melalui Presiden Jokowi beberapa kali menyatakan secara langsung penghargaan dan ucapan terima kasihnya kepada Muhammadiyah yang telah berkorban dan memberikan banyak tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Hingga saat ini Muhammadiyah akan terus berkiprah secara nyata.

Dalam konteks pandangan dan sikap Keislaman dan kebangsaan, Muhammadiyah sudah jelas. Ini tercermin dalam konsep Indonesia Negara Pancasila sebagai *Dārul 'Ahdi Wasy-Syahādah* yang secara terus menerus akan diwujudkan. Muhammadiyah akan tetap menjadi aktor utama dalam kehidupan berbangsa ini, yaitu aktor menggerakkan pencerahan (Tanwir).

Tanwir tidak sekadar sidang tertinggi di bawah Muktamar, akan tetapi menjadi gerakan nyata Muhammadiyah dari masa ke masa untuk menjaga, merawat dan memajukan bangsa Indonesia secara kongkret melalui berbagai program keagamaan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, kemanusiaan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan. Gerakan pencerahan ini tak terkecuali diharapkan akan mampu meluruskan berbagai penyimpangan praktik atau perilaku politik masyarakat sebagaimana yang diurai di atas.

Muhammadiyah menyadarkan masyarakat agar kembali ke jalan tengah (Wasathy) atau moderat dan kembali menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa serta nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Sesuai juga dengan ajaran Islam, jihad yang

harus dilakukan ialah menegakkan keluhuran termasuk dalam praktik politik supaya benar benar sehat.

Politik yang sehat adalah yang menghargai perbedaan, bersemangat memperkokoh persatuan dan memperjuangkan cita cita bangsa, menghindari antagonisme, membuang jauh jauh hoaks bully dan pembunuhan karakter, menjaga agama dari tarik menarik politik, penegakan hukum secara adil dan pada akhirnya menegakkan kemaslahatan umum (*Maslahah Ammah*). Inilah gerakan Tanwir atau pencerahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sehingga demokrasi Indonesia benar benar berjalan secara jenuin dengan menjadikan nilai dan prinsip luhur agama sebagai faktor penting. *Wallahu a'lam bis showab*. (*Sumber*: http://www.suaramuhammadiyah.id, 16 Februari 2019).

MUHAMMADIYAH MENCERAHKAN BANGSA

Ari Susanto

TEMA Tanwir Muhammadiyah "Beragama yang Mencerahkan" sarat makna mendalam tentang Keindonesiaan. Beragama yang autentik diperlukan ditengah menjamurnya politik tuna adab, yang menegasikan identitas Keindonesiaan. Keterbelahan bangsa Indonesia dalam dua arus besar politik nasional secara langsung menghadirkan dua kutub yang berlawanan. Saling serang tidak dapat dihindarkan dan fanatisme buta menambah tensi politik terus memanas. Produksi *fake news*, *hoaks*, *black campign* , cacian dan umpatan di ruang media sosial dari dua kubu menjadikan politik tidak beradab (tuna adab).

Politik tuna adab adalah kotor dan menjijikan. Watak politik tuna adab cenderung akan menjauhkan kedua kutub dan mempertajam perlawanan. Alih-alih kedua kubu adu visi-misi dan program kebangsaan, ruang media sosial hanya dijadikan ajang saling serang yang kosong gagasan. Politik telah menjauh dari ajaran autentik agama, disinilah beragama tidak lagi mencerah-

kan. Filsafat negara yang tertuang dalam sila pertama Pancasila adalah sumber autentik identitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, beragama hendaknya mampu memancarkan cahaya kemajuan bukan sebaliknya yang menciptakan kegelapan sebagaimana politik tuna adab diatas. Agama itu layaknya bintang penuntun perjalanan hidup manusia ke arah yang maju dan berkeadaban, orang yang beragama tentu harus mencerahkan dan memajukan peradaban.

Beragama yang Mencerahkan

Tema ini mengajak segenap lapisan anak bangsa untuk merenungkan kembali hakikat autentik agama. Menurut Amin Abdullah, Profesor Teologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, agama-agama harus menampilkan nilai-nilai universalitas. Nilai universal ini adalah sumber autentik orang beragama. Sebagaimana misalnya nilai *welas asih* (kasih sayang) adalah nilai-nilai agama-agama dengan penyebutan yang beragam seperti Rahman dan Rahim, Belas Kasih, Cinta Kasih. Nilai itu terpancar dalam hati nurani, hati yang memancarkan empati dan simpati. Dengan hati yang empati tentu akan mengasihi seluruh makhlum di alam semesta, sebagaimana dikenal dalam Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Pemilihan diksi "beragama", bukan misalnya "berislam" menggambarkan Muhammadiyah menghormati keberadaan agama-agama di Indonesia. Secara langsung, Muhammadiyah menyampaikan bahwa bangsa yang plural ini adalah modal untuk membangun Indonesia yang beradab, terkhusus menarasikan politik yang penuh adab.

Muhammadiyah sejak kepemimpinan KHA Dahlan telah mengajarkan keterbukaan, menurut keterangan murid KHA Dahlan, H.M. Sudja', tidak heran saat murid-murid non-muslim *kweekschool* tertarik dengan model pemahaman keagamaan KHA Dahlan. Dari sini nampak pesan utamanya, KHA Dahlan tidak mengajarkan untuk mengislamkan orang, namun beliau melakukan kontruksi paradigma meyakini agama secara mendalam yakni beragama dengan benar.

Bagunan paradigma beragama yang benar, sampai saat ini masih dapat dibuktikan. Melalui Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) paradigma ini terus di gulirkan melalui pengajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. PTM yang berada di Kupang, Sorong, Papua diminati oleh kalangan non muslim. Tanpa takut dan ragu mahasiswa non muslim belajar di PTM. Tercatat lebih dari 70% mahasiswa PTM di Kupang dan Sorong adalah non--muslim.

Muhammadiyah mengajarkan beragama yang substantif, tidak sekadar beragama sebatas identitas. KHA Dahlan pernah di tuduh kafir atau menyimpang dari Islam karena tidak mencerminkan identitas Islam menurut masyarakat setempat pada zamannya. Tuduhan itu semata-mata karena KHA Dahlan mengenakan jas yang dipakai pemerintah belanda saat itu dan memainkan biola yang notabene budaya dari non-Islam.

Beragama yang substantif tercermin dalam tafsir al'maun. Salat tak sebatas menggerakkan tubuh yang sebatas melahirkan kesalehan individual, namun bergerak melahirkan kesalehan sosial (amal shaleh). Kesalehan sosial itu oleh Muhammadiyah di

lembagakan dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial. Beragama yang mencerahkan mengutib Haedar Nashir menghadirkan perilaku ihsan. Perilaku ihsan itu dapat digambarkan dengan kemampuan manusia secara ikhlas berbuat kebaikan secara terus menerus tanpa butuh imbalan, baik materi ataupun pujian-pujian. Perilaku ihsan inilah berhati nurani yang welas asih.

Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 257 diterangkan dengan kalimat *yukhrijuhuum minazh-zhulumati ilan-nuur*. Senantiasa Allah akan mengeluarkan kamu sekalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Jalan untuk menuju kepada sesuai yang terang itu, dalam kehidupan dunia harus mengasah kelembutan hati dan menguasai ilmu pengetahuan. Kebodohan itu gelap, dengan belajar akan menjadi pintar, pintar dan cerdas itulah cahaya.

Dari uraian diatas, menghadirkan sikap keberagamaan yang mencerahkan setidaknya memiliki karakteristik berikut; *pertama*, agama harus menghadirkan nilai universalitas diruang kebangsaan, kenegaraan dan kemanusiaan global. *Kedua*, agama tidak sebatas menjadi pembeda (identitas semu), namun harus menjadi pemahaman yang mendalam dan substantif. *Ketiga*, beragama harus menghadirkan hati nurani yang terpancar dalam rasa simpati dan empati bukan menghadirkan caci maki dan permusuhan. *Keempat*, menjadikan pemeluk agama berakhlam mulia, berperan positif, membangun kemajuan. Kelima, Keterbukaan dialog lintas iman.

Beragama tertuju kepada pemeluk, bukan tertuju kepada agama. Agama pada dasarnya adalah sumber kebaikan, sumber

etika dasar, sumber welas asih, sumber kedamaian. Tafsir agama yang serampangan, yang hanya menegaskan identitas akan menghadirkan perlawanan. Dalam kontestasi politik saat ini, watak dasar dari keberagamaan yang mencerahkan adalah melahirkan politik yang santun dan beradab. (Sumber: IBTimes.ID, 15 Februari 2019).

POLITIK CINTA KASIH NEGARAWAN

Piet Hizbullah Khaidir

AGAMA boleh saja berbeda. Haluan politik bisa saja bersebe-rangan. Tetapi, pikiran, tindakan, kecenderungan dan pemihakan ketika Negara Indonesia yang memanggil untuk berkiprah dan berjuang, masing-masing perbedaan agama dan haluan politik diluruhkan. Begitupula, pergaulan keseharian, persahabatan kemanusiaan dan tutur-sikap tetap mencerminkan pengedepanan akal budi dan adab. Bukan nafsu politik dan nafsu angkara untuk meniadakan yang lain nya.

Kira-kira itulah kesan yang dapat kita tangkap dari belajar sejarah sikap dan tutur tindak-tanduk politik para negarawan pejuang dan pahlawan kita. Maka mungkin tidak berlebihan jika kita menyebut sikap dan tutur tindak-tanduk politik mereka dengan politik cinta kasih. Di tengah suasana hiruk-pikuk politik jelang Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang, yang terkadang menggunakan argumen keagamaan yang saling meniadakan, memamerkan kesalehan untuk tujuan politik sesaat, dan pola pi-

kir kebangsaan yang picik, tentu pembelajaran politik cinta kasih dari para negarawan itu cukup relevan sebagai pembelajaran politik bagi siapa saja yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif ataupun calon presiden calon wakil presiden, pun juga bagi para pendukung masing-masing kubu.

Politik Cinta Kasih sebagai Ajaran Agama

Politik cinta kasih menegaskan suatu pemahaman terhadap dua pilar, ajaran agama dan cita kebangsaan, yang tidak berada hanya dalam wilayah pengetahuan (kognisi). Dua pilar yang bernilai kebaikan dan kebajikan itu diyakini, dihayati, dan diamalkan dalam kancah kemanusiaan, kenegaraan dan kebangsaan sebagai upaya mengabdi kepada Tuhan.

Keyakinan yang menjadi *worldview* politik cinta kasih adalah jika seseorang berbuat baik terhadap sesamanya dalam ruang sosial, ekonomi, politik dan bahkan keagamaan, pastilah penghuni langit (Tuhan, malaikat dan ruh orang-orang saleh) akan meridhoi dan membalasnya dengan rahmat kebajikan serupa atau bahkan lebih melimpah. Keyakinan ini tidak berhenti dalam keyakinan dan pengetahuan belaka, melainkan dalam amal nyata dan gerakan konkret.

Para pendukung politik cinta kasih selalu mengedepankan kebajikan umum dari pada kepentingan pribadi. Dalam konteks kebangsaan, mereka tidak akan pernah sekalipun berpikir dan bertindak dalam kerangka "bangsa untukku", melainkan akan selalu berpikir dan bertindak dengan kerangka sikap "aku untuk bangsa".

Menurut mereka, berpikir dan bertindak dalam kerangka kebajikan umum seperti tersebut di atas adalah contoh konkret ajaran agama para Nabi dan Rasul. Misalnya ajaran Nabi Isa as. agar tidak membalas kezaliman dan penganiayaan dengan perbuatan serupa. Begitupula ajaran rekonsiliasi politik tanpa dendam yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad Saw ketika melakukan *fath*makkah terhadap musuh-musuh politiknya yang sangat kejam.

Bangsa Untukku vs Aku Untuk Bangsa

Salah satu contoh wujud dari pola pikir dan sikap politik cinta kasih adalah "aku untuk bangsa". Ini tentu saja berbeda dengan 'bangsa untukku'. Yang pertama, menunjukkan pola pikir dan sikap politik dengan landasan pengabdian kepada bangsa. Selalu berpikir tentang apa yang dapat dikontribusikan untuk Negara dan bangsa. Sedangkan yang kedua, berpikir bagaimana memperoleh suatu keuntungan dari bangsa ini. Bangsa dituntut untuk memberikan keuntungan dan sumbangsih nyata pada dirinya, kelompoknya dan golongannya.

Pada masa penjajahan, yang pertama ditunjukkan oleh sejarah sebagai cara berpikir dan sikap para pahlawan-pejuang pendiri Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua merupakan cara berpikir dan sikap para pengkhianat bangsa, komprador dan antek penjajah kompeni.

Pada masa awal kemerdekaan dan kini, nilai-nilai dari cara berpikir dan sikap yang pertama itu adalah cara berpikir dan sikap para pemimpin Negara Republik Indonesia dan para nega-

rawan yang berkontribusi hebat terhadap bangsa ini. Sedangkan cara berpikir dan sikap yang kedua adalah cara berpikir dan sikap para penganut politik picik yang hanya berpikir untuk dirinya, kelompok dan golongannya semata. Dengan cara meminta jabatan banyak, sedangkan peruntukannya bukan untuk kemajuan bangsa, melainkan hanya untuk kelompok dan golongannya.

Sederet nama yang bisa disebutkan seperti Sukarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, KH. Abdul Wahid Hasyim, MM. Maramis, PB. Sudirman, adalah para pejuang dan negarawan yang tidak sempat berpikir untuk keluarganya. Karena yang ada dalam pikiran mereka hanya bagaimana bangsa Indonesia terbebaskan dari penjajahan dan semakin makmur. Guru para aktifis Republik, HOS Tjokroaminoto tak pernah lelah menyediakan waktunya dan menjadikan rumahnya untuk berkumpul bagi anak muda RI agar cerdas, berpikir maju dan berjuang dengan hebat untuk kemerdekaan dan kebesaran bangsa Indonesia.

Jauh sebelum itu, KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari, dua ulama besar yang tersambung nasabnya sebagai keluarga, pendiri dua ormas keagaman terbesar di Indonesia, telah menyumbangkan jiwa, raga, harta benda dan seluruh yang dimilikinya untuk berkiprah dalam gerakan sosial keagamaan dan pendidikan demi tercapainya kemerdekaan RI. Agama sebagai elan vital gerakan, bagi mereka, harus menyumbangkan nilai positif dan kebajikan umum bagi kemajuan dan pencerdasan bangsa. KH. Hasyim Muzadi sampai mengatakan bahwa Muhammadiyah dan NU itu bagai sepasang sandal. Dalam kancah kebangsaan

dan keagamaan di Indonesia, tidak bisa ditinggalkan salah satunya.

Yang menarik lagi adalah kisah persahabatan Mr. Kasimo dan Muhammad Natsir. Dua tokoh politik berbeda agama dan haluan politik. Yang pertama berasal dari Partai Katolik Indonesia. Yang kedua berasal dari Partai Masyumi yang berbasis Islam. Mereka bisa berdebat habis bahkan sampai memerah muka mereka karena membahas suatu gagasan dan persoalan kebangsaan. Namun, ketika pulang dari kantor parlemen, karena salah satu dari beliau berjalan kaki, dan yang lainnya naik sepeda ontel, tanpa basa-basi, yang naik sepeda menawarkan kepada yang satunya untuk ikut berbonceng naik sepeda. Alangkah indahnya, jika ajaran agama sebagai dasar politik cinta kasih, bukan sebaliknya sebagai dasar politik identitas belaka untuk meniadakan yang lainnya. Untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kelompok dan golongannya.

Agama Mencerahkan, Agama untuk Semua

Agama harus mencerahkan. Kebajikan umum ajaran agama perlu dipromosikan sebagai arus utama kebajikan untuk semua. Dalam konteks politik dan keagamaan, pilihan politik cinta kasih yang didasarkan pada ajaran agama yang mencerahkan memiliki landasan rasionalnya. Bagi umat beragama, tidak perlu merasa kuatir bahwa berbuat kebajikan untuk semua bangsa Indonesia akan menjadikan berdosa dan berkhianat kepada agamanya. Justru dalam konteks kesalehan dan kebajikan umum untuk ber-

buat terbaik bagi sesama merupakan ajaran agama yang paling agung. Pilihan politik rasional (*rational political choice*) melakukan yang terbaik bagi para konstituen dengan program yang terukur dan tepat sasaran akan membuatnya secara konsisten dikenal dan dipilih dengan baik.

Sebagai kesimpulan, politik cinta kasih adalah simpul hebat pengejawantahan ajaran agama yang mencerahkan dalam ruang publik politik. Dan harus dipromosikan oleh seluruh pejuang politik sejati dan negarawan Indonesia demi tercapainya Indonesia yang hebat dan berkemajuan. *Wallahu a'lam.* (IBTimes.ID, 12 Maret 2019).

4

Risalah Pasca Tanwir

MEMAKNAI TANWIR BENGKULU

Husni Amriyanto Putra

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bengkulu sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tanwir Tahun 2019. Acara Sidang Tanwir ini dibuka secara resmi pada tanggal 15 Februari dan akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2019. Pengurus Muhammadiyah dari seluruh wilayah Indonesia akan berkumpul dan bersidang selama tiga hari di bumi Raflesia. Sebagai bagian dari masyarakat Bengkulu, sudah selayaknya ikut bersuka cita dan merasa bergembira dengan perhelatan tingkat nasional ini, mengingat hal itu merupakan amanah yang sangat langka. Sedikit banyak, potensi yang dimiliki Bengkulu menjadi lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui organisasi massa yang memiliki Amal Usaha terbesar itu. Tulisan ini mencoba untuk memaknai Tanwir Bengkulu dan gerak langkah yang berkemajuan yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah.

Sidang Tanwir

Sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, Tanwir merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar. Pasal 24 ayat (1) AD Muhammadiyah menyebutkan bahwa, "Tanwir ialah Permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat". Pada ayat (2) dalam pasal yang sama juga diatur tentang anggota Tanwir yang terdiri atas; Anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Wakil Wilayah dan wakil Pimpinan Organisasi Otonom (Ortom) Tingkat Pusat. Ketentuan tentang unsur anggota Tanwir ini diatur lebih detail dalam ART.

Selain mengatur anggota Tanwir, ART Muhammadiyah juga mengatur tentang peserta Tanwir, yakni terdiri atas wakil Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) tingkat Pusat sebanyak 2 (dua) orang dan undangan khusus dari kalangan anggota Muhammadiyah yang ditentukan oleh PP. PP Muhammadiyah juga dapat mengundang pihak-pihak tetentu sebagai peninjau dalam Tanwir. ART juga mengatur tentang hak anggota, peserta dan peninjau.

Mengacu pada pasal 24 ayat (3) AD, setiap periode kepengurusan, Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Tanwir sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali. Dalam perhelatan sidang Tanwir ini, agenda nya berisi laporan PP, masalah-masalah yang oleh Muktamar atau menurut AD ART yang dapat diserahkan kepada Tanwir. Selain itu, Tanwir juga membicarakan masalah-masalah pendahuluan yang akan dibahas dalam Muktamar. Terakhir, Tanwir juga akan membicarakan masalah-maslah yang dianggap mendesak dan tak dapat ditangguhkan sampai diselenggara-

kannya Muktamar. Untuk mengakomodasi masukan dari bawah, Tanwir juga dapat membicarakan usul-usul yang dianggap perlu. Sebagai organisasi yang terbuka, di sela-sela Tanwir, penyelenggara juga dapat mengadakan acara-acara tambahan yang dapat diatur oleh panitia penyelenggara. Sehingga, acara rangkaian acara Tanwir tidak hanya menjadi konsumsi internal Muhammadiyah saja, melainkan juga dapat dikonsumsi oleh publik.

Sepanjang pengetahuan penulis, Tanwir Bengkulu ini merupakan Tanwir yang kedua selama kepengurusan PP Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haedar Nashir. Tanwir pertama pasca Muktamar Makassar diselenggarakan di Ambon Tahun 2017. Selain membahas masalah-masalah rutin, Tanwir Ambon melahirkan keputusan penting yang dikenal dengan Resolusi Ambon. Sebagai hasil dari Tanwir, Resolusi ini akan menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi.

Dalam tradisi Muhammadiyah, tempat pertemuan selalu diselenggarakan secara bergilir. Biasanya, pertimbangan wilayah menjadi faktor dalam menentukan lokasi pertemuan. Muktamar sebagai wahana permusyawaratan tertinggi misalnya, selalu diusahakan diselenggarakan secara bergantian antara Jawa dan luar Jawa, atau wilayah Barat dan Timur. Tak ubahnya dengan Muktamar, Tanwir pun diselenggarakan dengan mempertimbanfkan wilayah. Oleh karenanya, Tanwir Bengkulu merupakan hasil konvensi dari adanya pertimbangan wilayah. Ambon merepresentasikan wilayah Timur dan Bengkulu mewakili wilayah Barat. Dengan demikian, setiap wilayah akan nemiliki pengalaman yang sama dalam menyekenggarakan perhelatan permusyawaratan

tingkat nasional dan dapat membagi engelaman berdakwah dengan wilayah lainnya. Begitulah cara Muhammadiyah menunjukkan kolektivitas dan kolegialitas dalam berorganisasi.

Tanwir Bengkulu

PP Muhamnadiyah telah menetapkan PWM Bengkulu sebagai tuan rumah Tanwir 2019. Penetapan ini tentunya telah melewati berbagai pertimbangan strategis. Untuk menjadi tuan rumah Tanwir, PWM tertentu harus meminta ke PP. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, maka diputuskanlah lokasi yang dianggap mampu sebagai tuan rumah. Untuk tuan rumah Tanwir 2019, selain Bengkulu, PWM Aceh, PWM Babel dan PWM Papua Barat juga tercatat sebagai pelamar. Namun, PP Muhammadiyah menetapkan PWM Bengkulu sebagai tuan rumah.

Dengan melihat rekam jejak gerak langkah Muhammadiyah di Bengkulu, sebenarnya tidak heran jika PWM Bengkulu dipercaya menjadi tuan rumah Tanwir. Dalam banyak hal, Muhammadiyah Bengkulu telah membuktikan kredibilitasnya dalam menjalankan dakwah Muhammadiyah dari tahun ke tahun. Peran alumni *Mu'allimin* dan *Mu'allimat* serta alumni pondok Shobron UMS yang tersebar di Bengkulu, samakin memperkuat barisan dakwah Muhammadiyah. Tinta emas gerak langkah Muhammadiyah di Bengkulu tidak hanya bisa dibaca dalam beberapa tahun terakhir saja, melainkan juga sejak zaman pergerakan perjuangan kemerdekaan.

Seperti yang banyak dicatat dalam sejarah, Muhammadiyah Bengkulu sudah "menggeliat" dengan penuh kegembiraan

sejak sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, Bung Karno pernah menjadi pengurus Majelis/bagian Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu. Sang Proklamator juga pernah berkecimpung sebagai pendidik di Madrasah Muhammadiyah selama berada dalam pengasingannya di Bengkulu. Bung Karno memang fenomenal dalam kaitannya dengan gerakan dakwah Muhammadiyah di Bengkulu, namun sesungguhnya gerak Muhammadiyah di bumi Raflessia ini sudah lama berkembang seiring dengan hadirnya para Muballigh Muhammadiyah yg berasal dari Jawa dan Minangkabau.

Jika mengamati sejarah Muhammadiyah di Bengkulu, kita dapat mencatat adanya akselerasi gerakan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Pesatnya perkembangan dakwah Muhammadiyah beriringan dengan pesatnya perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Peran-peran sosial kemasyarakatan Muhammadiyah semakin terlihat dengan aktivitas warganya dari berbagai bidang. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran kolegial para pengurusnya, sebagai ciri khas Muhammadiyah.

Perkembangan AUM yang sangat pesat di Bengkulu menunjukkan bahwa gerak langkah dakwah Muhammadiyah diterima oleh masyarakat. Semula tiada menjadi ada, semula kecil menjadi besar, yang sudah besar melahirkan AUM-AUM baru. Tentunya, hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat, termasuk aparat pemerintahan di Bengkulu terhadap misi dakwah Muhammadiyah melalui AUM yang dibangun. Komunikasi dan kedekatan dengan para pengambil keputusan juga menjadi kunci keberhasilan dakwah yang dilaksanakan. Strategi

komunikasi yang efektif dengan birokrasi pemerintahan sangat membantu upaya membangun jalan dakwah.

Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang sebelumnya terlahir sebagai STKIP Muhammadiyah, merupakan salah satu contoh AUM yang perkembangannya sangat pesat dan intens dalam mensyiarkan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*. SD Muhammadiyah Ujung Tanjung, di Kabupaten Lebong, juga termasuk salah satu yang dapat disebut sebagai contoh pesatnya perkembangan AUM di propinsi ini. Tentu masih banyak lagi AUM yang berkembang pesat dan tak mungkin disebutkan satu persatu. Dengan pesatnya perkembangan inilah, kita dapat memaknai Tanwir Bengkulu ini sebagai Tanwir yang mencerahkan bagi gerakan dakwah Persyarikatan.

Langkah Berkemajuan

Tanwir Ambon Tahun 2017 melahirkan Resolusi Ambon. Pokok-pokok fikiran dalam lima butir Resolusi Ambon tersebut memuat beberapa catatan tentang pentingnya keadilan sosial, termasuk keadilan hokum dan ekonomi bagi semua rakyat Indonesia. Harapannya, dalam Tanwir Bengkulu ini, Muhammadiyah juga dapat melahirkan pemikiran yang lebih kongkret untuk mengimplementasikan berbagai pokok fikiran yang telah ada. Hal ini sangat berguna dalam rangka meneguhkan tekad Muhammadiyah menjadikan umat sebagai umat Islam yang berkemajuan, bukan Islam *sontoloyo* seperti yang pernah dilansir oleh Bung Karno.

Mengingat Tanwir 2019 ini merupakan Tanwir menjelang Muktamar 2020, tentuya keputusan-keputusan strategis hasil

Tanwir juga harus segera dapat diterjemahkan dalam denyut langkah dakwah Muhammadiyah. Sehingga, dalam tahun politik, jelang pilpres ini, warga Muhammadiyah tidak terjerumus dalam pergumulan pusaran politik atas dasar kepentingan sesaat.

Derap deru langkah Muhammadiyah Bengkulu yang gegap gempita dan relatif berkembang sangat cepat, ada baiknya menjadi *benchmark* bagi wilayah lain, tentu tidak terlepas dari ikhtiar untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Dengan menderap-derukan langkah itulah, keniscayaan akan datang, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah tujuan didirikan nya Muhammadiyah sebagai amanat yang termaktub dalam AD-ART Muhammadiyah. Kita berharap ada Resolusi atau

Deklarasi Bengkulu yang lebih menderap-derukan langkah dakwah Persyarikatan Muhammadiyah pada masa yang akan datang.

GERAKAN MUHAMMADIYAH PASCA-TANWIR BENGKULU

David Krisna Alka

ISLAM berkemajuan jelas melekat dengan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah dari dulu hingga kini. Sudah banyak catatan soal Islam berkemajuan yang berkaitan dengan pemahaman awal lahirnya Muhammadiyah yang digagas KH Ahmad Dahlan (1868-1923). Dalam makalah kuliah umum di Monash University, 16 Februari 2018, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menguraikan tentang pandangan Islam berkemajuan. Inti makalah itu, Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk membangun peradaban yang utama dan menjadi rahmat bagi semesta. Inilah yang disebut 'Islam berkemajuan' (*Din al-Hadhara*h) khas Muhammadiyah itu.

Risalah Bengkulu

Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51 di Bengkulu belum lama ini menghasilkan rekomendasi risalah Bengkulu. Rekomendasi itu

diharapkan dapat menguatkan kemajuan Muhammadiyah, yang sudah tentu menyatu dengan gagasan Islam berkemajuan dan beragama yang mencerahkan. Namun pertanyaannya, seperti apa Muhammadiyah yang berkemajuan dan mencerahkan itu?

Masih menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (2018), Islam atau beragama yang berkemajuan itu menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diksriminasi. Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan. Selain itu, anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi, terutama kebudayaan Indonesia. Kata kunci yang penulis garis bawahi dalam penjelasan Haedar Nashir ini ialah kebudayaan Indonesia.

Jadi, tak cukup sekadar Islam berkemajuan dan beragama yang mencerahkan, tetapi Muhammadiyah juga perlu bergerak lebih cepat dan kuat dalam ranah kebudayaan dengan memanfaatkan segala potensi amal usaha dan gerakan pendidikan yang dimilikinya.

Berkebudayaan

Peran strategis Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil sangat penting untuk memberi solusi dan jawaban atas ber-

bagai masalah keumatan dan kebangsaan berkaitan dengan kebudayaan, seperti karakter bangsa, kultur kepemimpinan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal. Karenanya, untuk meraih cita-cita Islam berkemajuan, kebudayaan hendaknya menjadi tulang punggung gerakan persyarikatan, yang juga harus diatur dalam kebijakan utama elite Muhammadiyah di pusat maupun daerah. Akan tetapi, bukan dimaknai kebudayaan untuk kepentingan elite-elite Muhammadiyah saja, melainkan juga kebudayaan untuk umat Muhammadiyah dan rakyat Indonesia.

Perlu direnungkan kembali catatan Abdul Munir Mulkhan (2009) yang mengatakan kritik Kuntowijoyo (Muslim tanpa Masjid) bahwa Muhammadiyah ialah gerakan budaya tanpa kebudayaan penting menjadi acuan. Daya kreatif Islam berkemajuan terperangkap birokrasi organisasi, gurita pendidikan, dan rumah sakit sehingga terasing dari kehidupan kebudayaan rakyat. Ya, apalagi kini, kehidupan kebudayaan rakyat kian berkemajuan.

Harapan dan solidaritas perlu terus dipupuk. Gerakan kebudayaan Muhammadiyah hendaknya mampu memelihara keragaman yang merupakan kekayaan bangsa. Sesungguhnya, Muhammadiyah memiliki peluang sangat besar untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat dari sebuah peradaban baru yang berkemajuan, di samping perlunya Muhammadiyah mengeksplorasi dan mendayagunakan kekuatan kultural dalam tubuh Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu ada dalam kebudayaan Indonesia. Harapannya selain sebagai pelaku, tapi juga tampil sebagai pilar utama pengawal budaya bangsa, menguatkan kearifan lokal, toleransi, dan menyebarkan pesan-pesan agung kebudayaan lokal.

Selain itu tentunya, budaya kemajuan juga mesti menjadi nomor satu. Karenanya, generasi muda Muhammadiyah perlu menumbuhkan etos budaya kreatif. Hal itu karena budaya digital tengah mengukuhkan keberadaannya di tengah kemajuan peradaban manusia abad ini. *Wallahualam.*

MENGGAGAS FIKIH PERDAMAIAN MUHAMMADIYAH

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Di awal tahun 2019, muncul satu gagasan baru untuk menominasikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meraih penghargaan Nobel Perdamaian. Gagasan ini didorong oleh beberapa tokoh, yang kemudian mendapatkan beberapa dukungan dari beberapa pihak (salah satunya, konon, dari Ramos Horta). Rasionalisasi yang diberikan adalah bahwa Muhammadiyah dan NU, salah satunya, berperan dalam melawan radikalisasi dan memberikan beberapa inovasi mengenai ajaran Islam yang berperan dalam 'bina-damai'.

Gagasan ini, bisa jadi, sangat ambisius bagi beberapa pihak. Mungkin banyak yang akan bertanya seberapa jauh Muhammadiyah (dan NU) berperan dalam perdamaian dunia? Muhammadiyah, bisa jadi, punya kontribusi dalam menghadang radikalisme dan memberikan beberapa inovasi Fikih kontemporer yang sangat relevan bagi masyarakat dunia, seperti Fikih air atau Fikih kebencanaan. Namun demikian, gagasan-gagasan "per-

damaian" di Muhammadiyah (juga NU) masih terkesan bersifat temporer dan belum melembaga dalam pemikiran keislaman yang bisa dibawa ke kancah internasional.

Artikel ini berada dalam semangat untuk mengisi celah tersebut dengan menggagas beberapa arah menuju rumusan "Fikih perdamaian dunia" dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional—area yang sudah saya geluti sejak satu dekade silam. Gagasan tentang perdamaian dalam studi Hubungan Internasional sudah sangat berkembang. Namun demikian, perspektif "Islam" belum banyak bicara dalam konteks perdamaian kontemporer. Justru, munculnya ISIS, gelombang radikalisasi dan populisme, serta cara berpikir tentang 'Jihad' yang salah kaprah justru menjadikan Islam sebagai tersangka alih-alih pemberi solusi atas konflik dan masalah terorisme yang melanda dunia Islam hari ini.

Muhammadiyah sebetulnya sudah membuka jalan ke arah tersebut dengan menegaskan posisinya, misalnya, terhadap Pancasila sebagai '*Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah*'. Posisi teologis--intelektual ini memberikan Muhammadiyah afirmasi terhadap tatanan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Yang belum ada dan saya kira ini penting untuk didiskusikan dalam perspektif studi Hubungan Internasional—bagaimana posisi dan kontriusi Muhammadiyah terhadap tatanan internasional saat ini?

Tiga Posisi Teoretis tentang Perdamaian Dunia

Saya ingin memulainya dengan mengupas perdebatan tentang konsepsi perdamaian dunia yang menjadi titik tekan utama per-

debatan para ilmuwan Hubungan Internasional hari ini. Setidaknya ada tiga pendekatan yang saling berkontestasi dalam kajian perdamaian global, yang ketiganya memiliki klaim-klaim sendiri untuk menuju perdamaian dunia.

Perspektif pertama berasumsi bahwa perdamaian dunia bisa ditempuh melalui 'perimbangan kekuasaan' dan, dalam titik tertentu, pengaturan keamanan kolektif oleh negara-negara bangsa. Bagi banyak pengkaji keamanan internasional, perdamaian bukan sesuatu yang *by default* bisa dicapai dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan melalui perimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara kekuatan-kekuatan besar. Negara seperti Indonesia, yang dikategorikan sebagai 'kekuatan menengah' (menurut studi terbaru dari Lowy Institute, misalnya), punya kontribusi dengan membangun keamanan kolektif, yang sudah terbangun di Asia Tenggara sejak tahun 1970an melalui ASEAN.

Perspektif kedua berasumsi bahwa perdamaian dunia bisa ditempuh melalui kerjasama ekonomi, interaksi antar-manusia yang memungkinkan negara-negara bekerjasama, dan penguatan institusi multilateral. Menurut pendekatan yang kerap dikenal sebagai "institusionalisme liberal" ini, organisasi internasional yang memfasilitasi kerjasama ekonomi—baik di tingkat negara ataupun masyarakat sipil transnasional punya peran penting dalam membangun perdamaian. Terbukti, menurut pendapat ini, perang yang bersifat masif bisa dihindarkan sejak tahun 1945 melalui instrument PBB dan organisasi internasional.

Perspektif ketiga berasumsi bahwa perdamaian dunia bisa ditempuh melalui 'keamanan kolektif' dan pembangunan norma tentang perdamaian yang bersifat kosmopolitan. Membangun masyarakat yang resilien terhadap potensi konflik, serta cara berpikir masyarakat yang 'damai' dan mengedepankan solusi perdamaian alih-alih kekerasan, menjadi solusi penting di samping juga membangun tatanan internasional yang terlembaga dan damai. Pada titik ini, agama memainkan peran untuk menghindarkan umatnya dari cara berpikir yang berorientasi kekerasan, kendati juga banyak yang menggunakan agama untuk melegitimasi kekerasan—seperti ISIS, Al-Qaeda, atau penganut *Jihadisme* dalam Islam.

Menuju Fikih Perdamaian: Membayangkan Kontribusi Muhammadiyah

Bagaimana Muhammadiyah bisa berperan di tengah tiga pendekatan tersebut? Mereorientasi ajaran Islam untuk mendorong perdamaian dunia, tentu saja, menjadi penting. Namun, Sebelum masuk ke peran-peran strategis, perlu diketengah kan potensi yang mungkin dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menggagas konsepsi *Fikih* Perdamaian yang sifatnya berkelanjutan.

Kitab Masalah Lima, dokumen "klasik" yang mendasari rumusan *Manhaj Tarjih* Muhammadiyah, telah menggariskan satu pedoman umum, yaitu bahwa dalam masalah-masalah yang terkait dengan *Muamalah Duniawiyah,* maka ijtihad sangat dimungkinkan selama tidak ada larangan.

Terkait dengan hal ini, Prof. Asjmuni Abdurrahman dalam *Manhaj Tarjih* menegaskan beberapa kaidah *ushul Fikih* yang relevan, seperti "*al-ashlu fil muamalati at-tahlil, hatta yaduulud daliil 'ala tahrimihi*" (asal hukum dari 'muamalah' adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya). Konsep lain adalah pengurangan mafsadat dan prinsip "*laa dharaar wa laa dhiraar*" (tidak berbahaya dan tidak membahayakan), menjadi dasar bagi prinsip yang dikenal di dunia Barat sebagai *do no harm*.

Beberapa prinsip *ushul Fikih* ini bisa dikaitkan dengan model-model Fikih kontemporer seperti, misalnya, *Fikih maqasidi* yang digagas oleh Jasser Auda dan jejaring ulama Muslim di Eropa. Dalam kajiannya yang memperkenalkan *Maqasid* sebagai Filsafat Hukum Islam, Jasser Auda berargumen bahwa ada dua prinsip penting dalam *Maqasid* yaitu keterbukaan (*openness*) dan 'perbaruan-diri' (*self-renewal*).

Konsekuensi dari dua prinsip tersebut (di antara prinsip yang lain), menurut Auda, adalah pentingnya dialog antara hukum-hukum yang dirumuskan melalui *Fikih* dengan sains dan filsafat. Fikih, dengan demikian, adalah sesuatu yang sifatnya terbuka, membuka diri untuk pembaharuan (*tajdid*), dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan prinsip semacam ini, menjadi memungkinkan bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi kepada perdamaian dunia dengan mengajukan Fikih perdamaian. Sejauh ini, Muhammadiyah sudah menggariskan beberapa produk Fikih kontemporer, seperti Fikih Air atau Fikih Kebencanaan yang menjadi dasar bagi Muhammadiyah untuk bergerak di tingkat nasional. Fikih Perda-

maian, jika bisa dirumuskan, bisa menjadi dasar bagi Muhammadiyah untuk memperluas aktivisme yang telah dibangun ke tingkat global.

Tiga Pemikiran tentang Fikih Perdamaian

Lantas, seperti apa konstruksi Fikih tersebut jika diterapkan dalam praksis gerakan Muhammadiyah? Saya membayangkan ada tiga area yang perlu menjadi perhatian dalam Fikih perdamaian Muhammadiyah, yaitu diplomasi, hukum dan kerjasama internasional, serta etika masyarakat internasional.

Area yang perlu menjadi perhatian adalah etika diplomasi dan politik luar negeri. Sejauh ini, politik luar negeri Indonesia sudah mulai mencoba untuk memediasi proses-proses perdamaian dunia, salah satunya dengan memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang bertikai di Afghanistan, kelompok Muslim di Mindanao, atau perdamaian antara Israel dan Palestina. Beberapa tokoh Muhammadiyah (seperti Dr Surwandono atau Alm Samsu Rizal Panggabean, misalnya) juga sudah terlibat dalam proses-proses negosiasi damai.

Tantangan berikutnya adalah melembagakan upaya ini dengan mendorong (1) formulasi Fikih yang bisa menjadi panduan bagi politik luar negeri Indonesia (atau negara-negara Muslim lain) dalam terlibat ke resolusi konflik yang lebih permanen dan (2) konsepsi bina damai yang bisa menjadi alternatif dari *Jihadisme* yang sarat kekerasan. Muhammadiyah bisa mendorong alternatif penafsiran atas "Jihad", "*Dārul Harb/Kafir*" dengan, mi-

salnya, memberikan landasan teologis atas sistem internasional yang damai.

Dalam konteks ini, memperluas konsep *Dar al-Ahdi wasy Syahadah* ke tingkat global, antara lain dengan menjustifikasi sistem internasional yang berbasis "aturan" (*rules-based international* order) sebagai alternatif menuju perdamaian dunia, menjadi menarik untuk menjadi alternatif.

Area berikutnya adalah mereformulasi hukum internasional dengan membangun interpretasi ulang atas beberapa prinsip hukum/politik internasional dalam perspektif Islam. Saat ini, misalnya, beberapa ilmuwan Hukum dan Politik Internasional membangun interpretasi dengan referensi atas pemikir Eropa seperti Immanuel Kant, Hugo Grotius, Emerich de Vattel, atau Hans J Morgenthau yang kontemporer.

Namun, sebagaimana diulash David Traven dalam Disertasinya di Ohio State Uniersity, *The Universal Grammar of Laws of War* (2013), konsepsi-konsepsi tentang perdamaian juga muncul dalam pemikiran politik Islam, termasuk dalam Al-Qur'an, Hadits, dan pemikir-pemikir Islam dari Abad Pertengahan hingga Modern.

Muhammadiyah bisa membangun konsepsi alternatif tersebut dengan mengkaji, misalnya, sejauh mana prinsip-prinsip perdamaian dalam Islam bisa berdialog dengan hukum internasional dan konsepsi politik yang mendasarinya, seperti *Jus Gentium* dan ide tentang *Responsibility to Protect* yang saat ini sudah muncul sebagai norma dalam politik internasional.

Selain kedua elemen tersebut, Muhammadiyah juga perlu mengembangkan Fikih yang lebih spesifik untuk aktivisme perdamaian yang tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh masyarakat sipil transnasional. Beberapa anak muda Muhammadiyah sudah mulai terlibat dalam gerakan tersebut. Ke depan, mereka perlu dibekali dengan interpretasi Fikih untuk bisa percaya diri ketika berhadapan dengan anggota organisasi Islam lain yang secara global juga punya pengaruh dalam politik Islam global, seperti Ikhwanul Muslimin, Salafi, Hizb at-Tahrir, dan jejaring-jejaring transnasional mereka.

Fikih perdamaian yang mendorong interpretasi 'damai' atas Jihad atau 'Masyarakat Islami' akan sangat diperlukan. Sehingga, ketika anak-anak muda Muhammadiyah tampil dalam pentas internasional, tidak ada rasa inferior untuk berdialog dengan tradisi pemikiran Islam 'yang lain' yang tidak mendorong pada solusi damai. Hal ini juga mengimplikasikan perlunya penerjemahan Fikih-Fikih Muhammadiyah ke dalam Bahasa Inggris dan Arab.

Artinya, jika Muhammadiyah serius untuk mendorong perdamaian dunia, dengan atau tanpa hadiah Nobel Perdamaian, sudah saatnya Muhammadiyah serius dengan internasionalisasi dan inovasi pemikiran keagamaan. Muhammadiyah punya modal yang sangat besar untuk melakukannya, dengan anak-anak muda yang progresif dan berwawasan global. Inovasi pemikiran yang cermat akan sangat membantu proses internasonalisasi tersebut. (Sumber: IBTImes.ID, 25 JANUARI 2019).

TANWIR, PERKADERAN DAN CABANG ISTIMEWA

Husni Amriyanto Putra

TANWIR dalam sistem permusyawaratan di Persyarikatan Muhammadiyah merupakan perhelataan sidang di bawah Muktamar. Tanwir tahun 2019 merupakan perhelatan yang strategis mengingat pelaksanaannya diadakan menjelang Muktamar Solo tahun depan. Sebagaimana diketahui, Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah, wadah pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh pimpinan sampai tingkat Daerah.

Tanwir tahun ini diadakan di Bengkulu, wilayah yang memiliki sejarah cemerlang dalam perjalanan Muhammadiyah. Harapannya, keputusaan Tanwir kali ini tetap melahirkan pemikiran yang cemerlang, seperti halnya tanwir-tanwir terdahulu. Paling tidak, Tanwir Bengkulu diharapkan dapat mempertajam peran-peran kelembagaan untuk dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sebagai gerakan Islam dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, Muhammadiyah senantiasa melakukan *ijtihad* dalam berbagai bidang. Tak heran, Muhammadiyah dapat membangun Amal Usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah juga melakukan gerakan perkaderan di semua lini dengan metode yang sangat variatif. Sasaran perkaderan tidak hanya anggota atau simpatisan yang ada di Nusantara, melainkan juga WNI yang bermukim di luar negeri dan juga warga negara non Indonesia.

Perkaderan dan Nasionalisme

Perkaderan di Muhammadiyah bertujuan untuk menghasilkan tenaga inti penerus visi misi Muhammadiyah (*Sistem Perkaderan Muhammadiyah*, 2015). Perkaderan juga penting untuk menjamin bahwa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sudah bertebaran di mana-mana, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*. Oleh karenanya, sistem perkaderan selalu mendapat perhatian, baik dri perspektif metode pelaksanaan, sasaran maupun target yang akan dicapai.

Muhammadiyah mengenal Perkaderan Utama dan Perkaderan Fungsional. Perkaderan Utama menitikberatkan pada proses yang terstruktur, menggunakan kurikulum dan waktu tertentu berdasarkan tingkatan, misalnya *Dārul Arqam* (DA) dan *Baitul Arqam* (BA). Sedangkan Perkaderan Fungsional lebih menitikberatkan pada proses yang lebih alamiah dengan aktivitas yang kurang terstruktur, misalnya pengajian-pengajian komunitas dan sejenisnya. Untuk melaksanakan Perkaderan Utama, dibentuklah

Korps Instruktur melalui Pelatihan Instruktur di berbagai tingkat-an, termasuk di AUM.

Sebagai ormas keagamaan yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyadari akan hal itu, perkaderan di Muhammadiyah selalu menekankan pentingnya penanaman *ideologi*, *penguatan organisasi*, *pengembangan wawasan* dan *sosial kemasyarakatan*. Hal ini penting agar nasionalisme kader Muhammadiyah tidak mudah luntur seiring dengan menjamurnya organisasi keagamaan yang berorientasi *trans-nasionalisme*.

Kader Muhammadiyah sejak dulu dididik untuk mencintai tanah air, *habbul wathan minal iman*. Tokoh Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Jenderal Soedirman, Djuanda dan banyak lagi yang lainnya, merupakan putra bangsa yang ikut aktif memperjuangkan NKRI. Nilai kejuangan, nasionalisme dan loyalitas kepada NKRI selalu ditanamkan kepada semua anggota. Hal ini dapat dibuktikan dengan kerja nyata Muhammadiyah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kebencanaan, kemanusiaan dan sektor-sektor sosial kemasyarakatan lainnya.

Cabang Istimewa

Dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI), para peminat HI mengenal organisasi internasional yang bersifat *trans-nasional*. Meskipun sama-sama melampaui batas yurisdiksi suatu negara, ada perbedaan yang mendasar antara organisasi internasional

(OI) dan organisasi transnasional (OT). Selain aktornya, perbedaan antara keduanya terletak pada sifat keanggotaan. Anggota OI bersifat sukarela, setiap anggota bebas keluar atau masuk ke dalam organisasi, tidak ada ikatan untuk mengikuti aturan organisasi dan loyalitas nasional lebih diutamakan. Sementara itu, OT bersifat mengikat anggotanya, sehingga loyalitas nasional , pelan tapi pasti, akan beralih kepada organisasi di atasnya. Fenomena ini dapat dilihat pada perusahaan global atau lebih dikenal dengan *Multy National Corporations* (MNCs). Pada MNCs, sangat jelas terlihat adanya loyalitas kepada induk organisasi melebihi loyalitas kepada negara tempat MNCs tersebut beroperasi.

Dalam perkembangannya, OT tidak hanya didominasi oleh MNCs, melainkan terjadi juga pada organisasi keagamaan. *Hisbut Tahrir* (HT) salah satu contoh organisasi keagamaan yang bersifat transnasionalistik. Di banyak negara, organisasi semacam ini telah dibubarkan oleh pemerintah nasional masing-masing, termasuk di Indonesia beberapa waktu lalu. Tidak hanya organisasi keagamaan, organisasi teroris dan jaringan narkoba internasional juga dapat dikategorikan sebagai OT. Mereka bergerak di lintas negara, namun tidak memiliki loyalitas kepada negara tempat mereka berasal.

Dalam konteks internasionalisasi, Muhammadiyah tidak memilih bentuk OT. Muhammadiyah lebih memilih istilah Istimewa untuk mengakomodasi gerakan dakwah Persyarikatan yang ada di luar negeri. Maka dari itu, dibentuklah Cabang Istimewa di level negara. Dengan bentuk organisasi seperti itu, nasionalisme kader yang ada di luar negeri akan tetap dapat dijaga oleh Muhamma-

diyah. Implementasi internasionalisasi Muhammadiyah semakin dapat dirasakan tanpa menggerus rasa nasionalisme Indonesia.

Tanwir Bengkulu Dan PCIM

Untuk mengimplementasikan bentuk internasionalisasi Muhammadiyah itu, maka dibentuklah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di beberapa negara. Sampai saat ini, sudah terbentuk 22 PCIM di seluruh dunia (Ridho Alhamdi, 2019). Pengurus PCIM diambil dari kader Muhammadiyah yang tinggal di luar negeri, ada yang sedang meneruskan studi dan ada juga yang memang menetap di negara yang bersangkutan. Prinsipnya, pengurus PCIM adalah warga negara Indonesa. Aktivitas PCIM tidak terlepas dari visi misi Muhammadiyah. PCIM berfungsi menjadi duta Muhammadiyah di luar negeri. Terkait perkaderan, aktivitas PCIM lebih mengedapankan perkaderan fungsional untuk mensyi'arkan gerakan Muhammadiyah dan dakwah Islam di luar negeri.

PCIM sudah terbentuk di beberapa negara, diantara Ingris, Jerman, Perancis, Australia dan Selendia Baru, Mesir, Saudi Arabia, Pakistan, Malaysia dan yang lainnya.. Sayangnya, PCIM belum terakomodasi dalam AD, bahkan ART pun tidak mengatur tentang PCIM. Pembentukan PCIM baru diatur di level SK PP Muhammadiyah, namun secara organisatoris tetap diakui justifikasinya. Barangkali, lama waktu tinggal para pengurus PCIM menjadi petimbangan, mengingat periode kepengurusan di Muhammadiyah mencapai lima tahun, sedangkan yang menjadi pengurus

PCIM biasanya tidak mencapai lima tahun bertempat tinggal di negara yang bersangkutan.

Untuk lebih memantapkan eksistensi PCIM, ada baiknya Tanwir Bengkulu bisa menghasilkan keputusan yang lebih *save* bagi PCIM. Hal ini bisa dilakukan dengan usulan perubahan ART yang mengatur tentang keberadaan PCIM, seperti PC-PC lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga, PCIM memiliki ruang gerak yang lebih luas, termasuk untuk melakukan perkaderan utama yang terstruktur. Proses Perkaderan Utama juga dapat dilakukan dengan lebih tertata. Lebih dari itu, PCIM akan benar-benar efektif untuk menjadi duta Muhammadiyah dalam bingkai Islam berkemajuan. Semoga, Tanwir Bengkulu dapat menghasilkan konsep gerakan internasionalisasi yang lebih *massif*. Selamat mengikuti Tanwir.

JALAN TENGAH MUHAMMADIYAH

Benni Setiawan

BERAGAMA yang mencerahkan. Demikian tema yang diangkat tanwir atau rapat kerja nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun ini yang berlangsung di Bengkulu, kemarin. Tema itu mencerminkan keprihatinan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar Indonesia berbasiskan agama Islam. Semua agama tentu saja mencerahkan. Sejalan dengan ajaran agama, seperti yang dikemukakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, potensi terbesar umat beragama ialah cinta damai, cinta toleransi, cinta membangun, dan cinta persaudaraan. Di situ pula letak kesamaan seluruh agama.

Sayangnya, segelintir penganut beragama memilih sikap ekstrem dengan menonjolkan perbedaan hingga menyampingkan potensi terbesar umat beragama tersebut. Tidak peduli bila pilihannya itu membuat perpecahan di masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terbukti, perilaku-perilaku ekstrem dalam beragama justru menghancurkan

peradaban. Suatu hasil yang sungguh-sungguh jauh dari tujuan agama. Orientasi politik yang mengeras justru menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa. Akibatnya, satu sama lain mudah terbelah, berbenturan, dan bermusuhan secara berhadapan.

Dalam tema Beragama yang mencerahkan, Muhammadiyah ingin menghindarkan umat Islam di Indonesia dari sikap ekstrem yang menghancurkan itu. Islam dalam sejarahnya yang panjang banyak berperan membentuk peradaban tinggi dunia. Penemu dasar ilmu kedokteran ialah seorang muslim. Pencetus aljabar, salah satu cabang matematika, merupakan penganut Islam. Ilmuwan-ilmuwan muslim menjadi perintis sekaligus disegani dalam perkembangan astronomi di masa lampau. Banyak lagi lainnya.

Di Indonesia, ormas-ormas Islam merupakan bagian integral pembentuk peradaban di Indonesia. Muhammadiyah yang berusia lebih dari seabad sudah banyak melahirkan tokoh nasional di berbagai bidang. Muhammadiyah ikut merintis dunia pendidikan nasional yang merupakan akar peradaban bangsa. Tokoh perempuan Muhammadiyah dikenal sebagai pemrakarsa gerakan perempuan hingga lahirnya Kongres Perempuan Pertama pada 1928.

Semua peran tersebut dijalankan dengan memajukan semangat persatuan, bukan menonjol-nonjolkan perbedaan dan memaksakan kehendak. Mereka juga paham betul, tidak ada kemajuan yang berhasil dicapai dengan membenci dan menebarkan nya. Kebencian hanya akan menimbulkan perpecahan, sedangkan kemajuan memerlukan prasyarat mutlak, yaitu persatuan. Omong kosong bila ada orang berkoar-koar mengumbar janji

memajukan bangsa ketika pada saat yang sama menebarkan bibit-bibit perpecahan.

Cinta damai, cinta toleransi, cinta membangun, dan cinta persaudaraan berperan sebagai perekat untuk menjaga persatuan bangsa. Ini yang hendak dimobilisasi Muhammadiyah. Dengan potensi rohani itu beragam suku, umat beragama, dan budaya, bisa tetap hidup berdampingan tanpa gesekan yang memecah belah. Keberagaman pun menjelma menjadi kekuatan.

Muhammadiyah sudah sangat piawai meletakkan dasar-dasar yang mendorong kemajuan Indonesia dengan spirit praktik keagamaan Islam yang tidak ekstrem alias moderat. Kepiawaian itu kita harapkan terus terjaga hingga ikut mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dengan keadilan sosial yang merata. Kita mengapresiasi Muhammadiyah yang konsisten menjalankan Islam *wasatiyah* atau Islam jalan tengah. Karena itulah, dalam menghadapi dinamika politik praktis, Muhammadiyah secara elegan tidak memainkan politik praktis, tapi mendorong kader-kadernya berkiprah di politik praktis.

Elok nian bila dalam menjalankan politik praktis itu semua pihak menampilkan sikap kenegarawanan. Sikap yang menampakkan jiwa besar untuk tidak mengoyak tenunan kebangsaan, berlapang hati menghadapi perbedaan, dan dewasa dalam berkontestasi. (Sumber: http://m.mediaindonesia.com, 16 Februari 2019)

EPILOG

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN:

Perlu Pemuliaan Hati

M. Amin Abdullah

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

BERAGAMA yang mencerahkan demikian tema Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Untuk membahas tentang beragama yang mencerahkan, saya pernah diwawancarai oleh redaksi *Suara Muhammadiyah* tentang ini. Apa sebetulnya agama yang mencerahkan itu? Dan untuk menjawab apa itu? Agama yang mencerahkan, saya harus membagi dua kluster biar lebih mudah dipahami dalam konteks ini. Agama sekarang ini kan terasa lebih terjebak dalam jerat institusi keagamaan. Institusi itu bisa politik, bisa pendidikan, bisa sosial, bisa ekonomi, bisa budaya dan lain sebagainya. Itu di satu sisi. Dan yang kedua sisi keruhanian, sisi spiritualitasnya. Sisi keruhanian, sisi spiritualitasnya itu yang tidak *match*, tidak seimbang dengan perkembangan sisi sosial atau institusi. Terasa memang ada gap yang mendalam, antara keduanya. Akibatnya, orang memang masih beragama tapi terasa tidak

atau kurang begitu bahagia. Nah, gejala begini kan harus segera diselesaikan, dicarikan solusinya.

Bagi saya agama yang mencerahkan itu, indikasinya kalau membahagiakan. Membahagiakan, jika beragama tidak dipenuhi perasaan *su'udhon*, bukan dijejali prasangka buruk, bukan *violence*, bukan kekerasan, bukan diskriminatif, bukan *hate speech,* bukan *hate spin,* bukan buru-buru memviralkan *fake news/ hoaks.* Sifat atau karakter sosial yang buruk ini yang menjadikan beragama tetapi tidak membahagiakan. Maka tugas Muhammadiyah dan organisasi-organisasi keagamaan Islam yang lain harus berani melihat ulang akar keagamaan yang terasa hilang ini. Jangan-jangan keberagamaan kita belum menyentuh pada *qalb* (hati nurani). Agama terlalu dipahami sebagai institusi, sebagai identitas. Tetapi agama sebagai hati nurani kurang dipahami. Dalam Al Qur'an kata *qalb* banyak disebut.

Kenapa saya katakan Agama belum mencerahkan? Hal ini karena Saya memang melihat ada sisi agama yang belum mencerahkan. Mencerahkan itu ada mencerahkan akal dan hati. Saat ini yang lebih dicerahkan hanyalah sisi akalnya saja, hatinya kurang tersentuh, sehingga seolah-olah *hate speech* itu adalah bagian tidak terpisahkan dari agama, padahal itu bukan. *Ijtanibuu katsiiron minadh dhonni*. Hindari dan jauhi itu prasangka. Akal bisa berprasangka tetapi hati yang mengendalikan dan mengeremnya. Karena *inna ba'dlodh dhonni itsmun*. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. *Wa laa tajassasu,* jangan mencari-cari kesalahan orang lain *(Al-Hujuraat*, 12).

Coba kita gali lagi ayat-ayat Al- Qur'an yang terkait dengan hati itu. Karena hati itu pusat ruh. Kita dapat merasakan sesuatu karena ruh. Nah kita harus bisa membuka diri melihat agama yang mencerahkan itu dari sisi ketajaman mata hati. Hati manusia bisa keras (*qasat qulubuhum*), hati manusia bisa buta *(ta'ma al-qulub*). Ketika penyakit-penyakit hati itu mampu kita bersihkan, kita muliakan, maka kita akan masuk golongan yang beruntung, berbahagia. "*Qod aflaha man tazakka*", "sesungguhnya telah menang orang yang membersihkan diri". Membersihkan hati nurani. Karena di situ letak pangkal ruh.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan agar agama bisa mencerahkan? Saya kira menyeimbangkan tuntutan akal dan *qalb*. Lalu bagaimana strategi pendidikan atau kebudayaan untuk menanggulangi hal ini yang harus kita lakukan, entah lewat pendidikan umum, pendidikan keagamaan atau sosial kemasyarakatan. Sekarang ini ada bobot yang tidak seimbang yang diberikan pada peserta didik. Pendidikan lebih cenderung fokus kepada *knowledge and skill*. Ketika bertemu dengan kehidupan masyarakat luas, *knowledge and skill* ini kehilangan nilai (*value*) dan spiritualitas. Nilai dan spiritualitas itu saya melihatnya sebagai unsur tuntutan hati nurani (rasa dan *karsa*) yang lebih tajam dan otentik *(categorical imperative*). Dalam Al Qur'an kan banyak nilai-nilai hati yang jahat yang harus dibersihkan, disembuhkan. Hati itu harus terkait dengan nilai dan spiritualitas. Dan ketika keberagamaan kita kehilangan nilai dan spiritualitas, beragama kita tidak membahagiakan. Sekarang ini, *Knowledge* agama dan *skill* dalam *ber*agama yang terlalu dipri-

oritaskan, sedang pendidikan dan pemuliaan hati nurani tidak tersentuh, tidak tergarap

Di sinilah jumbuh dan tumpang tindihnya agama dan politik. Disini pulalah letak dilema hubungan antara agama dan politik. Ketika ada jargon *ad-din wa ad-daulah,* maka kita jangan cepat terkecoh dan terjebak dalam jeratan jargon tersebut. Agama sebagai institusi memang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan *(interest*) politik, perebutan kekuasaan. Itu yang saya maksud dengan agama menjelma menjadi institusi. Ketika agama diinstitusikan dan menjadi lengket dengan politik maka *hate speech*, syak wasangka, tindakan diskriminatif akan muncul dengan sendirinya. Lalu kehilangan nilai-nilai solidaritas kemanusiaan. Kalau agama sudah masuk tercebur dalam dunia politik yang terjadi kan kontestasi, rivalitas, perebutan kekuasaan. Oh sakit. Fokusnya menjadi sangat profan, *worldly*, duniawi. Kalau agama lengket dengan politik—sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era demokrasi—maka sakit lah seluruh organ tubuh keberagamaan kita. Dan itu sebenarnya yang sedang kita alami sekarang ini.

Ketika agama lengket dengan politik, itu tadi jargon-jargon kontestasi, *rivalitas*, perebutan kekuasaan dan itu sikut-sikutan, *minna -minhum*, pemecah belahan sana sini yang mengemuka. Nah kita sebagai manusia beragama yang "otonom" melihatnya secara rileks dan kepala dingin saja karena itu semua adalah tuntutan kelembagaan. Itulah *la'bun, Lahwun* dan *tafakhurun*.

Kita sebagai *human being*, *al insyaniyah* jangan sampai terjebak dan larut pada yang sifat keberagamaan yang institusional tadi. Kita jangan kehilangan semua. Kita harus mampu menyapa

hati nurani kita, *qalbun salim* kita. Wilayah ruh kita (*wa nafakhtu fihi min ruuhi*). Ruh yang tidak mengenal pembeda-bedaan agama, bahasa, ras, etnis dan golongan. Nah pengembangan kapasitas hati nurani seperti itu yang harus dilakukan, dipertajam. Sekarang ini kurang terdidik kan, kurang dikembangkan karena kalah dengan agama sebagai institusi yang kawin dengan institusi politik. Ada bahayanya itu. Nyatanya kita terpecah-pecahkan. "*wa qulubuhum syatta"* karena saling melempar tuduhan kafir *(takfiriyyah),* hati mereka berpecah-belah, kata Qur'an.

Penyebab wa *qulubuhum syatta",* ya *hate speech* dan *hate spin* itu. Maka mari kita kembali kepada agama yang membahagiakan dengan memperhatikan dan memprioritaskan pendidikan dan pemuliaan karakter, *character building*, pada akhlak mulia, budi pekerti luhur, pada nilai-nilai dasar kemanusiaan dan pada spiritualitas yang otentik. Dan kita harus mampu menjernihkan kehidupan beragama kita yang sudah tercampur dan terkontaminasi dengan institusi politik tadi.

Kompleksitas dan paradoks-paradoks dalam beragama begini yang harus diurai, kenapa agama kok tidak mencerahkan, padahal banyak orang mengatakan bahwa agama harus mencerahkan. Pertautan antara agama dengan politik itu sebetulnya oke-oke saja asal tidak melanggar batas-batas nilai-nilai kemanusiaan yang otentik. Ketika melanggar batas-batas itu maka *qulub*nya sakit (*fi qulubihim maradhun*), hatinya keras (*wa al-qasiyatu qulubuhum*) dan tidak mampu melihat secara jernih *(ta'ma al-qulub)* dan sebagai akibatnya beragama menjadi tidak lagi membahagiakan, tidak mencerahkan.

APA BATAS-BATAS ITU?

Yang saya maksud dengan batas-batas itu adalah nilai-nilai dan spiritualitas. Nilai-nilai kemanusiaan yang otentik-genuin dilapisi tingkat spiritualitas yang tinggi (*higher order of thinking*). Bagaimanapun pemilu itu kan hanya 5 tahunan. Maka sekarang ini ada usulan jangan hanya lima tahun, tambahlah menjadi 6 atau 7 tahun masa baktinya, tetapi Presiden hanya satu kali masa jabatan saja. Kalau dua kali ya kaya begini ini. Itu juga sebagai batas-batas institusional politik yang juga masuk akal. Bagi saya, sekali saja tetapi dengan masa bakti 6 atau 7 tahun seperti terjadi di beberapa negara lain seperti Perancis. Itu semua untuk mengurangi—tidak bisa menghilangkan - resiko keterpecahan ummat beragama yang berkepanjangan.

Dalam hal nilai kita perlu menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (*al-karamah al-Insaniyyah*) yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita perlu mengadopsi sifat, *character* dan nilai fundamental *Ar Rahmani Ar Rahim*, sebagai nilai universal yang disumbangkan oleh Islam. Sifat, nilai, karakter yang dinisbahkan kepada Ketuhanan, yang selalu kita sebut berulang kali ketika kita melakukan *mi'ra*j, menjalankan shalat lima 5 waktu. Kita kehilangan nilai-nilai fundamental di dalam proses pendidikan kita dari SD sampai Perguruan Tinggi. *Ar Rahman Ar Rahim* (*welas-asih*) itu kan puncak nilai *insaniyyah*, humanitas, untuk kemanusiaan universal. Bukan dipetak-petak, disekat-sekat sesuai institusi keagamaan, bahasa, etnisitas, ras, suku dan begitu seterusnya.

Ar Rahmani Ar Rahim itu penting, tetapi jangan *Ar Rahman Ar Rahim* dibatasi hanya untuk kalangan internal umat Islam saja.

Ar Rahman Ar Rahim itu untuk manusia pada umumnya bahkan untuk alam semesta. Kita kehilangan makna terdalam dalam memahami dan menghayati nilai ini. Lalu, kita kehilangan rasa empati, rasa simpati. Norma yang harus dihidupkan dan dikembangkan lagi sekarang ini. Rasa empati dan simpati kita hilang dibabat dan hanyut terseret deru ombak politik kekuasaan dengan berbagai derivasinya. Dengan perkembangan era industri ke 4.0, kalau kita tidak menghidupkan dan mengembangkan nilai-nilai ini, habis kita. Manusia bisa berubah seolah menjadi robot ciptaannya sendiri, robot yang tidak punya hati nurani, apalagi nilai dan spiritualitas.

Bedanya manusia dengan binatang dan alam semesta adalah hati nurani, nilai, spiritualitas. Robot itu tak punya hati nurani meski cakap membantu manusia. Manusia itu punya hati nurani. Karena itu, hati nurani ini harus dididik, dilatih ulang, dimuliakan, bagaimanapun caranya, meskipun banyak sekali rintangannya. Untuk membangkitkan kembali peran hati nurani dalam kehidupan. Kritik pengamat terhadap era industri 4.0 adalah karena terlalu fokus dan terobsesi pada *knowledge* dan *skill*. Kurang begitu peduli pada nilai dan spiritualitas. Era industri 5.0 akan mengoreksi kekurangan industri 4.0 Kembali ingin menekankan pentingnya nilai, spiritualitas dan humanitas. Pentingnya mengasah dan memekakan kembali hati nurani yang terbimbing oleh spiritualitas. Hati lah yang bisa mengendalikan perilaku manusia. Karena sebetulnya ruh agama ada dalam hati nurani manusia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH TAHUN 2019 DI KOTA BENGKULU

RISALAH PENCERAHAN

Islam adalah agama yang membawa dan menyebarluaskan risalah pencerahan (*din at-tanwir*) mengeluarkan umat manusia dari kegelapan (*al-dhulumat*) kepada kehidupan yang tercerahkan (*al-nur*). Misi kerisalahan Muhammad telah mengeluarkan bangsa Arab "jahiliyah" dalam struktur kepercayaan penyembah berhala, menista perempuan, berniaga dengan riba, memperbudak manusia, dan menyelesaikan sengketa dengan pertumpahan darah menjadi masyarakat Islam yang bertauhid, memuliakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, berniaga secara *halallan-thayyibah*, menyelesaikan konflik dengan damai, serta membangun tatanan sosial-kebangsaan yang berkeadaban.

Pencerahan merupakan nilai keutamaan yang tertanam dalam segenap kebaikan jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan yang maslahat, berkeadaban, dan berkemajuan. Dengan berislam yang mencerahkan, setiap muslim senantiasa menyebarkan akhlak mulia yang menebar ihsan yang melampaui sekaligus rahmat bagi semesta alam. Sebaliknya Islam melarang umatnya menyebarkan akhlak yang tercela (*al-akhlaq al-madhmumah*) yang membawa kerusakan di muka bumi (*fasad fil-ardl*).

Jika Islam dihayati secara murni maka setiap muslim menjadi cerah hati, pikiran, sikap, dan tindakannya. Setiap muslim yang tercerahkan selalu berbuat benar, baik, cinta kasih, damai, kata sejalan tindakan, menebar kesalehan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan universal, gemar bekerjasama *(taawun)* dalam kebaikan dan ketaqwaan, suka beramal salih, beramar *ma'ruf-nahi munkar* dengan cara yang *ma'ruf*, tidak akan mudah marah, buruk ujaran, iri, dengki, hasud, dendam, congkak, menebar permusuhan, dan segala perangai yang buruk. Islam yang mencerahkan belum menjadi kenyataan dalam kehidupan keummatan dan kebangsaan. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi kekerasan, sikap *takfiri*, penyebaran *hoaks*, intoleransi, ujaran kebencian dan permusuhan, serta praktik hidup yang menggambarkan kesenjangan antara lisan dan perbuatan.

Sebagai gerakan yang menisbahkan dirinya sebagai "pengikut Nabi Muhammad", Muhammadiyah berusaha mengaktualisasikan Islam Berkemajuan dengan menghadirkan Islam sebagai agama pencerahan, pembangun kemajuan dan peradaban *(din*

al-hadlarah). Karenanya, Tanwir Muhammadiyah tahun 2019 di Bengkulu meyampaikan Risalah Pencerahan sebagai berikut:

1. Beragama yang mencerahkan mengembangkan pandangan, sikap, dan praktik keagamaan yang berwatak tengahan (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, menghormati kemajemukan, dan pranata sosial yang utama sebagai aktualisasi nilai dan misi *ramhatan lil-'alamin*.

2. Beragama yang mencerahkan ialah menghadirkan risalah agama untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan agama untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan.
3. Beragama yang mencerahkan dengan khazanah *Iqra* menyebarluaskan penggunaan media sosial yang cerdas disertai kekuatan literasi berbasis *tabayun*, *ukhuwah*, *ishlah*, dan *ta'aruf* yang menunjukkan akhlak mulia. Sebaliknya menjauhkan diri dari sikap saling merendahkan, *tajassus*, *su'udhan*, memberi label buruk, menghardik, menebar

kebencian, bermusuh-musuhan, dan perangai buruk lainnya yang menggambarkan akhlak tercela.

4. Dalam beragama yang mencerahkan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Islam bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan permusuhan.
5. Dengan spirit beragama yang mencerahkan, umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-muaradhah*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama.
6. Beragama yang mencerahkan diperlukan untuk membangun manusia Indonesia yang religius, berkarakter kuat dan berkemajuan untuk menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia berkemajuan yang dicirikan oleh kapasitas mental yang membedakan dari orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya. Sementara nilai-nilai kebangsaan lainnya yang harus terus dikembangkan adalah nilai-nilai

spiritualitas, solidaritas, kedisiplinan, kemandirian, kemajuan, dan keunggulan.

7. Beragama yang mencerahkan diwujudkan dalam kehidupan politik yang berkeadaban luhur disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, dan lapang hati dalam perbedaan pilihan politik. Seraya dijauhkan berpolitik yang menghalalkan segala cara, menebar kebencian dan permusuhan, politik pembelahan, dan yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi peri kehidupan kebangsaan yang majemuk dan berbasis pada nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.

8. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bermisi dakwah dan tajdid berkomitmen kuat untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang mencerahkan kehidupan. Jiwa, alam pikiran, sikap, dan tindakan para anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah niscaya menunjukkan pencerahan yang Islami sebagaimana diajarkan oleh Islam serta diteladankan dan dipraktikkan oleh Nabi akhir zaman.

Bengkulu, 12 Jumadil Akhir 1440 H 17 Februari 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
ttd.	ttd.
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si	Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 545549	NBM. 750178

REKOMENDASI TANWIR MUHAMMADIYAH DI KOTA BENGKULU

BERDASARKAN Pidato Presiden Republik Indonesia, Pidato Iftitah Ketua Umum PP Muhammadiyah, pokok-pokok pikiran PP Muhammadiyah, Risalah Pencerahan, Pemikiran Strategis Kebangsaan, dan saran-saran peserta, Sidang Tanwir menyampaikan Rekomendasi kehidupan keummatan, kebangsaan, dan kenegaraan sebagai berikut:

1. Menjadikan Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia sebagai fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa. Kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa tersebut seraya menghindari primordialisme SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
2. Menegakkan kedaulatan negara dibidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa. Dalam menjalankan amanat agar benar-benar menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing dalam segala bentuknya, mengutamakan sumber daya dalam negeri, menegakkan kedaulatan

pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.

3. Mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
4. Melakukan rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia berbasis pada karakter bangsa sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Hendaknya ditempuh kebijakan yang benar-benar terfokus, tegas, dan jelas dalam memanfaatkan 20 prosen anggaran pendidikan untuk semata-mata pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul sebagaimana amanat konstitusi.
5. Menjalankan pemerintahan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat konstitusi serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Hukum jangan dijadikan alat kekuasaan dan politik tertentu yang merugikan kepentingan umum dan menyebabkan hilangnya kesamaan kedudukan semua orang di depan hukum *(equality before the law)*. Pejabat negara yang diberi jabatan dalam penegakkan hukum hendaknya bebas dari partai politik dan kepentingan politik apapun yang menyebabkan terjadinya politisasi dan

penyalahgunaan hukum yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

6. Melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip *good governance* serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjujung tinggi meritokrasi dan profesionalisme tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan. Dalam reformasi birokrasi tersebut penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara.

7. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global. Dalam sejumlah hal yang menyangkut kepentingan dalam negari serta tegaknya perdamaian dunia hendaknya Indonesia lebih tegas dan berani dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri sesuai jati diri negara yang berdaulat.

8. Penataan kembali pelaksanaan kebijakan kesehatan termasuk didalamnya Sistem Jaminan Kesehatan, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, fasilitasi kaum difabel dan penanganan kebencanaan yang lebih optimal dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan terhadap mereka yang membutuhkan.

9. Penguatan organisasi kemasyarakatan dan *civil society* diantaranya Muhammadiyah yang telah berjuang dan berperan serta mendirikan Republik Indonesia agar benar-benar memiliki posisi serta peranan penting dan strategis serta tidak mengalami peminggiran dan diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Organisasi kemasyarakatan tersebut berfungsi sebagai kekuatan moral yang menegakkan nilai-nilai utama kebangsaan sekaligus menjadi kekuatan kritik-konstruktif dan penyeimbang demi tegaknya Indonesia sebagai negara-bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bengkulu, 12 Jumadil Akhir 1440 H /17 Februari 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
ttd.	ttd.
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si	Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 545549	NBM. 750178

LIPUTAN

ISLAM MENCERAHKAN DEMI KEADABAN BANGSA

Rini Kustiasih*

Keterangan: Presiden Joko Widodo (tiga dari kiri) didampingi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Panitia Tanwir Ahmad Dasan (dari kiri) seusai memukul alat musik dol menandai pembukaan Tanwir Muhammadiyah 2019 di halaman Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Tanwir yang akan berlangsung hingga Minggu (17/2/2019) mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan".

Presiden menyatakan, bangsa Indonesia berterima kasih atas semua karya Muhammadiyah. Persyarikatan itu akan terus menyebarkan praktik beragama yang mencerahkan.

BENGKULU, KOMPAS —Kehidupan berbangsa belakangan ini, terutama menjelang Pemilu 2019, menunjukkan adanya sikap beragama yang kerap dibarengi dengan pandangan fanatik terhadap pilihan politik tertentu. Kondisi ini berpotensi mendorong sikap beragama yang cenderung jauh dari keadaban, mempertentangkan satu sama lain, dan menumbuhkan rasa permusuhan.

Keadaan ini jauh dari cita-cita substantif agama yang ingin menjauhkan umat manusia dari kegelapan. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia merasa wajib untuk menyebarkan pesan dan praktik Islam yang mencerahkan.

Konsep mengenai "Beragama yang Mencerahkan" itu diangkat oleh Muhammadiyah sebagai tema Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka Presiden Joko Widodo, Jumat (15/2/2019), di Bengkulu.

Hadir dalam acara pembukaan itu, antara lain, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Keterangan: Paduan suara Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars Sang Surya saat pembukaan Tanwir Muhammadiyah 2019 di halaman Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Tanwir dibuka Presiden Joko Widodo mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan".

Presiden tiba di lokasi pembukaan sidang tanwir disambut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan pimpinan Muhammadiyah lainnya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas peranan Muhammadiyah. Persyarikatan tersebut, melalui amal usahanya, telah berbuat banyak bagi bangsa dan negara sejak perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Muhammadiyah juga banyak melahirkan tokoh yang berjasa bagi Republik, seperti KH Ahmad Dahlan, Ibu Siti Walidah Dahlan, Ir Soekarno, Fatmawati Soekarno, dan Kasman Singodimedjo.

"Rakyat Indonesia sangat berterima kasih atas amal usaha Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi institusi-institusi Muhammadiyah yang, antara lain, berupa sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan rumah sakit," kata Presiden.

Apresiasi juga disampaikan Presiden kepada berbagai organisasi di bawah Muhammadiyah, kelompok pemuda dan pelajar, serta organisasi perempuan Aisyiyah.

Keterangan: Atraksi musik dol memeriahkan pembukaan Tanwir Muhammadiyah 2019 di halaman Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Tanwir dibuka Presiden Joko Widodo mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan".

Mencerahkan kehidupan

Haedar Nashir menjelaskan, ada dua alasan yang membuat Muhammadiyah mengambil tema "Beragama yang Mencerahkan" dalam sidang tanwir kali ini. Pertama, karena Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya kini dituntut untuk menyebarkan

pesan dan praktik Islam yang mencerahkan kehidupan, sebagaimana dituntun oleh Al Quran.

Kedua, dalam kehidupan sehari-hari masih dijumpai pemahaman dan pengamalan agama yang menimbulkan sejumlah persoalan. Hal itu, misalnya, berupa sikap ekstrem, intoleran, takfiri, penyebaran hoaks, politisasi agama, dan ujaran kebencian. Praktik-praktik itu memisahkan diri dari hajat hidup orang banyak dan menjauhi prinsip agama yang semestinya melahirkan rahmat bagi semesta alam.

Muhammadiyah ingin membangkitkan kembali kesadaran kolektif umat tentang Islam sebagai agama yang mencerahkan. Hal itu penting untuk menjaga nilai-nilai positif bangsa Indonesia, seperti toleransi, kedamaian, gotong royong, dan semangat untuk maju.

Nilai-nilai positif yang menjadi arus besar dalam kehidupan bangsa ini sekarang kadang kalah oleh arus kecil yang membawa kecenderungan sikap politik yang mengeras.

"Arus besar itu kadang terkalahkan oleh kecenderungan politik yang mulai mengeras sehingga satu sama lain terbelah, berbenturan, dan bermusuhan. Hal itu melahirkan perangai politik yang fanatik buta demi kemenangan politik semata," tutur Haedar.

Haedar mengingatkan, politik pertentangan itu bisa membawa kehancuran atau perang saudara sebagaimana pernah ditulis oleh Empu Sedah pada tahun 1157 tentang terjadinya perang di Kurusetra antara Kerajaan Kediri dan Jenggala. Padahal, dua kerajaan itu masih bersaudara karena sama-sama keturunan Raja Erlangga.

"Jangan sampai kita mengikuti arus kecil yang bernuansa Kurusetra itu. Kami yakin dalam kehidupan kebangsaan kita masih ada elite yang cerah hati dan sikapnya untuk menyebarkan kehidupan politik kebangsaan yang cerah dan mencerahkan," katanya.

Implementasi dari sikap beragama yang mencerahkan itu, menurut Haedar, ialah sikap saling menghormati, ramah, dan tidak mengedepankan sikap keras hati, bahkan menggunakan kekerasan. Prinsip amar makruf nahi mungkar, yang mengajarkan umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah atau meninggalkan hal-hal buruk, harus dilakukan dengan mengedepankan sikap lemah lembut.

"Bahkan, dalam mengajak nahi mungkar (mencegah keburukan) pun tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mungkar (buruk atau hal yang dilarang)," katanya.

Keterangan: Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah 2019 di halaman Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Tanwir yang akan berlangsung hingga Minggu (17/2/2019) mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan".

Harapan

Terkait tema "Beragama yang Mencerahkan", Presiden menuturkan, hal itu merupakan harapan semua pihak.

Sebagai bangsa dengan 260 juta penduduk serta adat tradisi yang beragam, menurut Presiden, perlu bagi semua pihak untuk terus merawat persatuan dan persaudaraan.

"Saya ajak kita semuanya untuk memelihara, merawat persatuan, kerukunan kita, ukhuwah islamiah (persaudaraan dalam Islam), ukhuwah wathoniyah (persaudaraan dalam kebangsaan) kita karena itulah aset terbesar yang dimiliki bangsa ini," ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memaparkan capaian pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Presiden Jokowi juga membantah sejumlah isu yang ditujukan kepadanya.

Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A Mughni mengatakan, dari sidang tanwir ini diharapkan lahir pikiran yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang ramah, menyejukkan, dan membawa kemaslahatan bagi semua. "Agama melarang kita saling bermusuhan dan saling membenci. Kita kembali pada substansi agama," katanya.

Sabtu ini dan esok hari akan digelar sidang tanwir yang membahas soal organisasi, keumatan, dan kebangsaan. Sidang tanwir akan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari Minggu. Sumber: Kompas, 16 Februari 2019

INDEKS

E

F

G

H

I

J

K

Q

R

S

T

U

PROFIL PENULIS

Abdul Mu'ti. Sekretaris Umum PP. Muhammadiyah/Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Peneliti Doktoral di School of Political Sciences and International Studies, University of Queensland, Australia. Ia terlibat aktif di Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) dan Jaringan Riset Earth System Governance (ESG). Aktif sebagai Pengurus PRIM Queensland dan Wakil Ketua PCIM UK 2015-2017

Andar Nubowo. Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 12 Mei 1980. Selepas Sekolah Dasar (1992) Inpres I di Kaliwiro, Wonosobo, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (1995) di Banyumas dan Sekolah Menengah Atas (1998) di Surakarta. Mempelajari teks-teks primer keagamaan dan filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan memperoleh gelar sarjana pada 2004. Berangkat ke Perancis untuk melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master (Juli 2008) bidang Ilmu Politik dari Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris. Sejak 2010, menempuh program PhD di Ecole des hautes etudes en scien-

ces sociales. Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) dan peneliti pada Center of Muhammadiyah Studies PP Muhammadiyah ini pernah menjadi Redaktur Pelaksana Media *Inovasi* (2005-2006), sebuah jurnal terbitan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Direktur Program Lembaga Studi Islam dan Politik Yogyakarta (2005-2006); dan Manager Program People Voters Education Network-The Asia Foundation (2004-2006 Saat ini ia adalah Associate Research Fellow di Institute of Defense and Strategic Studies, Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University, Singapore

Ari Susanto. Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), merupakan alumnus Ekonomi Syariah FAI UMY. Beberapa buku yang ditulisnya seperti Membumikan Gerakan Sosial Islam Progresif dan Tugas Intelektual Muslim : Menegakkan Konstitusi Membela Kemanusiaan. Begitu juga tulisan opini terkadang menghiasi koran Nasional seperti Kompas, Republika, Media Indonesia. Latarbelakang aktivis, kini mengantarkannya aktif di Lembaga Pegiat Pendidikan Indonesia (PUNDI).

Azaki Khoirudin. Penulis, editor konten, dan peneliti muda di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSBPS UMS). Saat ini sedang menempuh program doktor studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karya publikasi berupa buku antara lain: *Nun-Tafsir Gerakan al- Qalam* (2012, 2013, 2014); *Fajar Baru* (2012), *Pendidikan*

Akhlak Tasawuf (2013); *Mewujudkan Impian Masyarakat Berkemajuan: Sejarah Muhammadiyah Gresik Kota Baru* (2013); *Pelajar Bergerak: Menuju Indonesia Berkemajuan* (dkk., 2014); *Mercusuar Peradaban: Manifesto Gerakan Pelajar Berkemajuan* (2015); *Teologi Al-'Ashr: Etos dan Ajaran K.H.A. Dahlan yang Terlupakan* (2015); *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia* (dkk., 2015); *Demi Pena: Sejarah dan Dinamika IPM* (1961–2016); *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*: *Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Makassar* (dkk., 2016); *Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban* (2018). Selain itu, karya ilmiahnya telah diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah seperti: *Afkaruna* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta); *Journal of Al-Tamaddun* (University of Malaya); Iseedu (Universitas Muhammadiyah Surakarta); *Jurnal At-Ta'dib* (UNIDA Gontor); *Jurnal of Muhammadiyah Studies* (Universitas Muhammadiyah Malang); dan *Jurnal Tajdida* (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Pada saat ini ia sedang fokus mengelola *platform* digital IBTimes.ID: Kanal Islam Berkemajuan (ibtimes.id).

Benni Setiawan. Lahir di Pangkal Pinang Bangka Belitung, besar di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Melalui pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP/MTs) di Sukoharjo, kemudian menamatkan pendidikan MA di Solo Jawa Tengah. Jalan takdir membawanya dapat menyesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berteman dengan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengajarkannya dapat menulis. Anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020). Artikelnya termuat dalam berbagai

media cetak dan online sejak tahun 2005. Hingga kini tercatat ratusan tulisan telah termuat di berbagai media. Menulis beberapa buku diantaranya *Manifesto Pendidikan Indonesia* (2006), *Pilkada dan Investasi Demokrasi* (2006), *Agenda Pendidikan Nasional (2008), Rancangan Bangun Pendidikan Indonesia, Catatan Pendidikan untuk Indonesia Berkemajuan (2014), Keterasingan Pendidikan Nasional (2019).* Mengawali karir di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai dosen luar biasa pada tahun 2012-2015. Sejak 2015 sampai sekarang sebagai dosen tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU. Dapat dihubungi melalui bennisetiawan@uny.ac.id.

David Krisna Alka. Lahir di Manna, 29 Juni 1980. Lulusan SMU Plus INS Kayutanam dan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah menulis Opini, Esai, dan puisi, di Republika, Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Jawa Pos, Majalah Sastra Horizon, Geotimes, Qureta dll. Sajak-sajaknya juga termuat daam sejumlah buku antologi puisi, antara lain Bung Hatta dalam Puisi (2001), Dian Sastro for President (2004), Luka Aceh Duka Semua (2005) dan Muhammadiyah Sebagai Tenda Kultural (2004). Tulisannya juga pernah ada di Amerika Perangi Terorisme, Islam Mazhab Moderat 70 thn Tarmizi Taher, dan Komen dalam bukunya M. Shofan. Sekarang nongkrong kreatif di YADMI, CMM, dan MERTI. Kini ia adalah Peneliti Senior MAARIF Institute, Research Associate The Indonesian Institute, dan Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Fajar Riza Ul Haq. Lahir di Sukabumi,1979 merupakan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020), Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendy Bidang Kerjasama Antar Lembaga, dan mantan Direktur Eksekutif MAARIF Institute (Desember 2009-Februari 2017). S1 di Jurusan Syariah,Universitas Muhammadiyah Surakarta (2002). S2 di Program Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Universitas Gadjah Mada (2006). Mengikuti beberapa pendidikan non-gelar: Chevening Fellowship di Universitas Birmingham, Inggris (2009), Sloan School of Management, MIT, Amerika (2011-2012), dan School of Economics and Management, Universitas Tsinghua, China (2013). Berkiprah di pelbagai forum Internasional; pembicara Global Counter Terrorism Forum's Practisioners Workshop di Washington (2013), United Nations Alliance of Civilizations di Wina (2013), International Visitor Leadership Program of US State Department (2012), ASEAN-Australia Emerging Leaders Program di Kuala Lumpur (2012), Global Counter Terrorism Forum-Working Group di Manila (2012), The 17 New Generation Seminar, the East West Centre di Hawai, Shanghai, dan Tokyo (2007), Facilitation of Dialogue Process and Mediation Efforts, Folke Bernadotte Academy, di Swedia (2007), dan Australia-Indonesia Young Muslim Leaders Exchange (2005).

Hasnan Bachtiar. Peneliti filsafat dan teologi sosial di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang yang merupakan Dosen Fakultas Agama Islam. Pada 2012, ia menjadi peneliti di bidang yang sama, bersama Dr. Azhar Ibrahim Alwee

di Fakultas Seni dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Nasional Singapura (NUS). Pada 2013 awal, ia mendirikan *The Reading Group for Social Transformation* (RGST), sebuah kelompok baca, yang mendedikasikan dirinya untuk perubahan kebudayaan menuju kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan. Ia juga tercatat sebagai aktivis dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM).

Husni Amriyanto Putra. Dosen Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini menjadi anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ilham Ibrahim. Pegiat Pusat Tarjih Muhammadiyah.

Muhbib Abdul Wahab. Sekretaris Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren PP Muhammadiyah. Ketua Program Magister Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyyah dan Ilmu Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pengajar Program Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Piet Hizbullah Khaidir. Sekretaris STIQSI Sendangagung Lamongan, Pegiat Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pradana Boy ZTF. Dosen tetap di Jurusan Syari'ah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Lahir di Lamongan, 16 Juli 1977, ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Syari'ah di UMM (2000). Gelar Master of Arts di bidang pemikiran dan gerakan Islam kontemporer di Asia Tenggara ia raih dari Fakultas Kajian Asia di Australian National University (ANU), Canberra, pada tahun 2007. Jenjang pendidikan S-3 di bidang hukum Islam diperoleh dari Jurusan Kajian Masyarakat Melayu, di National University of Singapore (NUS) pada tahun 2015. Selain menulis buku-buku ilmiah, ia juga menulis karya fiksi dalam bentuk novel. Di antara novel yang sudah ditulis adalah *Sang Penakluk Ombak* (2010) dan *Kembara* (2014).

Sudarnoto Abdul Hakim. Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.